

PEMILIHAN KEPALA DESA
Kajian Implementasi Peraturan Daerah
Kabupaten Rembang No.7 Tahun 2000
Di Kecamatan Sarang

TESIS
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Derajat Sarjana S-2

Program : Pasca Sarjana Universitas Diponegoro
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi
Konsentrasi : Magister Administrasi Publik



Diajukan Oleh
EDDY KISWANTO
D4E003005

PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG
2004

PEMILIHAN KEPALA DESA
Kajian Implementasi Peraturan Daerah
Kabupaten Rembang No.7 Tahun 2000
Di Kecamatan Sarang

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Derajat Sarjana S-2

Program : Pasca Sarjana Universitas Diponegoro
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi
Konsentrasi : Magister Administrasi Publik



Diajukan Oleh

EDDY KISWANTO
D4E003005

PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG
2004

PERNYATAAN

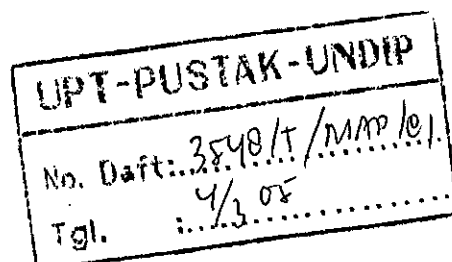
Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, September 2004

Penulis



EDDY KISWANTO



Pengesahan Tesis

PEMILIHAN KEPALA DESA
(Kajian Implementasi Perda Kabupaten Rembang No.7 Tahun 2000
Di Kecamatan Sarang)

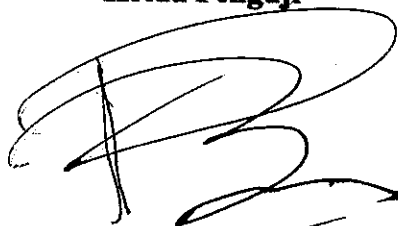
Dipersiapkan dan disusun oleh

EDDY KISWANTO
D4E003005

Telah dipertahankan di depan tim penguji
Pada tanggal : 8 September 2004

Susunan Tim Penguji

Ketua Penguji



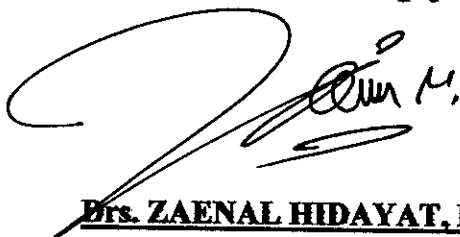
DR. PURBAYU BUDI SANTOSO, MS

Anggota Dewan Penguji :

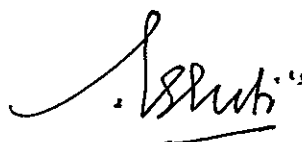


1. Dra. ENDANG LARASATI, MS

Sekretaris Penguji

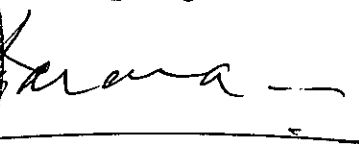


Drs. ZAENAL HIDAYAT, MA



2. Dra. RETNO SUNU ASTUTI, MSI

Tanggal 8 September 2004
Ketua Program Studi MAP
Universitas Diponegoro Semarang



Prof. Drs. Y. WARELLA, MPA, Ph.D

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT, atas limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini, yang merupakan akhir dari rangkaian tugas-tugas studi dalam mencapai derajat Strata II pada studi Magister Administrasi Publik Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang sesuai dengan jadwal waktu perencanaan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaian penulisan tesis ini tidak terlepas dari bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak DR. Purbayu Budi Santoso, MS. sebagai pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran selama membimbing penulis dalam menyusun tesis dengan penuh kesabaran.
2. Bapak Drs. Zaenal Hidayat, MA sebagai pembimbing II yang sangat membantu penulis dalam memberikan koreksi dan arahan-arahan yang sangat berguna untuk penulisan tesis ini.
3. Segenap Aparatur Kecamatan Sarang yang telah memberikan fasilitas guna kelancaran penyelesaian penyusunan tesis ini.
4. Seluruh staf MAP Undip yang telah bekerja cukup profesional dalam menggerakkan sistem belajar mengajar dengan baik.
5. Kepada istriku tercinta Siti Nurul Faizah yang telah banyak memberikan dorongan guna penyelesaian tesis ini. dan ketiga anak-anakku

tersayang, Ulfah Karina Devi, Fira dan Iqbal, yang telah banyak kehilangan waktu demi kelancaran studi ini.

6. Seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan IX intensif MAP Universitas Diponegoro Semarang yang sudah memberikan semangat, dan saling bekerja sama sehingga terwujud suasana studi yang sangat kondusif.

Atas semua hal tersebut, sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih serta teriring doa semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua amin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan kesalahan yang terjadi, hal itu semata-mata karena keterbatasan penulis sebagai manusia. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi penyempurnaan tesis ini.

Semarang, 1 September 2004

Penulis



EDDY KISWANTO

RINGKASAN

Menyikapi paradigma otonomi daerah yang sekaligus juga memberikan penguatan kepada otonomi desa, pemerintah Kabupaten Rembang mengambil langkah-langkah perbaikan pelaksanaan dibidang pemerintahan daerah khususnya pada pemerintahan desa. Hal itu dilakukan sebagai upaya penyesuaian dengan dinamika kehidupan masyarakat di pedesaan yang sangat beragam khususnya adat-istiadat, budaya, tingkat pendidikan dan ekonomi serta demokratisasi desa yang semakin berkembang. Sejalan dengan itu fokus permasalahan yang diteliti adalah implementasi kebijakan peraturan daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. Hal-hal yang berkenaan dengan proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan variabel-variabel yang mempengaruhi proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang. Dalam struktur pemerintahan desa, Kepala Desa mempunyai kedudukan yang sangat strategis dan dipilih secara langsung oleh masyarakat desa. Oleh karena itu banyak isu permasalahan yang muncul setiap ada pemilihan Kepala Desa, terutama pada pembentukan panitia yang terkesan kurang demokratis karena kurang keterbukaan dalam penentuan orang yang duduk dalam kepanitiaan, kampanye Kepala Desa yang sering kurang memenuhi etika, terjadi kecurangan dalam mencari dukungan warga desa, sering terjadi penekanan terhadap pemilih agar mendukung calon tertentu. Masalah-masalah tersebut di atas digunakan sebagai variabel penelitian yaitu penjurangan calon Kepala Desa, kampanye calon Kepala Desa, pemungutan dan perhitungan suara, pengumuman dan penetapan calon terpilih, pengesahan dan pelantikan calon Kepala Desa serta proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di Kecamatan Sarang, populasinya adalah masyarakat di wilayah kecamatan sarang yang terdiri dari 23 desa 57.282 jiwa dengan menggunakan metode Random Sampling di tiga desa yaitu desa Temperak, desa Tawangrejo dan desa Gilis yang mewakili desa maju, desa sedang dan desa kurang maju, dengan jumlah sampel sebanyak 175 responden. Dari jawaban kuisioner yang diolah maka diperoleh bukti sebagai berikut : hubungan antara variabel penjurangan dengan variabel pelaksanaan pemilihan Kepala Desa (X_1 dengan Y) mempunyai koefisien korelasi sebesar 0,213 dengan tingkat signifikansi 0,004. Hubungan antara variabel pelaksanaan pemilihan Kepala Desa (X_2 dengan Y) mempunyai koefisien korelasi sebesar 0,004 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,563. Hubungan antara variabel pemungutan dan perhitungan suara dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa (X_3 dengan Y) mempunyai koefisien korelasi sebesar 0,284 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Hubungan antara variabel pengumuman dan penetapan calon terpilih dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa (x_4 dengan Y) adalah mempunyai koefisien korelasi sebesar 0,195 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,008. Sedangkan hubungan variabel pengesahan dan pelantikan Kepala Desa terpilih dengan proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa (X_5 dengan Y) mempunyai koefisien korelasi sebesar 0,474 dengan tingkat signifikansi sebesar

0,000. Uji korelasi antara X1, X2, X3, X4, X5 secara bersama-sama dengan Y (uji Hipotesis Asosiatif) dengan menggunakan koefisien konkordansi kendall (kendall w) hasilnya adalah sebesar 0,468 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Hal itu berarti terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara variabel bebas penjurangan calon Kepala Desa, kampanye calon Kepala Desa, pemungutan dan perhitungan suara, pengumuman dan penetapan calon terpilih, pengesahan dan pelantikan Kepala Desa terpilih dengan variabel tergantung yaitu proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Penjurangan calon Kepala Desa serta pemungutan dan perhitungan suara yang selama ini diasumsikan tidak demokratis dan banyak kecurangan yang terjadi pada setiap pemilihan Kepala Desa berdampak pada kurangpercayaan masyarakat desa terhadap para elit desa maupun panitia pemilihan Kepala Desa. Namun pada kenyataannya hasil penelitian membuktikan bahwa proses penjurangan serta pemungutan dan perhitungan suara lebih berjalan secara terbuka dan secara umum tidak terdapat kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara. Sedangkan kampanye calon Kepala Desa yang diasumsikan tidak tertib dan banyak dilakukan penyimpangan-penyimpangan sehingga berdampak buruk terhadap situasi keamanan desa. Namun hasil penelitian warga desa yang mempunyai hak pilih tetap menganggap bahwa kampanye perlu dilakukan oleh calon Kepala Desa agar mendapatkan dukungan dari warga desa setempat. Dari hasil penelitian melalui pengolahan data dengan menggunakan uji korelasi kendall dapat disimpulkan bahwa variabel pemungutan dan perhitungan suara mempunyai pengaruh yang kuat terhadap proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, sedangkan variabel pengesahan dan pelantikan mempunyai pengaruh yang sangat dominan terhadap proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. Variabel yang mempunyai pengaruh yang lemah terhadap proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa adalah variabel kampanye calon Kepala Desa, walaupun secara umum kampanye calon Kepala Desa masih diperlukan untuk mendapatkan dukungan suara dari warga desa yang mempunyai hak pilih. Oleh karena itu agar Perda Kabupaten Rembang No.7 Tahun 2000 berjalan dengan baik, manakala dilaksanakan secara bersama-sama diantara para aparatur pelaksana, baik dari Pemerintah maupun swasta/masyarakat, dengan tetap memperhatikan perkembangan kehidupan demokrasi di masyarakat pedesaan.

ABTRAKSI

Fokus penelitian ini adalah implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Th.2000 tentang tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang dengan tujuan ingin mengetahui hubungan / pengaruh variabel bebas yaitu penjaringan calon Kepala Desa, kampanye calon Kepala Desa, pemungutan dan penghitungan suara, pengumuman dan penetapan calon terpilih, pengesahan dan pelantikan Kepala Desa dengan variabel tergantung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan memberikan daftar pertanyaan kepada 175 orang sebagai responden secara random sampling di tiga desa dari 23 desa yang ada di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang. Data primer dan skunder yang diperoleh dari jawaban responden diolah dengan menggunakan analisis statistik Rank Kendall. Hasil penelitian yang diperoleh adalah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara variabel bebas penjaringan calon Kepala Desa, Kampanye calon Kepala Desa, pemungutan dan perhitungan suara, pengumuman dan penetapan calon terpilih, pengesahan dan pelantikan Kepala Desa dengan variabel tergantung proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang. Hasil penelitian juga menunjukkan ada dua variabel yaitu variabel pemungutan dan perhitungan suara serta variabel pengesahan dan pelantikan Kepala Desa dengan variabel proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang mempunyai hubungan yang sangat signifikan. Sedangkan variabel kampanye calon Kepala Desa mempunyai hubungan yang positif, dan tidak signifikan dengan variabel proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang.

Kata kunci : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK & PEMILIHAN KEPALA DESA

ABSTRACT

Focus of this research is on the implementation of Rembang Regencial Regulation Number 7/2000 on the Regulation of Candidacy, Selection, Inauguration and Termination of Village Head in Sarang District, Rembang Regency, to know the relation/influence of Village Head candidates recruitment, Village Head candidate campaign, election and vote counting, announcement and selection of selected candidates, formalization and inauguration of Village Head as dependent variables with the implementation of Village head selection in Sarang District, Rembang regency. This research employed quantitative method by giving questionnaires to 175 people as respondents by using random sampling technique in three out of 23 villages in Sarang District. Data was analyzed statistically using Rank Kendall technique. The result shows that there are positive and significant relations between the independent and dependent variables. It is proved that there are two variables, namely election and vote counting, as well as formalization and inauguration variables, which have strong relationship with the implementation of Village Head selection. However, there is positive and not significant relation between Village Head candidate campaign with the implementation of Village Head selection in Sarang District, Rembang regency.

Keywords : implementation, public, policy, Village Head, selection.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
RINGKASAN	vii
ABSTRAKSI	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Perumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	17
D. Kegunaan Penelitian	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Landasan teori	19
1. Pengertian Kajian Publik	19
2. Pengertian Implementasi Kebijakan	23
3. Desa dan Pemerintah Desa	28
4. Pemerintah dan Kepemimpinan Desa	35
B. Penelitian sejenis yang relevan	43
C. Hipotesis	46
1. Hipotesis Verbal	46
2. Hipotesis Geometri	47
BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Rancangan Penelitian	50

B. Ruang Lingkup	50
C. Lokasi Penelitian	51
D. Variabel Penelitian	51
1. Klasifikasi variabel penelitian	51
2. Definisi Konseptual	51
3. Definisi Operasional	53
E. Jenis dan Sumber Data	56
F. Instrumen Penelitian	56
G. Populasi dan teknik Pengambilan Sampel	57
H. Teknik Pengumpulan Data	58
I. Teknik Analisis Data	60
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN	
PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	66
A. Deskripsi Wilayah Penelitian	66
B. Hasil Penelitian	73
C. Analisis Hasil Penelitian	75
1. Penjaringan Calon Kepala Desa	76
2. Kampanye Calon Kepala Desa	81
3. Pemungutan dan Penghitungan Suara	87
4. Pengumuman dan Penetapan Calon Terpilih	93
5. Pengesahan dan Pelantikan Calon Terpilih	99
6. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	105
D. Diskusi	118
BAB V KESIMPULAN	130
A. Kesimpulan	130
B. Saran	131
Daftar Pustaka	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Data Jumlah Calon Kepala Desa Kecamatan Sarang	13
Tabel 4.1.	Luas Wilayah Tiap-Tiap Desa Serta Jumlah Penduduk	67
Tabel 4.2.	Penggunaan Lahan Sawah di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang Tahun 2003	69
Tabel 4.3.	Penggunaan Lahan Kering di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang Tahun 2003	70
Tabel 4.4.	Jumlah responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	
Tabel 4.5.	Jumlah Responden Berdasarkan Usia	73
Tabel 4.6.	Keterlibatan warga desa dala pembentukan panitia Pilkades	77
Tabel 4.7.	Rapat musyawarah desa sebelum pembentukan panitia Pilakdes	77
Tabel 4.8.	Tingkat kejujuran dan tugas panitia Pemilihan kepala desa	78
Tabel 4.9.	Sikap masyarakat dalam melihat ketidakberesan kerja panitia	78
Tabel 4.10.	Calon kepala desa berasal dari penduduk setempat	79
Tabel 4.11.	Calon kepala desa berasal dari putra desa	80
Tabel 4.12.	Frekuensi jawaban responden tentang variabel penjaringan calon kepala desa	80
Tabel 4.13.	kampanye guna mencari dukungan masyarakat (pemilih)	82
Tabel 4.14.	Pelaksanaan kampanye	82
Tabel 4.15.	Ketertiban kampanye	83
Tabel 4.16.	pengaruh ketertiban kampanye terhadap pelaksanaan pemilihan kepala desa	84
Tabel 4.17.	Visi dan misi calon kepala desa	85
Tabel 4.18.	Program kerja calon kepala desasesuai aspirasi warga desa	85
Tabel 4.19.	Frekuensi jawaban responden tentang kampanye calon kepala desa	86

Tabel 4.20.	Kondisi Tempat Pemungutan Suara	87
Tabel 4.21.	Kondisi TPS sebagai sarana penyampaian aspirasi dan jaminan kerahasiaannya	88
Tabel 4.22.	Pemungutan suara berjalan aman, tertib dan lancar	89
Tabel 4.23.	Pemilih yang menggunakan hak pilihnya apakah mendapat tekanan dari kelompok tertentu	90
Tabel 4.24.	Pelaksanaan penghitungan suara dilakukan dihadapan masyarakat dan pihak berkepentingan	91
Tabel 4.25.	Pelaksanaan penghitungan suara perlu pengawasan dari masyarakat maupun panitia dari Kabupaten	92
Tabel 4.26.	Frekuensi jawaban responden tentang pemungutan perhitungan suara	92
Tabel 4.27.	Perolehan suara pemilihan kepala desa diumumkan serta setelah perhitungan suara selesai	94
Tabel 4.28.	Panitia yang tidak mengumumkan hasil perolehan suara adalah pelanggaran	94
Tabel 4.29.	Penetapan calon terpilih berdasarkan hasil rapat panitia	95
Tabel 4.30.	Apakah pengumuman calon terpilih dapat batal karena tekanan tokoh masyarakat	96
Tabel 4.31.	Penetapan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak	97
Tabel 4.32.	Penetapan BPD untuk calon terpilih	98
Tabel 4.33.	Frekuensi jawaban responden tentang pengumuman dan penetapan calon terpilih	98
Tabel 4.34.	Pengaruh pengesahan Bupati terhadap calon terpilih	100
Tabel 4.35.	Kepala Desa mengucapkan sumpah dan janji sebelum menduduki jabatan	100
Tabel 4.36.	Kepala Desa dipilih secara demokratis	101
Tabel 4.37.	Pemilihan kepala desa di desa sering diwarnai tekanan dari kelompok tertentu	102
Tabel 4.38.	Pembekalan/Pelatihan Teknis Pemerintahan Desa bagi kepala desa yang baru dilantik untuk kelancaran tugas	103
Tabel 4.39.	Manfaat pembekalan/pelatihan terhadap peningkatan kemampuan kepala desa	104

Tabel 4.40. Frekuensi jawaban responden tentang pengesahan dan pelantikan kepala desa	105
Tabel 4.41. Keamanan, ketertiban dan kelancaran pemilihan kepala desa di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang	106
Tabel 4.42. Dukungan Warga terhadap pelaksanaan pemilihan kepala desa	107
Tabel 4.43. Pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kecamatan Sarang serta tingkat kesesuaian terhadap Perda No 7 Tahun 2000	108
Tabel 4.44. Sosialisasi pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang	109
Tabel 4.45. Sikap masyarakat di desa terhadap pelaksanaan pemilihan kepala desa	110
Tabel 4.46. Kesadaran masyarakat desa dalam menentukan pemimpin desa	110
Tabel 4.47. Proses pelaksanaan pemilihan kepala desa	111
Tabel 4.48. Korelasi antara Penjaringan calon Kades dengan Proses Pelaksanaan Pilkades	112
Tabel 4.49. Korelasi antara Kampanye terhadap proses pelaksanaan Pilkades	113
Tabel 4.50. Korelasi antarpemungutan dan perhitungan suara dengan pelaksanaan pemilihan kepala desa	114
Tabel 4.51. Korelasi antara pengumuman dan penetapan calon terpilih dengan proses pelaksanaan pemilihan kepala desa	115
Tabel 4.52. Korelasi antara pengesahan dan pelantikan kepala desa dengan proses pelaksanaan pemilihan kepala desa	116
Tabel 4.53. Uji korelasi penjaringan, kampanye, pemungutan dan perhitungan suara, pengumuman dan penetapan calon terpilih, pengesahan dan pelantikan kepala desa dengan proses pelaksanaan pemilihan kepala desa	117

DAFTAR GAMBAR

1. HIPOTESA MINOR	48
2. HIPOTESA MATOR	49
3. GAMBAR PEMBENTUKAN KEPANITIAN PENCALONAN KADES	121
4. GAMBAR WAWANCARA DENGAN TOKOH MASYARAKAT DESA GILIS	123
5. GAMBAR PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DESA TAWANGREJO DAN GILIS	125
6. GAMBAR WAWANCARA DENGAN APARATUR KECAMATAN SARANG	128
7. GAMBAR WAWANCARA DENGAN KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN KABUPATEN REMBANG	129

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran i Perda Kabupaten Rembang No. 7 Tahun 2000
- Lampiran ii Daftar pertanyaan (kuisisioner)
- Lampiran iii Pengolahan hasil kuisisioner (SPSS)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi itu di bagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang. Dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan di daerah menganut asas otonomi dan tugas pembantuan, memberi kesempatan pada daerah untuk mengurus dan menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Tap MPR RI Nomor XV/MPR/1998, menyatakan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara profesional, dengan prinsip-prinsip demokrasi, meningkatkan peran serta masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas masyarakat, pemerataan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah setempat.

Pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab

kepada Badan Perwakilan Desa (BPD) serta menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Perkembangan situasi pada akhir-akhir ini, kita sedang berada pada situasi yang tidak menentu dimana perubahan seringkali mendasar dan sulit diramalkan sebelumnya. Untuk menghadapi situasi seperti itu dibutuhkan seorang Kepala Desa yang mempunyai kemampuan dan kemauan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi secara berkesinambungan.

Pemerintah desa merupakan sub sistem Pemerintah Republik Indonesia yang terendah, walaupun begitu desa mempunyai kedudukan yang cukup strategis , karena sebagian besar penduduk ada di pedesaan, sehingga pemerintah sangat memperhatikan terhadap perkembangan maupun pembangunan desa, seperti yang dikemukakan oleh Suhartono (2001: 9) :

Orang kebanyakan (umum) memahami desa sebagai tempat dimana bermukim penduduk dengan “peradaban” yang lebih terbelakang ketimbang kota. Biasanya dicirikan dengan bahasa ibu yang kental, tingkat pendidikan yang relatif rendah, mata pencaharian yang umumnya disektor pertanian. Bahkan terdapat rakyat, bahwa pemahaman umum memandang desa sebagai tempat bermukim para petani. Pengertian lain, dapat dijumpai dalam kamus besar bahasa Indonesia (1993:200) yang menyebutkan bahwa desa adalah (1) Sekelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan; kampung; dusun; (2) Udik atau dusun (dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan kota); (3) Tempat; tanah; daerah.

Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan pengertian pokok tentang desa antara lain adalah :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

2. Pemerintah Desa adalah terdiri atas kepala desa dan perangkat desa.
3. Pemerintahan Desa adalah merupakan sub sistem dari sistem pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah Desa dan badan Perwakilan Desa.

Dalam sistem pemerintahan desa, Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat serta mempunyai suara terbanyak. Sepanjang sejarah pemerintahan di Indonesia hanya Kepala Desa yang dipilih langsung oleh rakyat, sedangkan Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2004 baru dilaksanakan pada pemilu 2004, hal itu merupakan perkembangan baru dalam Pemerintahan Indonesia. Pemilihan Kepala Desa memiliki sejarah panjang sejak sebelum undang-undang nomor 5 tahun 1979. Dengan demikian soal pemilihan Kepala Desa sampai saat ini masih relevan untuk dibahas dan dikaji. Agar mendapat kejelasan yang mendalam kita perlu mengetahui sejarah perjalanan pemilihan Kepala Desa di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Periode Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

- a. Berdasarkan Konstitusi Kerajaan Belanda Tahun 1948 diterbitkanlah

Indische Staatregeling yang berlaku mulai tahun 1854, ketentuan mengenai desa diatur dalam pasal 128 :

- 1) Desa-desa bumiputra dibiarkan memilih kepada anggota pemerintahan desanya sendiri, dengan persetujuan penguasa yang ditunjuk untuk itu menurut ordonasi. Gubernur jendral menjaga hak tersebut terhadap segala pelanggaran.
- 2) Dengan ordonasi dapat ditentukan keadaan di mana kepala desa dan anggota pemerintah desa diangkat oleh penguasa yang ditunjuk untuk itu.

- 3) Kepala Desa bumiputra diberikan hak mengatur dan mengurus rumah tangganya dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur jendral., pemerintah wilayah dan residen atau pemerintah otonom yang ditunjuk dengan ordonasi.
 - 4) Jika yang ditentukan dalam ayat (1) dan (3) dari pasal ini tidak sesuai dengan lembaga masyarakat atau dengan hak-hak yang diperkenankan dimiliki, maka berlakunya ditangguhkan.
 - 5) Dengan ordonasi dapat diatur wewenang dari desa bumi putra untuk : (a) memungut pajak dibawah pengawasan tertentu ; (b) di dalam batas-batas tertentu menetapkan hukuman terhadap pelanggaran atas aturan yang di adakan oleh desa. (Suhartono, 2001:46).
- b. Desa diketahui sebagai badan hukum adat yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan stbl. 1855, untuk menentukan siapa yang berhak menjadi Kepala Desa, maka rakyat pedesaan memilih sendiri secara langsung kepala desanya. Kemudian di keluarkan undang-undang yang mengatur tentang kedesaan oleh pemerintah Hindia Belanda.
2. Berlakunya UU No. 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang tertentu batas-batas daerahnya, yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri, memiliki penguasanya, dan berhak mempunyai harta benda/kekayaan sendiri.
- a. Kepala Desa dipilih oleh penduduk yang sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin, serta berdomisili secara sah di desa praja yang bersangkutan.
 - b. Kepala Desa diangkat oleh kepala daerah tingkat II minimal dua orang dan maksimal tiga orang untuk masa jabatan maksimal 8 tahun.

- c. Penentuan pemilihan, pengangkatan serta pemberhentian Kepala Desa ditetapkan oleh Pemerintah Dati I dengan mempertimbangkan adat istiadat setempat.
 - d. Peraturan tersebut harus disahkan oleh Mendagri, tetapi UU No 19 Tahun 1965 praktis belum terealisasi karena berdasarkan Tap MPRS Nomor XXI/MPRS/1966 pasal 5, pemerintah dan DPR-GR akan meninjau kembali UU tersebut, sehingga pelaksanaannya ditunda.
 - e. Dengan diterbitkannya Permendagri No. 6 Tahun 1981, tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Maka penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa lebih teratur, karena sebelum diadakan pilkades, LMD mengadakan rapat yang dipimpin oleh pejabat Kepala Desa (sebagai ketua LMD) untuk :
 - 1) Menyusun panitia pencalonan dan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa untuk disahkan Bupati melalui Camat.
 - 2) Membahas mengenai biaya pilkades.
 - f. Penyelenggaraan pilkades berdasarkan UU No 5 Tahun 1979 bagian ketiga, pasal 4 menyebutkan bahwa yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk desa warga negara Indonesia. Sekurang-kurangnya telah berusia 25 tahun dan tinggi-tingginya 60 tahun, dan sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Lanjutan Pertama atau yang berpendidikan / berpengalaman yang sederajat dengan itu.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1981 sebagai peraturan pelaksanaan tentang Penyelenggaraan Pemilihan, Pengesahan,

Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa. Permendagri No 6 Tahun 1981, memberikan peranan yang kuat terhadap Lembaga Musyawarah Desa (LMD) untuk menentukan keberhasilan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa maupun kedudukannya sebagai panitia pencalonan dan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. Disamping itu apabila terjadi kekosongan Kepala Desa, maka perangkat desa dengan pertimbangan senioritas dan masa kerja dapat diangkat menjadi pejabat Kepala Desa, dan dapat mengangkat pejabat dari tingkat kecamatan apabila desa tidak terdapat anggota perangkat yang memenuhi syarat tersebut. Dalam hal calon Kepala Desa tidak memiliki ijazah SLTP atau yang sederajat sebagai di maksud dalam Permendagri No 6 Tahun 1981 pasal 7 ayat satu (1) huruf j, maka yang bersangkutan baru dapat diterima sebagai calon Kepala Desa yang berhak mengikuti pemilihan apabila tingkat pengetahuan/ pengalamannya dinilai dapat disederajatkan dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama yang pembuktiannya di dasarkan pada pengalaman kerja dan ujian saringan pada tingkat kabupaten/kotamadya daerah tingkat II (panitia peneliti dan penguji). Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ dari jumlah seluruh pemilih yang sah. Dalam hal pemilih yang hadir kurang dari $\frac{2}{3}$ maka pemilihan dinyatakan batal, dan harus diulang dalam waktu tiga hari. Dalam pengulangan ternyata hadir menggunakan hak pilihnya kurang dari $\frac{1}{2}$ dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan, maka berlaku ketentuan penunjukan pejabat Kepala Desa. Calon Kepala Desa dapat

dinyatakan terpilih apabila memperoleh dukungan suara terbanyak, sekurang-kurangnya $\frac{1}{3}$ dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.

4. Periode berdasarkan UU No 22 Tahun 1999

Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah dalam bukunya Pokok-Pokok Penyelenggaraan Pemerintah Desa (2001:2) menyebutkan bahwa pemilihan kepala desa dipilih secara langsung oleh penduduk desa, dari calon yang memenuhi syarat (pasal 95 ayat 2 UU No 22 Tahun 1999), yang harus berubah adalah proses rekrutmennya. Proses pemilihan Kepala Desa berdasarkan UU No 5 Tahun 1979 membuktikan adanya intervensi pemerintah yang sangat kuat, karena keberhasilan seorang menjadi Kepala Desa lebih banyak ditentukan oleh wewenang diluar desa (pemerintah), berdasarkan penjangkaran yang dilakukan oleh pejabat kabupaten yang dapat menentukan lulus tidaknya pada ujian awal, hal ini membuat calon Kepala Desa berusaha dengan berbagai cara untuk mendapatkan restu. UU No 22 Tahun 1999 pasal 95 ayat (3) menyatakan calon Kepala Desa yang dipilih berdasarkan suara terbanyak ditetapkan oleh Badan Perwakilan Desa dan disahkan/dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, sedangkan UU No. 5 Tahun 1979 Kepala Desa diangkat oleh Bupati atas nama Gubernur.

Pelaksanaan pilkades pada masa reformasi lebih mendorong pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan keanekaragaman kondisi desa setempat, sehingga pemerintah desa bersama dengan para tokoh masyarakat dapat mengatur secara leluasa pelaksanaan pilkades, karena pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten dan Pemerintah Kecamatan tidak lagi mengintervensi pelaksanaan pilkades.

Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang (dalam buku pedoman pemerintahan desa 2003) menyebutkan peraturan pemerintah pendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pedoman bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipilih menjadi Kepala Desa atau dipilih/diangkat menjadi perangkat desa.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa jo. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa jo. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2003 tentang perubahan kedua Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2000.
5. Keputusan Bupati Rembang No. 546 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa.

Pelaksanaan Pilkades sampai saat ini masih banyak menyimpan permasalahan, masalah-masalah yang sering muncul misalnya ketidak beresan penyelenggaraan pilkades yang dilakukan oleh panitia desa. Intervensi kepentingan *elite* desa/parpol ditingkat bawah, juga terkait dengan politik uang, kasus perjudian (botohan), Kepala Desa yang tidak mampu dan kurang aspiratif, persaingan yang tidak sehat.

Sebenarnya Seseorang ingin mencalonkan diri menjadi Kepala Desa tentunya karena ada dorongan keinginan tertentu. Pertama, dorongan karena adanya peluang untuk memenangkan pilkades. Kedua, karena dorongan keinginan untuk melanjutkan kepemimpinan kelompok trah. Ketiga, karena merasa mendapatkan dukungan atau restu dari tokoh masyarakat di desa, termasuk dorongan dari pihak-pihak lain seperti guru sepiritual atau dukun (Nico L Kana, 2001:146), hal-hal tersebut diatas biasanya dapat berpengaruh pada penyelenggaraan pilkades.

Masalah lain yang dialami hampir setiap desa dalam pelaksanaan pilkades adalah bahwa dalam perekrutan calon kepala desa kurang mempertimbangkan kemampuan yang ada pada diri calon Kepala Desa tersebut, misalnya visi, misi dan program kerja yang disampaikan pada saat kampanye kurang sesuai dengan potensi desa, sehingga tidak seluruhnya dapat dilaksanakan pada saat menjabat, atau mencalonkan diri sebagai Kepala Desa karena semata-mata menganggur dan tidak punya peluang untuk kerja lain. Permasalahan diatas akan semakin menghimpit dan menambah beban desa, karena sesungguhnya desa sedang mencari pemimpin yang dapat mengangkat keadaan desa menjadi lebih baik. Hal itu terjadi karena sulitnya mendapatkan calon-calon pemimpin yang mampu mengelola desa dalam kedudukannya sebagai administrator pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli desa, dan menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang lebih tertib dan teratur.

Maka bila dicermati permasalahan disekitar pemilihan Kepala Desa dapat ditelusuri secara runtut dalam proses pelaksanaan pilkades itu sendiri, karena sesungguhnya permasalahan dapat muncul sejak terbentuknya panitia pilkades yang merupakan kewenangan Badan Perwakilan Desa, hingga saat penjangkaran dan penetapan bakal calon Kepala Desa yang dilaksanakan oleh panitia pilkades.

Di sini sudah muncul berbagai masalah yang berujung pada pertimbangan-pertimbangan subyektif, belum lagi bermunculan masalah-masalah yang dapat menimbulkan konflik kepentingan antar kelompok. Munculnya permasalahan juga terjadi saat mencari figur Kepala Desa yang berkualitas. Biasanya ada figur yang mampu namun tidak mau menjadi bakal calon Kepala Desa.

Permasalahan lain muncul karena sulit mendapatkan bakal calon, hal ini karena panitia pilkades terlalu besar mematok biaya pendaftaran, sehingga tidak terjangkau oleh kemampuan masyarakat. Hal ini terjadi karena UU No 22 Tahun 1999 tidak mengatur biaya pendaftaran. Panitia sering menentukan biaya pendaftaran terlalu tinggi dengan dalih sebagian biaya pelaksanaan pilkades dipergunakan untuk dana pembangunan desa. Agar pilkades dapat berjalan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka panitia pilkades diharapkan mempunyai intensitas yang tinggi, jujur, berpandangan luas kedepan demi kemajuan desa, bertindak tegas dalam melaksanakan tugasnya, serta tidak memihak kepada salah seorang calon Kepala Desa. Dengan berpedoman pada ketentuan peraturan yang berlaku, panitia pengawas kabupaten melakukan berbagai upaya guna mencegah

terjadinya penyimpangan, intimidasi, suap menyuap, jual beli suara dan perjudian dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Akan semakin buruk situasi seputar pilkades apabila dikaitkan dengan kedewasaan dan kesadaran serta tingkat pengetahuan masyarakat yang sangat terbatas. Gejala masyarakat yang sering muncul misalnya figur Kepala Desa yang kurang mempunyai kemampuan mengelola desa namun mendapatkan dukungan dari *elite* desa, sehingga setelah menjadi Kepala Desa sering mengecewakan masyarakat, tidak mampu memberikan pelayanan yang baik, tidak aspiratif dan tidak kreatif, tidak mempunyai prakarsa agar desa yang dipimpin berkembang lebih maju.

Seorang Kepala Desa dapat dikatakan berhasil memimpin desanya menuju kearah kemajuan apabila setiap kebijakan yang diambil untuk memajukan desanya mendapat dukungan masyarakat banyak, karena kemampuan seorang Kepala Desa dalam memimpin desa tidak hanya diukur dari pendidikan tinggi yang ditempuhnya, namun lebih pada kewibawaan serta keteladanan yang dimiliki oleh Kepala Desa itu sendiri. Karena sesungguhnya tidak ada gunanya figur Kepala Desa yang berpendidikan tinggi namun tidak bekerja untuk desanya dengan baik, atau bahkan sibuk dengan kepentingan pribadinya. Dengan demikian berkaitan dengan pemilihan Kepala Desa, apabila ada kesulitan mendapatkan bakal calon Kepala Desa yang berpendidikan tinggi tidak perlu terlalu dipaksakan. Figur bakal calon Kepala Desa yang memenuhi standar pendidikan minimal yang dipersyaratkan, memiliki jiwa kepemimpinan, dan pengabdian yang dapat diteladani

masyarakatnya dengan sendirinya mampu membangun desa lebih maju . Untuk mengatasi keadaan demikian, maka perangkat desa yang sesungguhnya harus diperhatikan kualitas pendidikannya karena para perangkat desalah yang menjadi tenaga pelaksana dalam bidang administrasi pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa seringkali terjadi hal-hal yang tidak memuaskan, terutama pada tahap pembentukan panitia. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2000 pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa Badan Perwakilan Desa bersama-sama Pemerintah Desa membentuk panitia pemilihan Kepala Desa. Pembentukan panitia ini sudah diwarnai sikap kurang demokratis, oleh sebab itu kerja panitia dapat diragukan dan sudah pasti akan memihak pada kelompok tertentu.

Tahap penjaringan bakal calon Kepala Desa yang dilakukan oleh panitia sering diwarnai dengan adat istiadat yang berkembang, misalnya seorang warga desa dengan latar belakang pendidikan tinggi tetapi mereka tidak termasuk keturunan Kepala Desa (trah), maka warga desa tersebut akan mengurungkan niatnya untuk mencalonkan diri. Ketidak beresan tahapan ini nampak terjadi apabila kelompok tertentu bekerja sama dengan pihak panitia untuk mengkondisikan calon tunggal. Fenomena tersebut dapat dilihat dari jumlah calon pada tabel berikut :

Tabel - 1

Data Jumlah Calon Kepala Desa Kecamatan Sarang

No	DESA	UU No.5 Th 1979 (Perda Prov. Jateng No.7 Th. 83)	UU No.22 Th 1999 (Perda Kab. Rembang No 7 Th 2000)	Pelaksanaan Pilkades
1	Lodankulon	2	-	06-05-1998
2	Lodawetan	3	-	12-09-1998
3	Jambangan	3	-	22-09-1998
4	Nglojo	4	-	15-09-1998
5	Pelang	3	-	15-09-1998
6	Gunungmulyo	2	-	12-12-1998
7	Bonjor	2	-	16-05-1998
8	Gonggang	2	-	26-09-1998
9	Dadapmulyo	3	-	12-12-1998
10	Tawangrejo	5	3	15-09-2001
11	Sampung	2	2	04-07-2002
12	Baturno	3	-	12-09-1998
13	Babaktulung	5	-	27-12-1998
14	Temperak	3	1	20-09-2001
15	Karangmangu	3	-	07-01-1998
16	Bajingmeduro	2	-	19-09-1998
17	Bajingjowo	2	-	19-12-1998
18	Sarangmeduro	2	-	05-02-1998
19	Sendangmulyo	3	-	12-12-1998
20	Kalipang	3	-	19-09-1998
21	Sumbermulyo	2	-	17-01-1998
22	Gilis	4	1	31-07-2003
23	Banowan	3	2	04-06-2003
Jumlah		89	9	

Sumber data : Kantor Kecamatan Sarang. 2003.

Dari 5 (lima) desa yang melaksanakan Pilkades berdasarkan Perda Kabupaten Nomor 7 Tahun 2000, terdapat 2 (dua) desa dengan calon tunggal dan 3 (tiga) desa lainnya lebih dari satu calon. Dalam hal mengkondisikan calon tunggal dapat terjadi dengan beberapa cara, misalnya melalui tokoh masyarakat yang disegani melarang seseorang untuk ikut mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, atau dengan menentukan tarif tinggi biaya pendaftaran dan lain sebagainya.

Permasalahan pada tahap kampanye misalnya apabila calon Kepala Desa dalam berkampanye menyimpang dari ketentuan, misalnya dalam menarik simpati pemilih dilakukan dengan cara menghina atau menjelek-jelekkan calon lain, isu suap-menyuap, yang berakibat terjadi perselisihan antar pendukung. Situasi ini apabila tidak diatasi dapat mengganggu pelaksanaan pilkades atau menyebabkan kualitas Pilkades rendah.

Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa juga dipengaruhi oleh tahap pemungutan dan perhitungan suara, namun demikian panitia kadang bertindak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya memberikan undangan ataupun surat suara lebih dari satu pada seorang pemilih, terlebih lagi panitia dalam memberikan surat undangan kepada pemilih kurang dari dua puluh empat jam, hal itu melanggar aturan. Panitia juga sering kurang cermat dalam membedakan suara sah dan tidak sah sehingga kadang terjadi protes dari saksi maupun warga masyarakat desa. Kecurangan dalam pemungutan dan perhitungan suara bila diketahui masyarakat dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan pilkades.

Tempat Pemungutan Suara sebagai sarana penyampaian aspirasi kurang layak atau kurang memberi rasa aman kepada para pemilih, sehingga terjadi peristiwa unik dalam pelaksanaan pemungutan suara misalnya seorang pemilih yang sedang menggunakan hak pilihnya menunjukkan perilaku yang aneh dengan melepas sandal/alas kaki di dalam bilik suara. Hal itu ternyata dilakukan karena diantara mereka telah terjadi kesepakatan bahwa orang tersebut memilih calon tertentu, sehingga botoh maupun calon yang telah membuat kesepakatan itu dapat mengetahui kemungkinan perolehan suaranya.

Sebelum penyampaian pengumuman dan penetapan calon terpilih dilakukan oleh panitia ada kecenderungan masuknya pihak-pihak elite desa untuk berusaha mempengaruhi panitia, sehingga terkesan kurang demokratis.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji serta meneliti secara ilmiah mengenai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di era otonomi desa. Dengan harapan hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran terhadap pengambilan kebijakan demi perbaikan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Rembang.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah.

Dari permasalahan-permasalahan yang dapat mempengaruhi serta menyebabkan pelaksanaan pilkades tidak sesuai dengan peraturan

perundangan yang berlaku, maka masalahnya dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Pembentukan panitia kurang demokratis, karena dapat dipengaruhi kelompok tertentu
2. Panitia kurang bekerja dengan baik , dan cenderung memihak salah satu calon, ataupun mengkondisikan situasi tertentu
3. Pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa sering melanggar ketentuan yang berlaku, hal itu disebabkan karena kurangnya kesadaran calon Kepala Desa tentang bagaimana cara berdemokrasi yang baik
4. Sering terjadinya kecurangan pada tahap pemungutan dan perhitungan suara, hal itu terjadi karena kurang berfungsinya pengawasan dengan baik, serta tidak adanya pengawasan independen
5. Pemberitahuan (undangan) pemungutan suara pada pelaksanaan pilkades sering terlambat diterima warga desa (kurang dari 24 jam). Tempat Pemungutan Suara kurang layak sebagai tempat penyampaian aspirasi untuk memilih Kepala Desa, serta terjadinya tekanan-tekanan moral dari kelompok tertentu terhadap pemilih.
6. Pengumuman dan penetapan calon terpilih sering cenderung kurang demokratis.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut :

Apakah ketidak berhasilan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa disebabkan karena penjarangan bakal calon Kepala Desa, kampanye calon

Kepala Desa, pemungutan dan perhitungan suara, pengumuman dan penetapan calon terpilih , pengesahan dan pelantikan Kepala Desa ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hubungan penjangkaran bakal calon Kepala Desa dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang.
2. Untuk mengetahui hubungan kampanye calon Kepala Desa dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang
3. Untuk mengetahui hubungan pemungutan dan perhitungan suara dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang
4. Untuk mengetahui hubungan pengumuman dan penetapan calon terpilih dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang
5. Untuk mengetahui hubungan pengesahan dan pelantikan Kepala Desa dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan harapan agar dapat berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada para pejabat pembuat kebijakan

agar dapat dijadikan bahan pertimbangan sebagai upaya menyempurnakan tata cara/ prosedur pemilihan Kepala Desa.

Demikian pula penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan guna penyempurnaan peraturan-paraturan pendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, baik di Kabupaten maupun di desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Kebijakan Publik

Abdul Wahab (2002:2) mengemukakan bahwa kebijaksanaan itu diartikan sebagai pedoman untuk bertindak, pedoman ini boleh jadi sangat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. Kebijakan dalam maknanya seperti ini mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana.

Kebijaksanaan menurut J.E. Anderson (dalam Irfan Islamy 2002:17) adalah "A purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern" ("serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu") berkaitan dengan rumusan tersebut, Anderson mengatakan *public policies are those policies developed by government bodies and officials* (kebijaksanaan negara adalah kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah). Implikasi dari pengertian kebijaksanaan tersebut adalah bahwa kebijaksanaan negara :

- a. Selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan;
- b. Berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat pemerintah;
- c. Merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang pemerintah maksud akan melakukan sesuatu;
- d. Bisa bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu, atau akan bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu;
- e. Kebijaksanaan pemerintah (setidak-tidaknya dalam arti yang positif) didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan-peraturan perundangan dalam bersifat memaksa (otoritatif).

Menurut Carl J.Friedrick (dalam Irfan Islamy 2002:17) mendefinisikan kebijaksanaan sebagai berikut "..... *a proposed course of action of a person, group, or government within a given environment providing obstacles and opportunities which the policy was proposed to utilize and overcome in an effort to reach goal realize an objective or a purpose*" (...serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu").

Pengertian lain tentang kebijaksanaan yang dikemukakan oleh Thomas R.Dye (dalam Irfan Islamy 2002:18) yang menjelaskan bahwa kebijaksanaan negara sebagai "*is whatever governments choose to do or not to do* " (apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan) selanjutnya Dye mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (obyektifnya) dan kebijaksanaan negara itu harus meliputi semua tindakan pemerintah jadi bukan semata-mata pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Disamping itu sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk kebijaksanaan negara. Hal itu disebabkan karena sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh (dampak) yang sama besarnya dengan sesuatu yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Asmara Raksasataya (dalam Irfan Islamy, 2002 :17) mengatakan bahwa kebijaksanaan sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan, oleh karena itu kebijaksanaan memuat 3 (tiga) elemen, yaitu :

1. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai;
2. Taktik dan strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan;
3. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Menurut Chief J.O.Udoji (dalam Abdul Wahab,2002:5) mendefinisikan kebijaksanaan negara sebagai *"an sanctioned course of action addressed to a particular problem or group of related problems that affect society at large"* (suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat).

Kemudian oleh George C.Edwards III dan Ira Sharkansky (dalam Islmay 2002:18) mengartikan kebijaksanaan negara sebagai *"..... is what government say and do, or do not do. It is the goals or purposes of geveernment programs"* (adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah.Kebijaksanaan itu berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah. Kebijaksanaan negara itu dapat ditetapkan secara jelas dalam peraturan-peraturan perundangan atau dalam bentuk pidato-pidato pejabat teras pemerintah ataupun program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah.

David Easton (dalam Islamy 2002:19) memberi arti kebijaksanaan negara sebagai *"..... the aoturitative allocation of values for the whole society"* (pengalokasian nilai-nilai secara paksa /syah kepada seluruh anggota masyarakat) sehingga berdasarkan definisi ini hanya pemerintah secara syah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu

tersebut dirupakan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai pada masyarakat. Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk kedalam "*authorities in a political system*" yaitu para penguasa dalam sistem politik yang terlibat dalam masalah-masalah sehari-hari yang telah menjadi tanggung jawab atau peranannya.

2. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi dalam kamus Webster (Abdul Wahab 2002:64) dirumuskan secara pendek bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means to carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat sesuatu). Kalau pandangan ini kita ikuti, maka implementasi kebijaksanaan dapat dipandang sebagai sesuatu proses melaksanakan keputusan kebijaksanaan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, perintah eksekutif atau dekrit presiden).

Pressman dan Wildavsky (Abdul Wahab 2002:65) bahwa sebuah kata kerja mengimplementasikan itu sudah sepantasnya terkait langsung dengan kata benda kebijaksanaan sehingga untuk melaksanakan kebijaksanaan perlu mendapatkan perhatian yang seksama, dan oleh sebab itu adalah keliru kalau kita menganggap bahwa proses tersebut dengan sendirinya akan berlangsung mulus.

Kebijakan publik selalu mengandung setidaknya-tidaknya tiga komponen dasar, yaitu tujuan yang luas, sasaran yang spesifik dan cara mencapai sasaran tersebut. Komponen terakhir biasanya tidak dijelaskan secara rinci, dan oleh karena itulah birokrasi harus menterjemahkan sebagai program-program aksi dan proyek. Di dalam cara tersebut mengandung beberapa komponen kebijakan, yakni siapa pelaksana atau implementasinya, berapa besar dan dari mana dana diperoleh, siapa kelompok sasarannya, bagaimana program dilaksanakan atau bagaimana sistem manajemennya, dan bagaimana keberhasilan atau kinerja kebijakan diukur. Dengan demikian komponen ketiga dari suatu kebijakan yaitu cara, merupakan komponen untuk mewujudkan dua komponen di depan yakni tujuan dan sasaran. Cara ini biasanya disebut sebagai implementasi (Samodra et.al 1994)

Lebih lanjut Mazmanian dan Paul A.Sebatier (Abdul Wahab 2002:65) menjelaskan makna implementasi bahwa :

Memahami apa yang nyatanya terjadi sesudah sesuatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Dari beberapa pendapat tentang implementasi dari para teoritis tersebut diatas, dapatlah disimpulkan bahwa proses implementasi kebijaksanaan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program

dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut kekuatan-kekuatan *elite* politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

Implementasi kebijaksanaan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi melainkan lebih dari itu ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari sesuatu kebijaksanaan.

Udoji (dalam Abdul Wahab 1997: 59) mengatakan bahwa "*The execution of policies is a important that policy making. Policies will remain dreams or blue prints file jackets unless they are implemented*" (pelaksanaan kebijaksanaan adalah sesuatu yang penting dari pada pembuat kebijaksanaan. Kebijaksanaan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak di implementasikan).

Implementasi merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang dipilih dan ditetapkan sebelum menjadi kenyataan. Namun dalam pelaksanaannya tidak semua program dapat dilaksanakan seperti yang diharapkan. Terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya sesuai dengan kondisi lapangan , sehingga program yang

telah ditetapkan tidak dapat berjalan secara optimal, karena ada penyebab kegagalan dalam proses implementasi suatu kebijaksanaan publik.

Kebijaksanaan apapun sebenarnya mengandung resiko untuk gagal. Hogwood dan Gunn (dalam Abdul Wahab 2002 : 61) telah membagi pengertian kegagalan kebijaksanaan ini dalam dua kategori yaitu tidak terimplementasikan (*non implementasi*) dan implementasi yang tidak berhasil (*unsuccesful implementation*). Tidak terimplementasi berarti bahwa sesuatu kebijaksanaan yang tidak dilaksanakan sesuai rencana, implementasi yang tidak berhasil biasanya terjadi mana kala suatu kebijaksanaan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan, kebijaksanaan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan hasil akhir yang dikehendaki. Biasanya hal ini disebabkan oleh faktor-faktor :

- ⇒ Pelaksananya jelek (*bad execution*)
- ⇒ Kebijaksanaannya sendiri memang jelek (*bad policy*)
- ⇒ Kebijaksanaan itu memang berhasil jelek (*bad luck*)

Dengan demikian suatu kebijaksanaan boleh jadi tidak dapat diimplementasikan secara efektif sehingga di nilai oleh para pembuat kebijaksanaan sebagai pelaksanaan yang jelek (*bad execution*). Atau baik pembuat kebijaksanaan maupun mereka yang diberi tugas untuk melaksanakannya sama-sama sepakat bahwa kondisi eksternal benar-benar tidak menguntungkan bagi efektivitas implementasi. Jadi kebijaksanaan itu telah gagal karena nasibnya memang jelek (*bad luck*). Faktor lain yang menjadi penyebab kegagalan suatu kebijaksanaan adalah bahwa

sebenarnya sejak awal kebijaksanaan itu memang jelek, dalam arti bahwa ia telah dirumuskan secara serampangan. Tidak didukung oleh informasi yang memadai, alasan yang keliru atau asumsi-asumsi dan harapan-harapan yang tidak realistis. Menurut Suradinata (1994 : 54) sekurang-kurangnya terdapat tiga sumber penyebab timbulnya masalah-masalah yang biasanya dihadapi dalam implementasi kebijaksanaan, yaitu :

- ⇒ Adanya over-laping tujuan-tujuan kebijaksanaan yang dihasilkan atau disebabkan oleh adanya kesalah fahaman, kekacauan atau disebabkan oleh konflik nilai
- ⇒ Partisipasi aktor yang banyak dengan otoritas yang tumpang tindih
- ⇒ Ketahanan implementer, ketidak efektifan atau ketidak efisienan.

Berbicara masalah implementasi kebijakan adalah merupakan tahap yang krusial dan merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat difahami sebagai proses, keluaran (*output*) maupun sebagai hasil. Kemudian Van Meter dan Van Horn (dalam Budi W,2002:102) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Dengan demikian tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu. Perda nomor : 7 Tahun 2000 adalah merupakan bentuk kebijakan publik yang implementasinya dipengaruhi oleh kondisi masyarakat setempat.

3. Desa dan Pemerintah Desa

Penyebutan desa memang terasa akrab ditelinga suku Jawa. Menurut Soetardjo Kartohadikoesoemo (dalam Suhartono 2000 : 8) menyebutkan bahwa perkataan desa, dusun, desi, seperti juga perkataan negari, nagaro, negory (negarom) asalnya dari kata sanskrit (sansekerta), yang artinya adalah tanah air, tanah asal, tanah kelahiran. Sebagaimana yang ditulis oleh Geertz (2000) desa merupakan sebutan lawan dari negara (negari), desa memiliki arti daerah pedalaman “daerah yang diperintah”. Sebutan desa dapat berupa konsep tanpa makna politik, namun juga berarti suatu posisi politik dan sekaligus kualitas posisi dihadapan pihak atau kekuatan lain. Burger (dalam Suhartono 2000) mengatakan bahwa desa mempunyai ikatan horisontal dan vertikal.

Sedangkan desa menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 adalah :

Suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Replubik Indonesia.

Dengan dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 sesuai dengan nuansa otonomi daerah, maka desa diberi pengertian baru sebagai berikut:

“Desa adalah Kesatuan wilayah masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat setempat yang

diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten “.

Apa yang dikembangkan dalam kebijakan pemerintahan desa, yang kendati memuat konsep hak untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, namun bersamaan dengan itu pula dinyatakan bahwa desa merupakan organisasi pemerintahan terendah. Dengan sendirinya desa merupakan representasi (kepanjangan) Pemerintah Pusat. Artinya bahwa apa yang dianggap baik oleh Pemerintah Pusat (organisasi kekuasaan diatasnya) dipandang baik pula oleh desa. Asumsi ini bukan saja manipulatif, namun juga mempunyai tendensi yang sangat kuat untuk mengalahkan atau merendahkan keperluan, kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa.

Suhartono (2000:13) menyebutkan bahwa kebijakan pemerintah desa adalah :

“...Bahwa sesuai dengan sifat Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kedudukan pemerintah desa sejauh mungkin diseragamkan, dengan mengindahkan keragaman keadaan desa dan ketentuan adat istiadat yang masih berlaku untuk memperkuat pemerintahan desa agar mampu menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya dalam pembangunan dan menyelenggarakan administrasi desa yang makin luas dan efektif”

Dari konsep yang dikembangkan sangat jelas bahwa keragaman desa (diberbagai wilayah Indonesia, termasuk keragaman suku bangsa), tidak dilihat dari keniscayaan dan kebutuhan obyektif, justru sebaliknya, “....pemerintahan desa yang sekarang ini bentuk dan coraknya beraneka ragam, yang kadang-kadang merupakan hambatan untuk membina dan

mengendalikan secara intensif'. Maka dengan mudah dipahami mengapa berbagai instrumen demokrasi ditingkat desa tidak bisa berkembang. Karena sesungguhnya desa lebih dijadikan alat kekuasaan, sehingga segala instrumen yang dikembangkan lebih merupakan formalisme dan bukan sebagai wujud nyata dari itikad untuk membangun demokrasi di tingkat bawah (Suhartono, 2000 : 33).

Sebaliknya desa dengan mudah ditundukkan oleh kepentingan nasional dengan dalih demi kepentingan umum. Hal ini sering terjadi kasus, misalnya pengambilan tanah milik desa sangat mudah.

Meskipun demikian, dapat dikatakan bahwa pengertian desa sebagaimana termuat dalam undang-undang secara jelas menempatkan desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan, yang secara politis memiliki wewenang tertentu untuk mengatur warga atau anggota komunitasnya. Baik sebagai akibat posisi politisnya yang merupakan bagian dari negara (UU No 5 Tahun 1974) atau hak asal usul dan adat yang dimilikinya (UU No 22 Tahun 1999). Namun demikian dalam pengertian ini masih belum menggambarkan secara jelas mengenai kualitas otoritas yang dimiliki desa, terutama keterkaitan dengan kekuatan politik di atasnya, yakni negara.

Munculnya otoritas politik di dalam suatu komunitas yang disebut dengan desa, secara internal mudah dipahami, dengan melihat sejarah perkembangannya secara faktual jumlah penduduk bertambah dan masalah-masalah yang berkait dengan kepentingan masyarakat juga

bertambah, sehingga kebutuhan untuk mengatur semakin dibutuhkan. Kenyataan itu sudah barang tentu mendorong munculnya suatu otoritas yang diharapkan dapat mengatasi beberapa persoalan dan merealisasikan aspirasi yang berkembang, dan setelah lahir kesatuan masyarakat hukum yang mandiri pemimpin mereka biasanya yang tertua atau mempunyai kemampuan paling tinggi, Maschab (dalam Suhartono 2000 :14)

Jika pembuatan desa sebagai sebuah lokasi suatu komunitas suatu kebudayaan, atau desa sebagai lokalitas, maka sudah barang tentu setiap lokasi dengan komunitas dan kebudayaannya, akan memiliki lokalitas yang khas, setiap tempat berbeda satu sama lainnya. Penamaan desa sesungguhnya sudah merupakan masalah, sebab masing-masing lokasi memiliki klaim terhadap nama tersendiri, berdasarkan sejarah mereka sendiri. Namun secara nasional yang layak digunakan adalah desa.

Menurut Dadang et.al (2003:3) mengartikan desa sebagai komunitas yang tinggal sebuah lokasi (posisi geografi daerah) tertentu desa dapat dikatakan sebagai komunitas dalam kesatuan geografis tertentu yang antar mereka saling mengenal dengan baik dengan corak kehidupan yang relatif homogen dan banyak bergantung secara langsung pada alam, oleh karena itu desa di asosiasikan sebagai masyarakat yang hidup secara sederhana pada sektor agraris, mempunyai ikatan sosial, adat dan tradisi yang kuat, bersahaja, serta tingkat pendidikan yang dapat dikatakan rendah . Dari pengertian ini kita bisa memilah tiga unsur penting dalam makna desa:(1) Orang-orang, sekelompok orang, (2) Wilayah/daerah tempat

berdiam dan (3) Ikatan (dalam banyak bentuk yang pada intinya adalah kelembagaan, institusi)

Kita sudah banyak mengupas tentang desa namun bagaimana agar lebih jelas jika membedakan dengan komunitas yang ada di kota, lalu apa yang membedakan lebih dari sekedar kondisi fisik di infrastruktur daerah tersebut, pengertian desa yang disebut di depan, pada dasarnya hendak menunjuk pada kesatuan dari tiga unsur utama, sebagai contoh bisa saja ada orang-orang dalam sebuah wilayah tetapi ikatan diantara mereka tidaklah jelas, terlebih secara fisik sering ditunjukkan oleh kenyataan dimana antar warga kota tidak saling mengenal, seperti bila kita menunjukkan alamat didesa tidak serumit dikota, jika kita mencari orang desa maka kita cukup menyebutkan nama orang tersebut secara jelas, Dengan demikian pada komunitas desa terdapat sebuah ikatan erat yang diartikan mempengaruhi interaksi antara warga desa.

Lebih lanjut Dadang et.al (2003:5) menyebutkan beberapa ciri-ciri desa sebagai berikut :

- ⇒ Adanya suatu wilayah yang jelas dengan demikian wilayah ini telah didefinisikan dengan jelas batas-batas teritorialnya
- ⇒ Adanya sekelompok orang (bukan pribadi atau sebuah keluarga) yang bertempat tinggal di daerah, dan merupakan wilayah tempat tinggal tersebut sebagai wilayah mereka.

- ⇒ Adanya ikatan dengan dasar yang beragam dan luas, seperti kebutuhan rasa aman bersama, yang dibangun bersama dari pengalaman hidup bersama.
- ⇒ Mempunyai kekuasaan yang mengatur urusannya mereka sendiri menetapkan pemerintahan sendiri.
- ⇒ Mempunyai harta benda, kekayaan desa

Menurut Indra Ismawan (2002:39) mengatakan bahwa kewenangan desa mencakup:

- a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa.
- b. Kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah, dan
- c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan /Pemerintah Kabupaten kepada Desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumberdaya manusia Pemerintah Desa berhak menolak pelaksanaan tugas pembantuan yang tidak disertai pembiayaan, sarana & prasarana, serta SDM.

Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 telah memberikan kewenangan dan kesempatan bagi desa dalam memberdayakan masyarakat desa dan Pemerintah Desa, desa dapat mewujudkan masyarakat yang mandiri (otonomi daerah) sebagai otonomi asli, Desa yang otonom akan akan memberi ruang gerak yang luas pada perencanaan pembangunan yang merupakan kebutuhan nyata msyarakat dan tidak banyak terbebani oleh program kerja dari berbagai instansi dan Pemerintah.

Menurut Wijaya (2003:164) Untuk memperkuat pelaksanaan otonomi desa diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten agar secara Intensif dan terpadu mengupayakan kebijakan sebagai berikut :

- Pertama : Memberi akses dan kesempatan kepada desa/ menggali potensi sumber daya alam yang ada dalam wilayahnya/dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan desa tanpa mengabaikan fungsi kelestarian konservasi dan pembangunan yang berkelanjutan.
- Kedua : Memprogramkan pemberian bantuan kepada desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Memfasilitasi peningkatan kapasitas permohonan, lembaga lembaga kemasyarakatan serta komponen-komponen masyarakat lainnya.

Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian pemerintah. Sebaliknya pemerintah mempunyai kewajiban menghormati otonomi yang asli yang dimiliki desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, maka desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut dimuka pengadilan.

Lebih lanjut Widjaja (2003 :168) mengatakan bahwa :

Otonomi Desa merupakan otonomi yang berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang dihasilkan berbagai interaksi antar individu dalam masyarakat atau merupakan hasil cipta , rasa dan karsa masyarakat dalam kenyataannya pasti akan timbul keanekaragaman diri pranata desa, tata kehidupan masyarakat, potensi desa, susunan pemerintahan yang sangat dipengaruhi oleh keanekaragaman asal usul dan adat istiadat masyarakat.

Dengan demikian dalam waktu yang bersamaan perlu pula dikembangkan program untuk lebih meningkatkan keterlibatan secara

langsung seluruh sumber daya manusia potensial yang ada di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan seperti para pelaku ekonomi, tenaga-tenaga potensial, lembaga kemasyarakatan desa seperti PKK, LPMD, karang taruna, tokoh masyarakat, pemangku adat dan tokoh agama.

4. Pemerintahan Desa, Kepemimpinan Desa, Pemilihan Kades

Sejalan dengan perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia berakibat terjadinya perubahan peraturan perundangan-undangan khususnya yang mengatur Pemerintahan Daerah. Dalam UU No. 22 Tahun 1999 pasal 95 ayat (1) menyebutkan bahwa pemerintah desa terdiri atas Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan perangkat desa. Pada ayat (2) menyebutkan Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk dari calon yang memenuhi syarat, selanjutnya ayat (3) calon Kepala Desa yang terpilih dengan mendapatkan dukungan suara terbanyak ditetapkan oleh Badan Perwakilan Desa dan disahkan oleh Bupati. Menurut Widjaja (2003: 29) mengatakan bahwa pengesahan Bupati hanya bersifat administratif saja, sedangkan penetapan calon terpilih ditentukan rakyat desa sendiri melalui BPD.

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 menyebutkan bahwa Perangkat desa terdiri dari unsur staf yaitu unsur pelayanan seperti sekretariat desa dan atau tata usaha, unsur pelaksana, unsur pelaksana teknis lapangan

seperti pamong tani, urusan keamanan dan unsur pmbantu Kepala Desa di wilayah bagian desa seperti Kepala Dusun.

Badan Perwakilan Desa sebagai lembaga legeslatif desa yang berfungsi pengayomi adat istiadat, bersama-sama Pemerintah Desa membuat dan menetapkan Peraturan Desa (Perdes), menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Perdes, APBD serta keputusan Kepala Desa. Pelaksanaan fungsi BPD ditetapkan dalam tata tertib BPD.

Pertanggung jawaban Kepala Desa ditujukan kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati. Pertanggung jawaban Kepala Desa disampaikan kepada BPD sekali dalam setahun pada setiap tahun anggaran. Dan apabila laporan pertanggung jawaban (LPJ) Kepala Desa ditolak oleh BPD, maka LPJ tersebut harus dilengkapi atau disempurnakan. Namun setelah disempurnakan tetap ditolak oleh BPD untuk kedua kalinya, maka BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati. Mekanisme tersebut adalah merupakan perwujudan pelaksanaan demokrasi (Kedaulatan rakyat) di tingkat desa.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa masyarakat dan Pemerintah Desa diberi kesempatan untuk membentuk lembaga lain seperti lembaga adat dalam upaya pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat-istiadat yang sesuai dengan pembangunan, juga pembentukan lembaga kemasyarakatan dalam pemerintahan sesuai dengan kebutuhan desa seperti POSYANDU, LPMD, PKK, Dasa Wisma dan lain sebagainya. Ketentuan ini

mempertegas bahwa desa merupakan daerah istimewa yang bersifat mandiri, dan warga desa berhak untuk mengembangkan dan berpartisipasi dalam pembangunan desanya sesuai kondisi sosial budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Dalam UU No. 22 Tahun 1999 pasal 101 secara tegas disebutkan tugas dan kewajiban Kepala Desa adalah :

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- b. Membina kehidupan masyarakat desa;
- c. Membina perekonomian desa;
- d. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- e. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
- f. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya;
- g. Mengajukan perencanaan peraturan desa dan bersama BPD menetapkan Perdes;
- h. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan.

Mengingat tugas Kepala Desa yang sangat berat tersebut, maka sangat diperlukan persyaratan tertentu untuk menjadi Kepala Desa . Persyaratan selain yang telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan juga diperlukan adanya kemampuan dalam menjalankan kepemimpinan yang diembannya. Menurut Widjaja (2003 :30) menyebutkan beberapa kelebihan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin antara lain :

1. Kelebihan dalam penggunaan pikiran dan rasio, dalam arti kelebihan dalam memiliki pengetahuan tentang hakiki tujuan dan lembaga (desa) yang dipimpinnya. Pengetahuan tentang keluhuran asas-asas yang mendasari organisasi yang dipimpinnya dan pengetahuan tentang cara-cara untuk memutar roda pemerintah secara rasional, efektif, efisien dan profesional sehingga tercapai hasil yang maksimal.
2. Kelebihan dalam rohaniah, dalam arti memiliki sifat-sifat keluhuran budi, integritas moral sehingga menjadi teladan bagi masyarakat yang dipimpinnya.
3. Kelebihan secara fisik, dalam arti dapat memberikan contoh konkrit dalam memotivasi kerja yang berprestasi bagi yang dipimpinnya.

Kepemimpinan (*leadership*) secara umum merupakan kemampuan seseorang pemimpin untuk mempengaruhi orang lain (yang dipimpin). Sehingga orang lain tersebut bertindak laku sebagaimana yang dikehendaki pemimpin tersebut. Kepemimpinan Kepala Desa dapat mengkoordinasikan seluruh kepentingan masyarakat desa dalam setiap pengambilan keputusan. Seorang Kepala Desa menyadari bahwa pekerjaan tersebut bukanlah tanggung jawab Kepala Desa semata. Oleh sebab itu melimpahkan wewenang dan tanggung jawabnya kepada semua tingkat pimpinan sampai ke tingkat bawahan sekalipun perlu dilakukan, seperti kepada Kepala Dusun, Kepala Urusan dan lain sebagainya.

Bawahan (yang dipimpin) mengetahui apa yang harus masyarakat kerjakan atas dasar kesadaran (bukan keterpaksaan) dengan tanpa keraguan mereka melakukan dengan sebaik-baiknya sekalipun Kepala Desa tidak berada di tempat, misalnya dalam tolong menolong dan gotong royong yang dilakukan bersama-sama masyarakat.

Kepala Desa akan berhasil apabila dalam memimpin desanya apabila setiap langkah kegiatannya senantiasa memperhatikan suara rakyat, dan dilakukan secara demokratis yaitu mencerminkan keterbukaan, bertanggung jawab dalam mengambil keputusan didasarkan kepada hasil kesepakatan masyarakat banyak.

Widjaja (2003 : 32) menyebutkan tipe kepemimpinan demokratis dapat terwujud apabila :

1. Proses penggerakan bawahan selalu bertitik tolak dari pendapat bahwa manusia itu adalah mahluk yang paling termulia di dunia (berbudaya dan beradab).
2. Selalu mensinkronisasikan dan tujuan organisasi dengan kepentingan dan tujuan pribadi.
3. Senang menerima saran, pendapat dan kritikan.
4. Berusaha mengutamakan kerja sama anggota tim kerja dalam usaha mencapai tujuan.
5. Memberikan kebebasan pada bawahan untuk mengembangkan diri.
6. Berusaha mengembangkan kapasitas diri pribadi sebagai pemimpin (*leader*) dalam kepemimpinan (*leadership*)

Dalam hal pengisian Kepala Desa berdasarkan UU No. 5 Tahun 1979, desa belum memiliki kewenangan secara luas untuk melaksanakan pilkades, karena segalanya masih diatur oleh pemerintah provinsi. Sedangkan UU No. 22 Tahun 1999, kewenangan secara luas untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa ada pada desa itu sendiri, sedangkan pemerintah atasnya bersifat memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa. Kewenangan yang dimiliki secara otonom untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa adalah mulai dari pengumuman kekosongan Kepala Desa, pembentukan panitia, penjaringan bakal calon kepala desa sampai pada tahap

pelaksanaannya. Hanya pengesahan Kepala Desa terpilih kewenangan masih ada pada Bupati.

Tahapan sebelum pelaksanaan pemilihan Kepala Desa berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa adalah sebagai berikut :

a. Pembentukan Panitia

Setelah terjadi kekosongan Kepala Desa, (1) Badan Perwakilan Desa (BPD) membentuk panitia pencalonan dan pemilihan Kepala Desa yang keanggotaannya terdiri dari anggota BPD, pengurus lembaga masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat. (2) Susunan panitia pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, dituangkan dalam keputusan BPD yang diketahui oleh Kepala Desa dan disahkan oleh camat.

b. Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa

Proses penjaringan bakal calon kepala desa dilakukan oleh panitia dengan membuka pendaftaran selama 15 hari. Bagi warga desa yang berminat dan memenuhi persyaratan sebagaimana dituangkan dalam pasal 2 Perda Kabupaten Rembang nomor 7 Tahun 2000 antara lain :

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
3. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan atau berpengetahuan yang sederajat;

4. Tidak pernah terlibat langsung suatu kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan UUD 1945, G 30 S/PKI dan Organisasi terlarang lainnya;
5. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun (dua puluh lima tahun) pada saat mendaftar;
6. Sehat jasmani dan rohani;
7. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
8. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan.
9. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Mengenal desanya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat.

c. Penetapan Calon Kepala Desa

Setelah panitia melakukan penjurian selanjutnya melakukan seleksi administrasi yaitu mengoreksi persyaratan dan identitas diri, untuk dicocokkan dengan ketentuan yang berlaku. Apabila telah memenuhi persyaratan maka bakal calon Kepala Desa ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh ketua panitia pemilihan Kepala Desa.

d. Kampanye

Kampanye adalah kegiatan yang dilakukan oleh calon kepala desa dengan cara memasang/menempelkan tanda gambar atau cara lain yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, tidak mengganggu lalu lintas dan ketertiban umum, melakukan pidato di depan masa sebelum

pemungutan suara dilaksanakan dan dititik beratkan pada penyampaian Visi, Misi, dan Program Kerja.

e. Pemungutan dan Perhitungan Suara

Panitia pemilihan Kepala Desa menentukan hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara sesuai ketentuan. Warga desa yang telah terdaftar sebagai pemilih dan mendapat surat undangan datang di tempat pemungutan suara untuk menggunakan hak pilihnya secara LUBER.

f. Pengumuman dan Penetapan Calon Terpilih

Setelah perhitungan suara selesai dilaksanakan, ketua panitia pemilihan mengumumkan hasil perhitungan suara. Dalam forum rapat tidak mengajukan keberatan, maka ketua panitia pemilihan menyatakan bahwa hasil perhitungan suara yang telah dilaksanakan dinyatakan sah, ketua panitia pemilihan mengumumkan dan menetapkan calon Kepala Desa terpilih.

g. Pengesahan dan Pelantikan Kepala Desa.

Calon Kepala Desa terpilih yang diajukan oleh Badan Perwakilan Desa dikukuhkan oleh Bupati dengan Surat Keputusan, Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk mengambil sumpah Kepala Desa dalam sebuah upacara pelantikan.

Kendatipun penjelasan tersebut secara normatif merupakan tahapan proses penyelenggaraan pilkades, namun karena secara empiris merupakan peristiwa yang nyata terjadi di masyarakat, seperti penulis saksikan sendiri

bagaimana para elite desa membuat kesepakatan untuk menunculkan calon tunggal, penulis juga melihat bagaimana seorang pemilih yang menggunakan hak pilihnya sambil melepas sandal/alas kakinya di dalam bilik, sebagai pertanda bahwa dia memilih calon yang sebelumnya telah disepakati bersama botoh calon tertentu. Kondisi masyarakat semacam itu benar-benar terjadi pada pelaksanaan pilkades di Kecamatan Sarang, sehingga penulis mengasumsikan bahwa tahapan penjarangan, kampanye, pemungutan suara hingga pelantikan Kepala Desa merupakan variabel penelitian.

B. Penelitian Sejenis Yang Relevan

Penelitian sejenis yang dapat memberikan gambaran untuk mendukung:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Agus Suprastio tentang Implementasi Kebijakan JPS Proyek Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Dalam penelitian tersebut peneliti ingin menggambarkan hubungan antara isi kebijakan, kemampuan pelaksanaan dan lingkungan dengan implementasi program pengembangan kecamatan dalam mendukung program JPS di Kabupaten Cirebon tahun 2001. Penelitian menggunakan sampel secara random sampling terhadap aparat pelaksana, masyarakat dan tenaga pendamping, dengan menggunakan teknik observasi, wawancara mendalam, serta analisa data secara kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Variabel kebijakan, variabel kemampuan pelaksana dan variabel

lingkungan, cukup berpengaruh terhadap implementasi program PPK di kecamatan, Kabupaten Cirebon.

Hasil analisis menunjukkan bahwa korelasi secara bersama-sama antara isi kebijakan, kemampuan pelaksanaan, lingkungan dengan implementasi program PPK di Kabupaten Cirebon diperoleh hasil 0,141, artinya ada hubungan yang positif tetapi lemah karena hasil korelasi tersebut di bawah 0,5.

2. Penelitian yang dilakukan oleh PERCIK bekerja sama dengan Foundation Jakarta pada tahun 1999- 2001, penelitian dilakukan terhadap pemilihan Kepala Desa di desa Kedungringin, Kecamatan Suruh. Di desa tersebut terdapat tiga bakal calon Kepala Desa yang memiliki motivasi yang berbeda satu dan lainnya. Nurhadi (calon Kades) mencalonkan diri berperan sejumlah faktor yang saling berkaitan antaranya, yaitu faktor dari luar dan faktor dari dalam dirinya. Faktor dari luar dirinya adalah hal-hal sebagai berikut, sesudah ia lulus sebagai sarjana pendidikan dari IKIP Negeri Jakarta orang tuanya meminta kembali ke desa untuk menjadi Kepala Desa. Faktor luar lain yang berperan dalam proses keputusan untuk pencalonan Nurhadi adalah pertimbangan kelompok kekerabatan (karena ikatan perkawinan). Kelompok kekerabatan ini mempunyai kedudukan khusus dalam riwayat kepemimpinan desa ini. Nurhadi menjadi anggota kelompok kekerabatan keturunan kepala desa (trah). Sementara itu Warsono (bekel) mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa karena didorong oleh guru spiritualnya (dukun).

Calon Kepala desa Kusrin, seorang guru SD, sesungguhnya tidak berniat mencalonkan diri. Pendorong utama pencalonannya adalah Hari adalah seorang penduduk desa Kedungringin yang berhasil menjadi pengusaha di Jakarta. Apabila berhasil menjadikan Kusrin sebagai Kepala Desa, Hari ingin menjadikan desa Kedungringin sebagai desa teladan. Itulah sebabnya tema kampanye calon Kepala Desa Kusrin berfokus pada janji untuk membangun jalan ke desa Jagir dan Masjid, Hal ini juga melatar belakangi dukungan kuat Hari mendorong Kusrin untuk mencalonkan diri. Dari peristiwa diatas jelas bahwa Pemilihan Kepala Desa di awal Reformasi juga terungkap pertimbangan-pertimbangan lain yang diacu oleh cakades, pertimbangan yang bercorak terkait dengan tradisi, yaitu :

- a Keinginannya mencalonkan diri sebagai Kepala Desa karena trah. Dengan mempertimbangkan trah atau tidak trah justru ini merupakan fenomena masyarakat yang dapat menyumbat saluran hak-hak sebagai warga desa untuk menyalurkan keinginan menjadi pemimpin desa.
- b Tahap kampanye calon Kepala Desa, yang mestinya dapat dilakukan dengan menyampaikan program kerja dalam rangka menarik simpatik pemilih, namun ternyata sering digunakan untuk suap-menyuap/membeli suara pemilih.
- c Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa merupakan ajang persaingan yang sering menghalalkan segala cara demi suksesnya keinginan kelompok.

Kedua penelitian tersebut diatas memiliki kesamaan yaitu studi tentang implementasi kebijakan publik, namun fokus penelitian yang pertama implementasi kebijakan program JPS PPK dengan variabel isi kebijakan, kemampuan pelaksana dan lingkungan, sedangkan penulis fokus pada implementasi kebijakan Perda nomor : 7 Tahun 2000. Sedangkan penelitian yang kedua tentang Pilkades fokus penelitian pada motivasi dan pengorganisasian kader pendukung. Sedangkan penelitian penulis lebih ditekankan pada proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. Namun kedua-duanya sama-sama meneliti fenomena sosial disekitar implementasi kebijakan publik.

C. Hipotesis

Berdasarkan uraian dalam landasan teori diatas, maka formulasi hipotesis dalam penelitian adalah :

1. Hipotesis Verbal

a. Hipotesis Minor

- 1) ada hubungan yang positif antara variabel penjangangan calon Kepala Desa dengan variabel pelaksanaan pemilihan Kepala Desa
- 2) ada hubungan yang positif antara variabel kampanye calon Kepala Desa dengan variabel pelaksanaan pemilihan Kepala Desa
- 3) ada hubungan yang positif antara variabel pemungutan dan perhitungan suara dengan variabel pelaksanaan pemilihan Kepala Desa

- 4) ada hubungan yang positif antara variabel pengumuman dan penetapan calon terpilih dengan variabel pelaksanaan pemilihan Kepala Desa
- 5) ada hubungan yang positif antara variabel pengesahan dan pelantikan kepala desa dengan variabel pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

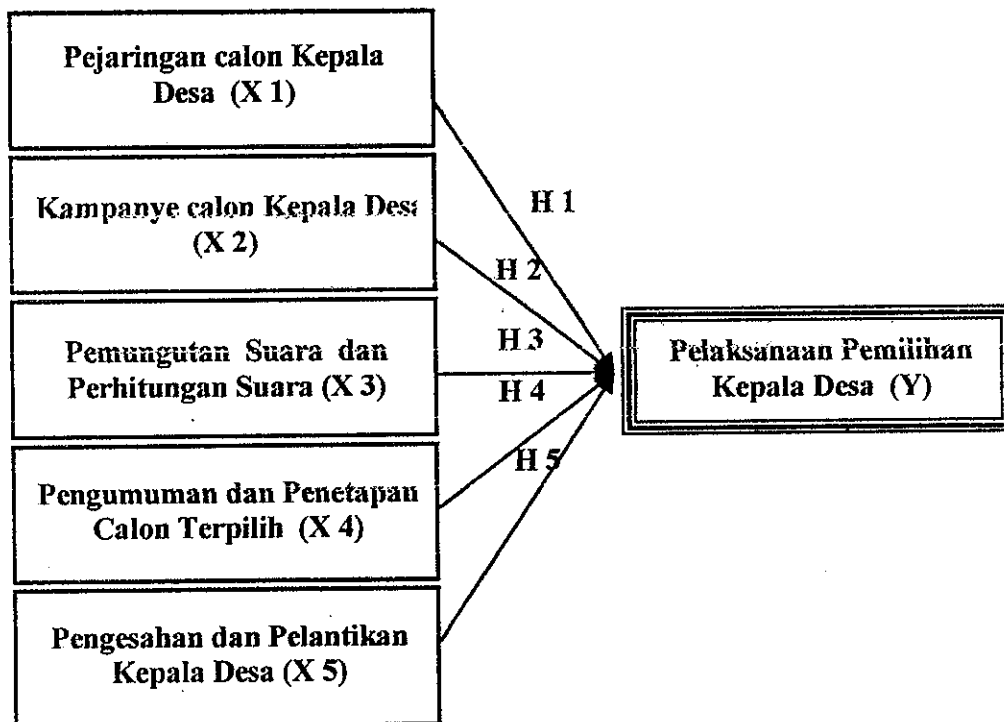
b. Hipotesis Mayor

Ada hubungan positif antara variabel penjangkaran calon Kepala Desa, kampanye calon Kepala Desa, pemungutan dan perhitungan suara, pengumuman dan penetapan calon terpilih, pengesahan dan pelantikan Kepala Desa dengan variabel pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

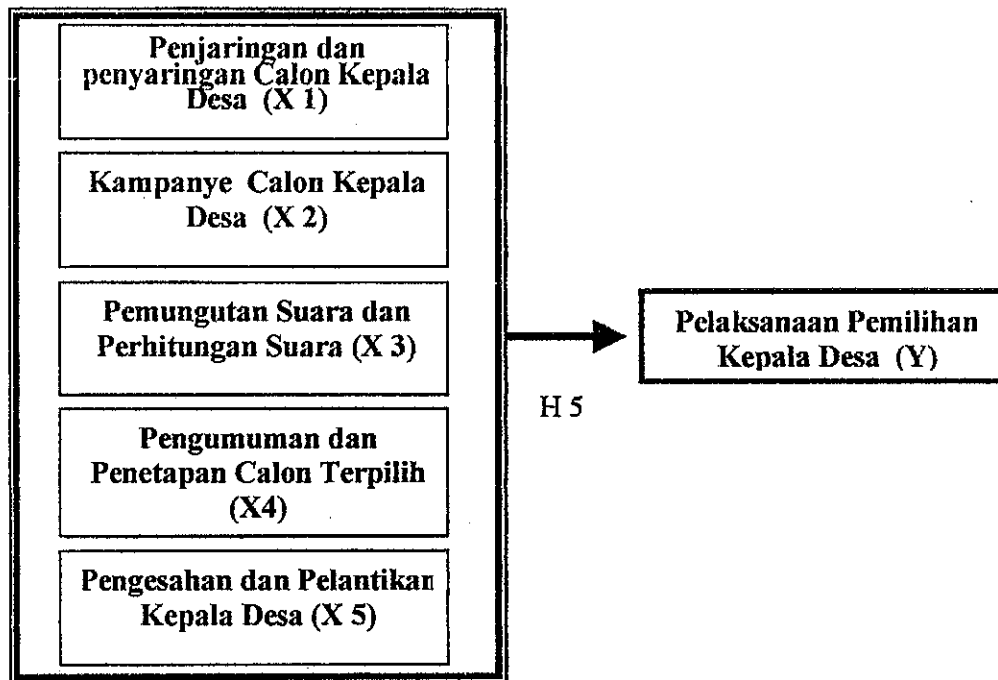
2. Hipotesis Geometri

Agar dapat memperjelas hubungan antara masing-masing variabel dibawah ini disajikan dalam bentuk geometri sebagai berikut :

GAMBAR - 1
HIPOTESIS MINOR



GAMBAR - 2
HIPOTESIS MAYOR



BAB. III

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Hasil penelitian akan diuraikan secara deskriptif, yaitu memberikan gambaran tentang permasalahan melalui analisis dengan menggunakan pendekatan ilmiah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Untuk mengetahui pengaruh penjarangan calon Kepala Desa, kampanye, pemungutan dan perhitungan suara, serta pengesahan dan pelantikan Kepala Desa terhadap pelaksanaan Kepala Desa di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang digunakan juga analisis kuantitatif dengan teknik analisis korelasi.

Penelitian dilakukan terhadap responden sebagai sampel yang diambil dari sebagian anggota populasi yang diteliti. Permasalahan yang diteliti diperoleh berdasarkan indikator-indikatornya, dan setiap indikator tersebut diuraikan dalam bentuk pertanyaan yang diajukan kepada responden. Dengan menggunakan instrumen penelitian yang terdiri dari observasi, wawancara serta angket yang telah diproses dengan mengoreksi (editing), mengelompokkan dan memberi kode (coding) dan menyusun tabel (tabulating), sehingga dapat digunakan untuk membuktikan hipotesis.

B. Ruang Lingkup.

Ruang lingkup penelitian ini adalah kebijakan publik. Penulis akan mengamati implementasi kebijakan publik, yakni mengimplementasikan kebijakan Peraturan Daerah. Dalam penelitian ini akan diuraikan pengaruh-

pengaruh variabel penjangkaran, kampanye calon Kepala Desa, pemungutan dan perhitungan suara, pengumuman dan penetapan calon terpilih, pengesahan dan pelantikan Kepala Desa terhadap variabel pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dipilih di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang, dengan pertimbangan bahwa peneliti bekerja pada lokasi penelitian sehingga akan mempermudah pelaksanaan penelitian serta pengumpulan data.

D. Variabel Penelitian

1. Klasifikasi variabel penelitian

- a. Variabel bebas (*independent*) adalah penjangkaran calon Kepala Desa (X 1), kampanye calon Kepala Desa (X 2), pemungutan dan perhitungan suara (X 3), pengumuman dan penetapan calon terpilih (X 4), pengesahan dan pelantikan Kepala Desa (X 5).
- b. Variabel terikat (*dependent*) dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

2. Definisi Konseptual

- a. Penjangkaran Calon Kepala Desa (X 1)

Penjangkaran calon Kepala Desa adalah tatacara yang dilakukan oleh panitia pemilihan Kepala Desa pada suatu desa untuk memperoleh bakal calon yang memenuhi syarat dalam arti mampu dan mau menjadi bakal calon Kepala Desa melalui seleksi administrasi.

b. Kampanye Calon Kepala Desa (X 2)

Kampanye calon Kepala Desa adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh calon Kepala Desa dengan maksud untuk mendapatkan dukungan dan simpati masyarakat sebagai pemilih pada pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

b. Pemungutan dan Perhitungan Suara (X 3)

Pemungutan dan perhitungan suara adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh panitia pada suatu tempat tertentu dalam rangka mengumpulkan suara pemilih (melalui pencoblosan tanda gambar/simbul calon Kades), menghitung suara untuk menentukan perolehan suara yang didapat dari masing-masing calon Kepala Desa dalam pemilihan Kepala Desa.

d. Pengumuman dan Penetapan Calon Terpilih (X 4)

Pengumuman dan Penetapan calon terpilih adalah tahapan kegiatan yang dilakukan oleh panitia setelah mendapatkan satu calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak, maka ketua panitia mengumumkan calon terpilih sesaat setelah rapat perhitungan suara selesai dengan disertai berita acara.

c. Pengesahan dan Pelantikan Kepala Desa (X 5)

Pengesahan dan pelantikan calon Kepala Desa adalah tahap pengajuan calon Kepala Desa terpilih yang dilakukan oleh Badan Perwakilan Desa kepada Bupati, untuk mendapatkan Surat Keputusan dan pelantikan.

d. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Y)

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa adalah serangkaian Kegiatan yang dilaksanakan oleh panitia pada hari yang telah ditentukan, dengan maksud untuk menentukan salah satu calon sebagai pemenang dengan dukungan suara terbanyak pada pemilihan Kepala Desa.

3. Definisi Operasional.

Definisi operasional adalah tahapan penjabaran konsep atau variabel penelitian dalam perincian terukur. Operasionalisasi konsep tersebut ditranspormasikan menjadi bagian yang lebih konkrit dan terukur. Untuk melakukan hal tersebut terlebih dahulu mengurai konsep atau variabel menjadi faktor-faktor yang membentuk variabel tersebut. Indikator tersebut dapat dikembangkan menjadi suatu daftar pertanyaan atau kuisioner. Kemudian faktor tersebut digambarkan dalam indikator-indikator yang terukur. Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau konstruk dengan cara memberikan arti atau menspesifikasi kegiatan atau memberikan operasional yang diperlukan untuk mengukur konstruk. Definisi operasional didasarkan atas sifat-sifat yang didefinisikan yang dapat diamati atau diobservasi (Suryabrata 2003:83). Sedangkan menurut Masri Singarimbun (1995 : 46) definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel, atau dengan kata lain merupakan petunjuk pelaksanaan atau pedoman bagaimana cara untuk mengukur variabel. Dengan membaca definisi operasional seseorang akan

mengetahui pengukuran suatu variabel. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Penjaringan Calon Kades

Penjaringan Kades diukur berdasarkan 3 (tiga) indikator sebagai berikut :

1. Panitia Pilkades dibentuk secara demokratis
2. Panitia Pilkades bekerja dengan baik dan jujur
3. Calon Kades adalah penduduk desa dan atau putra desa

b. Kampanye Calon Kades

Variabel Kampanye calon Kades diukur berdasarkan 3 (tiga) indikator sebagai berikut:

1. Kampanye calon Kades dilaksanakan sesuai dengan aturan.
2. Kampanye calon Kades berjalan dengan tertib
3. Kampanye calon Kades dilaksanakan dengan menyampaikan visi, misi dan program kerja

c. Pemungutan dan Perhitungan Suara.

Variabel pemungutan dan perhitungan suara diukur berdasarkan 3 (tiga) indikator sebagai berikut :

1. Kondisi tempat pemungutan suara memenuhi syarat
2. Pelaksanaan pemungutan suara aman ,tertib dan lancar
3. Pelaksanaan perhitungan suara secara terbuka dan jujur

d. Pengumuman dan Penetapan Calon Terpilih

Variabel pengumuman dan penetapan calon terpilih diukur dengan 3 (tiga) indikator sebagai berikut:

1. Pengumuman calon terpilih dilaksanakan sesaat setelah rapat perhitungan suara
 2. Penetapan calon terpilih berdasarkan hasil rapat panitia
 3. Penetapan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak
- e. Pengesahan dan Pelantikan Kepala Desa terpilih.

Variabel pengesahan dan pelantikan calon Kades terpilih diukur dengan 3 (tiga) indikator sebagai berikut :

1. Pengesahan calon terpilih dan pelantikan Kades dilakukan oleh Bupati
 2. Kades terpilih dipilih secara demokratis.
 3. Kades terpilih mengikuti pelatihan / pembekalan tugas-tugas Kepala Desa.
- f. Pelaksanaan Pemilihan Kades.

Variabel pelaksanaan pemilihan Kades diukur berdasarkan 3 indikator sebagai berikut :

1. Pada umumnya pemilihan Kades di Kecamatan Sarang dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar
2. Pada umumnya pemilihan Kades di Kecamatan Sarang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku
3. Pemilihan Kades di Kecamatan Sarang diikuti oleh sebagian besar penduduk desa setempat

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari data primer dan data skunder.

Sedangkan sumber data diperoleh:

1. Data primer : yaitu diperoleh secara langsung dari responden sampel yang ditentukan secara random di Desa Gilis, Desa Temperak dan desa Tawangrejo Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang.
2. Data skunder : yaitu diperoleh dari Bagian Pemerintahan Desa Setda Rembang, Kantor Kecamatan Sarang berupa buku-buku, laporan, dokumen dan informasi dari Pemerintah Desa.

F. Instrumen Penelitian

Alat yang akan digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah kuisioner, yang nantinya akan memberi masukan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga mudah dianalisis sesuai dengan metode penelitian yang ditetapkan. Sedangkan Instrumen yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah menyusun daftar pertanyaan yang mengacu pada variabel bebas dan variabel terikat. Instrumen penelitian merupakan pengukuran terhadap fenomena sosial, oleh karena itu untuk mengukur fenomena tersebut, peneliti menggunakan alat ukur atau instrumen penelitian secara spesifik terhadap variabel yang akan diteliti. Dalam penelitian ini dipergunakan instrumen kuisioner dengan skala pengukuran *linkert*, yang memberikan nilai

atau skor untuk jawaban yang diperoleh dari daftar pertanyaan dari yang paling rendah, sedang sampai pertanyaan yang paling tinggi. Pedoman pengukuran tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 Skor 4 (empat) untuk kategori jawaban yang sangat mendukung
- 2 Skor 3 (tiga) untuk kategori jawaban mendukung
- 3 Skor 2 (dua) untuk kategori jawaban yang kurang mendukung
- 4 Skor 1 (satu) untuk kategori jawaban yang tidak mendukung

Kategori jawaban dapat berubah sesuai dengan kebutuhan seperti (sangat baik, baik, cukup baik, tidak baik dan lain sebagainya)

G. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiono, 2001:57)

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah random sampling yaitu metode pengambilan sampel di mana setiap anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel, dengan cara memilih secara acak anggota populasi untuk dimasukkan ke dalam sampel (Purbayu BS dan Ashari, 2003:69). Populasi penelitian adalah masyarakat di Kecamatan Sarang sebanyak 23 desa dipilih secara random dan diperoleh tiga desa. Oleh karena dari warga desa yang mempunyai hak pilih di tiga desa tersebut jumlahnya banyak, maka akan diambil 5% untuk digunakan sebagai sampel. Dari tiga desa sampel tersebut masing-masing jumlah hak

pilihnya adalah Desa Gilis : 1.300 orang, Desa Temperak : 1.208 orang, dan Desa Tawangrejo: 1.034 orang, jumlah tiga desa menjadi 3.542 orang ditentukan sebanyak 175 orang responden. Agar diperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan Pilkades, maka penelitian ini juga dilengkapi dengan wawancara kepada orang-orang yang dianggap tahu dengan obyek penelitian. Penentuan subyek sebagai sampel dilakukan secara sengaja (*purposive sampling*) dalam penelitian ini adalah Kepala desa Gilis, Temperak dan Tawangrejo, Ketua BPD, Ketua LPMD, Panitia Pilkades dan tokoh masyarakat di tiga desa, Kasi Pemerintahan Kecamatan, dan Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang atau personil yang membidangi masalah Pemilihan Kepala Desa.

H. Teknik Pengumpulan Data

Teknik analisis yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini meliputi :

1 Kuisisioner

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan kuisisioner atau angket yang ditujukan kepada subyek penelitian/responden, dalam kuisisioner ini terdapat beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh responden/subyek yang menjadi sasaran kuisisioner tersebut. Adapun dasar pertimbangan penelitian menggunakan kuisisioner dari subyek adalah, karena subyek yang paling tahu tentang dirinya, dan semua hal yang dinyatakan oleh responden adalah benar/dipercaya dan interpretasi subyek adalah

sama dengan yang dimaksud oleh peneliti. Menurut James A. Black (1999:325) Kuisioner mempunyai fungsi 1). Deskripsi 2). Pengukuran, karena informasi yang didapat melalui penyebaran kuisioner bisa memberikan gambaran tentang beberapa ciri individu, atau kelompok, misalnya jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan dan lain sebagainya, serta dirancang untuk mengukur berbagai fenomena.

2 Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data atau sumber data primer dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan (*interview guided dan indepth interviewing*). Wawancara adalah suatu kegiatan komunikasi verbal dengan tujuan mendapatkan informasi (James A.Black 1999:305), dilakukan untuk melengkapi data apabila responden kurang jelas dalam menjawab pertanyaan.

3 Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dokumentasi dilakukan agar mendapatkan data dari dokumen yang ada di desa sampel, Instansi Kecamatan Sarang dan Kabupaten Rembang.

4 Observasi

Malakukan pengumpulan data dengan mengamati secara langsung berbagai kegiatan yang dilaksanakan calon Kepala Desa dan panitia

pemilihan Kepala Desa serta masyarakat. Observasi dimaksudkan untuk memperoleh data secara umum.

I. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperlukan ini terkumpul, maka selanjutnya diproses dan dianalisis dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Proses Pegolahan Data

a. Skoring

Pemberian nilai atau bobot dilaksanakan dalam bentuk angka atas semua jawaban responden data kuantitatif yang diperlukan dalam pengujian hipotesis. Untuk menentukan skor penelitian ini dengan memberikan penilaian atas jawaban responden dengan klasifikasi sebagai berikut : a, b, c, d, setiap jawaban diberi skor. Untuk menentukan nilai setiap item dari kuisioner. Adapun tingkat urutan penilaian a : 1, b : 2, c : 3, d : 4

b. Editing

Proses tersebut merupakan langkah meneliti ulang kelengkapan dan kebenaran jawaban yang diperoleh dari responden yang didapatkan melalui pertanyaan atau kuisioner sehingga data sesuai dengan permasalahan.

c. Coding

Proses ini merupakan kegiatan dengan pemberian tanda atau simbol dalam setiap data yang telah diteliti.

d. Tabulating

Tahap ini merupakan langkah mengelompokkan data sejenis dalam tabel frekuensi agar mempermudah analisis.

2. Analisis Data

Dalam menguji hipotesis penelitian, penulis akan menggunakan program SPSS (*Statistical Package for Social Sciences*). Setelah mendapatkan data primer tentang variabel tergantung (*dependant variables*) Y yaitu pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan data primer tentang variabel bebas (*independent variables*) berupa penjaringan calon Kepala Desa, kampanye calon Kepala Desa, pemungutan dan perhitungan suara, pengumuman dan penetapan calon terpilih, pengesahan dan pelantikan calon Kepala Desa, dari jawaban responden. Hasil jawaban responden kemudian ditabulasikan, dengan merubah jawaban responden menjadi kuantitatif melalui penggunaan skala ordinal. Selanjutnya angka-angka yang diperoleh dianalisis menggunakan metode statistik sebagai berikut :

- a. Menggunakan teknik statistik deskriptif untuk mendeskripsikan jawaban responden yang diperoleh mengenai penjaringan Kepala Desa, kampanye, pemungutan dan perhitungan suara, pengumuman dan penetapan, pengesahan dan pelantikan calon Kepala Desa.
- b. Menggunakan teknik korelasi parsial untuk menganalisis hubungan atau pengaruh antara variabel penjaringan Calon Kepala Desa, kampanye, pemungutan dan perhitungan suara, pengesahan dan pelantikan calon Kepala Desa dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Analisis deskriptif merupakan alat analisis yang dilakukan melalui perhitungan dengan menggunakan logika untuk menarik kesimpulan yang logis mengenai data yang dianalisis. Analisis ini membahas item penelitian dalam kaitannya dengan identitas responden dan variabel-variabel penelitian. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa analisis deskriptif ini dimaksud untuk melakukan analisis data yang sesuai dengan klasifikasi responden kedalam prosentasi.

3. Uji Validitas dan Reliabilitas

Validitas atau kesahihan dimaksudkan untuk melihat seberapa cermat suatu angket melakukan fungsi ukurnya. Jadi suatu bentuk dikatakan valid apabila angket tersebut harus mengukur sesuatu dan melakukannya dengan cermat dan benar, menjelaskan penilaian terhadap validitas faktor sesuatu alat pengukur harus ditinjau dari segi apakah item yang disangka mengukur faktor-faktor tertentu telah benar dapat memenuhi fungsinya mengukur faktor-faktor yang dimaksudkan.

Guna menguji reliabilitas dapat dilihat dari hubungan item dengan alpha (lampiran). Dari semua indikator yang diuji maka terlihat bahwa koefisien masing-masing item lebih besar dari harga alpha, sehingga dapat disimpulkan bahwa masing-masing indikator mempunyai derajat reliabilitas.

4. Uji Hipotesis Asosiatif

Antara penjarangan calon Kepala Desa, kampanye calon Kepala Desa, pemungutan dan perhitungan suara, pengumuman dan penetapan

calon terpilih, pengesahan dan pelantikan calon Kepala Desa dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. Untuk korelasi tunggal atau sederhana akan digunakan teknik statistik koefisien korelasi Rank Kendall Tau. Sedangkan untuk uji korelasi berganda akan digunakan statistik koefisien konkordansi Kendall. Kedua rumus tersebut secara singkat diuraikan tersebut dibawah ini. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan program SPSS/PC+ untuk memperoleh kesimpulan berdasarkan pengujian terhadap hipotesis yang telah ditetapkan.

⇒ Koefisien Korelasi Kendall Tau

Pengujian dilakukan dengan metode korelasi *Rank* dari *Kendall*. Untuk pengujian apakah ada hubungan atau pengaruh masing-masing variabel independent terhadap variabel dependent atau dipergunakan untuk menguji haipotesis minor yaitu hubungan antar variabel.

Menurut Kendall perhitungan korelasi *Rank* atau *T (Tau)* secara manual adalah sebagai berikut

$$\tau = \frac{\sum A - \sum B}{\frac{N(N-1)}{2}}$$

Keterangan : N : jumlah sampel
 τ : koefisien Rank Kendall antara variabel X dan Y $\{-1 < 0 < 1\}$

Jika harga (τ) mendekati +1 maka kedua variabel mempunyai korelasi yang sangat kuat, apabila mendekati nol (0) maka dapat dikatakan tidak berkorelasi, sedangkan apabila kurang dari nol (0) maka dapat dikatakan

bahwa hubungan kedua variabel negatif atau saling berlawanan (Zaenal Mustofa, 1995:121).

Sedangkan untuk uji signifikansi koefisien korelasi digunakan rumus Z , karena distribusinya mendekati normal menggunakan rumus:

$$Z = \frac{T}{\sqrt{\frac{2(2N+5)}{9(N-1)}}}$$

Harga Z dikonsultasikan dengan tabel untuk menentukan ada tidaknya hubungan antar variabel tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Apabila $Z_o > Z_t$ pada taraf signifikansi 1%, berarti sangat signifikan, hipotesis diterima.
2. Apabila $Z_o > Z_t$ pada taraf signifikan, hipotesis ditolak.
3. Apabila $Z_o < Z_t$ pada taraf signifikan 5%, berarti tidak signifikan, hipotesis ditolak

⇒ Koefisien Konkordansi Kendall (W)

Koefisien ini digunakan untuk mengukur derajat asosiasi variabel X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 dan Y secara bersama-sama melalui pengukuran terhadap himpunan-himpunan rangkingnya masing-masing variabel yang diasosiasikan secara bersama-sama koefisien konkordansi Kendall digunakan untuk menguji hipotesis mayor yaitu hubungan antara variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependent yang dapat digambarkan. Untuk menghitung harga W adalah menggunakan formula dibawah ini :

$$W = \frac{S}{\frac{1}{12} K^2 (N^2 - N)}$$

5. Koefisien Determinasi

Untuk mengetahui seberapa besar prosentase atas berapa besar sumbangan variabel bebas secara bersamaan mempengaruhi variabel terikat.

Rumus : $KD = (W^2) 100\%$

Keterangan

KD = Koefisien Determinan

W = Koefisien Konkordansi Kendall

6. Alat Bantu

Agar dapat diperoleh hasil yang efektif yang akurat untuk analisis korelasi antara variabel independent dan variabel *dependent* dalam penelitian ini penulis menggunakan alat bantu komputer dengan program SPSS (*Statistical Package for Social Sciences*) setelah diperoleh data kedua variabel tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

Kecamatan Sarang adalah salah satu kecamatan paling timur di Jawa Tengah yang merupakan bagian wilayah Kabupaten Rembang. Luas wilayah Kecamatan Sarang adalah 9.133,285 Ha, dengan jumlah penduduk 57.282 jiwa secara umum dapat dikatakan bahwa wilayah Kecamatan Sarang merupakan daerah pertanian yang relatif subur karena mempunyai curah hujan 1007mm/tahun.

Berdasarkan kondisi geografinya, Kecamatan Sarang juga cukup potensial untuk dikembangkan bidang perikanan dan budi daya hasil tangkapan ikan laut. Kondisi perairan laut relatif tenang, selain itu di sepanjang pantai Kecamatan Sarang sangat kecil terjadi proses sedimentasi karena tidak ada sungai besar yang bermuara di garis pantainya. Ini salah satu faktor penunjang dalam usaha pengelolaan pesisir.

Bila ditinjau dari kondisi morfologi Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang mempunyai lahan yang relatif datar dengan kemiringan 0 – 2 %, berada pada posisi 111° sampai 111° 30' Bujur Timur dan 6° 30' sampai 7° Lintang Selatan. Batas administrasi Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang adalah :

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kabupaten Tuban , Provinsi Jawa Timur
- Sebelah Selatan : Kecamatan Sedan dan Kecamatan Sale
- Sebelah Barat : Kecamatan Kragan

Secara administrasi Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang memiliki 23 desa dengan rata-rata ketinggian 0 - 5 m diatas permukaan air laut. Suhu udara rata-rata 29°C sampai dengan 33°C.

Nama dan luas wilayah untuk masing-masing desa terlihat pada table dibawah.

Tabel 4.1
Luas Wilayah Tiap-Tiap Desa
Serta Jumlah Penduduk

No	Nama Desa	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah Penduduk
1.	Lodankulon	807,410	3.823
2.	Lodanwetan	954,000	2.947
3.	Bonjor	1.215,835	2.566
4.	Tawangrejo	882,412	1.618
5.	Sampung	424,287	1.492
6.	Baturno	148,290	1.264
7.	Babaktulung	407,210	2.486
8.	Nglojo	514,350	1.827
9.	Jambangan	275,305	1.828
10.	Pelang	365,605	1.364
11.	Gilis	330,073	1.877
12.	Gunungmulyo	263,565	1.993
13.	Gonggang	207,220	1.144
14.	Sumbermulyo	242,745	2.068
15.	Kalipang	686,500	3.736
16.	Dadapmulyo	250,060	1.989
17.	Sendangmulyo	356,270	3.956
18.	Banowan	140,975	2.067
19.	Temperak	478,848	2.948
20.	Karangmangu	46,427	7.094
21.	Bajingjowo	66,000	3.039
22.	Bajingmeduro	37,303	1.588
23.	Sarangmeduro	32,595	3.459
	Jumlah	9.133,285	57.282

Sumber : Monografi Kecamatan Sarang Tahun 2003

Hasil sensus tahun 2003 Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang berpenduduk 57.282 jiwa, jumlah penduduk mukim 5.766 kepala keluarga atau 20.591 jiwa, sedangkan mata pencaharian sebagian besar adalah sebagai petani pemilik lahan 16.095 orang, petani penggarap 9.775 orang, nelayan sebanyak 6.281 orang, pengusaha besar/sedang 44 orang, buruh 9.806 orang pedagang 3.766 orang.

Alat transportasi lokal yang dipergunakan di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang berdasarkan Kecamatan Sarang Dalam Angka Tahun 2003 adalah sebagai berikut : sepeda angin 3.782 buah, dokar/delman 59 buah. Gerobak/cikar 102/48 buah, becak 103 buah, sepeda motor 1.081 buah, truck 37 buah, perahu motor/layar 568 buah.

Tingkat pendidikan di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang dari jumlah penduduk secara keseluruhan yang tidak tamat SD/ sederajat sebesar 11.581 orang, tamat SD/ sederajat sebesar 22.459 orang, tamat SLTP/ sederajat sejumlah 4.043 orang, tamat SLTA adalah 2.088 orang, sedangkan yang tamat Akademi 133 orang, Perguruan Tinggi sebanyak 59 orang.

Luas lahan Kecamatan Sarang mencapai 9.133,285 Ha. yang terdiri dari lahan sawah dan lahan kering, lahan sawah berupa sawah irigasi teknis, setengah teknis, irigasi sederhana dan sawah tadah hujan, sedangkan lahan kering sebagian besar berupa tanah pekarangan/ bangunan dan tegalan. Secara rinci penggunaan lahan sawah dan lahan kering dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 4.2

Penggunaan Lahan Sawah di Kecamatan Sarang
Kabupaten Rembang Tahun 2003

No	Desa	Irigasi Teknis	Setengah teknis	Sederhana	Tadah Hujan	Jumlah
1.	Lodankulon	-	-	25.000	107.005	132.005
2.	Lodanwetan	-	-	-	106.017	106.017
3.	Bonjor	-	40.000	-	66.035	106.035
4.	Tawangrejo	-	31.000	-	170.200	201.200
5.	Sampung	-	31.000	-	97.330	128.330
6.	Baturno	78.000	-	-	18.750	96.750
7.	Babaktulung	-	186.000	-	94.138	280.138
8.	Nglojo	-	-	-	273.295	273.295
9.	Jambangan	-	-	-	109.005	109.005
10.	Pelang	-	-	-	84.200	84.200
11.	Gilis	-	-	-	29.500	29.500
12.	Gunungmulyo	-	-	-	69.000	69.000
13.	Gonggang	-	40.000	-	74.700	114.700
14.	Sumbermulyo	-	-	-	50.000	50.000
15.	Kalipang	-	72.000	-	113.300	185.300
16.	Dadapmulyo	-	25.000	-	139.335	164.335
17.	Sendangmulyo	-	131.000	50.000	3.000	184.000
18.	Banowan	51.000	44.000	-	-	95.000
19.	Temperak	-	66.000	190.000	14.507	270.507
20.	Karangmangu	-	20.000	-	-	20.000
21.	Bajingjowo	-	26.000	-	-	26.000
22.	Bajingmeduro	-	28.000	-	-	28.000
23.	Sarangmeduro	-	18.000	-	1.000	19.000
	Jumlah	1.29.000	758.000	265.000	1.620.317	2.772.317

Sumber: Kecamatan Sarang dalam angka tahun 2003

Tabel 4. 3
Penggunaan Lahan Kering
di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang Tahun 2003

No	Desa	Bangunan	Tegalan	Tambak
1.	Lodankulon	17.510	217.640	-
2.	Lodanwetan	18.700	334.900	-
3.	Bonjor	24.300	311.512	-
4.	Tawangrejo	51.525	143.450	-
5.	Sampung	26.300	251.657	-
6.	Baturno	57.173	59.577	-
7.	Babakulung	21.365	24.600	-
8.	Nglojo	26.015	207.150	-
9.	Jambangan	25.500	138.800	-
10.	Pelang	42.000	235.800	-
11.	Gilis	69.913	224.930	-
12.	Gunungmulyo	76.790	150.225	-
13.	Gonggang	15.505	67.425	-
14.	Sumbermulyo	36.000	150.755	-
15.	Kalipang	70.500	396.200	20.000
16.	Dadapmulyo	36.150	45.025	-
17.	Sendangmulyo	9.580	139.293	11.397
18.	Banowan	11.895	32.050	-
19.	Temperak	18.892	93.361	10.420
20.	Karangmangu	9.500	5.000	5.000
21.	Bajingjowo	7.500	17.500	-
22.	Bajingmeduro	2.615	3.610	-
23.	Sarangmeduro	4.618	755	-
	Jumlah	679.346	3.250.915	46.817

Sumber : Kecamatan Sarang dalam angka tahun 2003

Fokus penelitian dilakukan di tiga desa di wilayah Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang sekaligus sebagai sampel, tiga desa tersebut adalah desa Gilis, desa Temperak, dan desa Tawangrejo.

1. Desa Gilis

Luas wilayah desa Gilis adalah 330.073 Ha, dengan jumlah penduduk sebanyak 1.877 jiwa dengan perbandingan laki-laki 916 jiwa, perempuan 916 jiwa. Jumlah kepala keluarga menurut tingkat pendidikan adalah tidak tamat SD sebanyak 233 jiwa, tamat SD dan SLTP sebanyak 133 orang, tamat SLTA keatas sebanyak 26 orang. Keluarga miskin sebanyak 256 KK (847 jiwa) yang berada dalam 2 RW dan 8 RT. Jumlah hak Pilih sebanyak 1.300 orang.

Desa Gilis sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani yang memiliki unggulan yaitu tembakau, pertukangan, perdagangan dan peternak.

Secara geografi desa Gilis terletak diantara :

Sebelah utara : Desa Gunungmulyo

Sebelah timur : Kecamatan Sedan

Selatan selatan : Desa Lodan Kulon

Sebelah barat : Desa Pelang

2. Desa Temperak

Luas wilayah desa Temperak adalah 478.848 Ha, dengan jumlah penduduk sebanyak 2.948 jiwa dengan perbandingan laki-laki 1.382 jiwa, perempuan 1.566 jiwa. Jumlah kepala keluarga menurut tingkat pendidikan adalah tidak tamat SD sebanyak 229 orang, tamat SD dan SLTP sebanyak 343

orang, tamat SLTA keatas sebanyak 22 orang. Keluarga miskin sebanyak 110 KK (847 jiwa) yang berada dalam 2 RW dan 8 RT. Jumlah hak Pilih sebanyak 1.208 orang.

Desa Temperak sebagian besar bermata pencaharian sebagi petani kemudian selebihnya sebagai nelayan dan jasa pertukangan dan wiraswasta.

Secara geografi desa Temperak berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Laut jawa

Sebelah timar : Jawa timur

Sebelah selatan : Jawa timar

Sebelah barat : Desa Karangmangu

3. Desa Tawangrejo

Luas wilayah desa Tawangrejo adalah 882.412 Ha, dengan jumlah penduduk sebanyak 1.618 jiwa dengan perbandingan laki-laki 839 jiwa, perempuan 779 jiwa. Jumlah kepala keluarga menurut tingkat pendidikan adalah tidak tamat SD sebanyak 313 orang, tamat SD dan SLTP sebanyak 187 orang, tamat SLTA keatas sebanyak 16 orang. Keluarga miskin sebanyak 230 KK (724 jiwa) yang berada dalam 3 RW dan 8 RT. Jumlah hak Pilih sebanyak 1.034 orang .

Desa Tawangrejo sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani 856 orang selebihnya bermata pencaharian dibidang pertukangan dan wiraswasta.

Secara geografi desa Tawangrejo berbatasan dengan :

Sebelah utara : Desa Sampung

Sebelah timur : Jawa timur

Sebelah selatan : Jawa timur

Sebelah barat : Desa Bonjor

B. HASIL PENELITIAN

Sebagaimana ditetapkan pada bab metodologi, bahwa dalam rangka penelitian ini telah ditetapkan sebagai sampel adalah Kepala Desa di tiga desa yaitu Gilis, Temperak dan Tawangrejo. Selanjutnya di tentukan sebagai responden lainnya adalah tokoh masyarakat dan warga masyarakat terpilih di tiga desa, para ketua BPD di tiga desa, para panitia di tiga desa Camat Sarang, Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang yang seluruhnya sebanyak 175 orang.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 175 responden dapat diketahui beberapa gambaran responden sebagai berikut :

Tabel 4.4

Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	%
1.	SD/ sederajat	23	13.14
2.	SMP/ sederajat	62	35.42
3.	SLTA/ sederajat	70	40
4.	Sarmud/ Diploma	9	5.14
5.	Sarjana	11	6.28
	Jumlah	175	100

Sumber ; Data primer diolah

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa dari sejumlah 175 responden ternyata sebagian besar berpendidikan SLTP kebawah, sehingga tingkat kesadaran berdemokrasi rendah dan cenderung mempertahankan tradisi yang sudah ada. Namun tingkat pendidikan SLTA cukup banyak (40%) sehingga kemampuan responden dalam menentukan alternatif dari jawaban cukup demokratis dan dapat dipertanggung jawabkan. Sedangkan sisanya berpendidikan sarjana muda dan sarjana yang lebih dapat berpikir secara logika serta mampu memberi teladan kepada masyarakat lainnya.

Sedangkan berdasarkan usia para responden dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.5

Jumlah Responden Berdasarkan Usia

No	Usia (tahun)	Frekuensi	%
1.	20 – 25	14	8
2.	26 – 30	23	13.14
3.	31 – 35	32	18.28
4.	36 – 40	40	22.85
5.	41 – 45	44	25.14
6.	46 – 50	12	6.85
7.	51 keatas	10	5.71
Jumlah		175	100

Sumber : Data primer di olah

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa responden yang berusia muda cukup banyak, hal ini berakibat bahwa

kecenderungan untuk menginginkan perubahan tidak dapat dipungkiri lagi, senantiasa berpikir sangat kritis dan dinamis, sehingga dalam menjawab pertanyaan sering dikaitkan dengan keinginannya yaitu segera mewujudkan kehidupan demokrasi di pedesaan yang lebih baik, yang terkadang agak dipaksakan. Namun peran dari tokoh yang disegani seringkali mampu meredam gejolak generasi muda yang berlebihan.

Berdasarkan hasil pengamatan selama dilakukan penelitian ini, diperoleh gambaran bahwa proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tersebut telah berjalan cukup baik dan lancar. Hal itu terjadi karena kondisi masyarakat di tiga desa tersebut sebagian besar telah memiliki kesadaran yang cukup tinggi terhadap proses demokratisasi di tingkat desa, khususnya dalam hal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. Semua variabel yang diteliti telah dilaksanakan dengan baik, para pelaksana maupun warga desa setempat secara bersama-sama menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa dengan penuh semangat. Namun demikian implementasi kebijakan yang dilakukan oleh para penyelenggara pemerintahan desa maupun lembaga-lembaga desa yang ada belum menunjukkan pada suatu kondisi yang memuaskan.

C. ANALISIS HASIL PENELITIAN

Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2000 adalah merupakan fokus penelitian, dan kajian dalam penelitian ini adalah ingin mengetahui lebih mendalam tentang beberapa variabel bebas dan variabel tergantung. Variabel bebas adalah penjangkaran calon Kepala Desa,

kampanye calon Kepala Desa, pemungutan suara dan penghitungan suara, pengumuman dan penetapan calon terpilih, pengesahan dan pelantikan Kepala Desa, variabel tergantungnya adalah pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli 2004, dengan menyebarkan kuisisioner kepada responden di tiga desa. Agar dapat diperoleh informasi yang mendalam tentang kebenaran dari jawaban responden, maka dilakukan wawancara dengan para pelaksana kebijakan baik dari pihak pemerintah maupun tokoh masyarakat setempat. Hasil wawancara digunakan sebagai pendukung dari data hasil jawaban kuisisioner dan diolah kemudian ditampilkan ke dalam bentuk tabel sesuai dengan variabel yang diteliti yang dapat dideskripsikan sebagai berikut :

1. Penjaringan Calon Kepala Desa

a. Panitia dibentuk secara demokratis.

Guna mengetahui kehidupan demokrasi di desa-desa di wilayah Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang khususnya untuk memilih Kepala Desa pada pelaksanaan Pilkades, maka melalui penyebaran kuisisioner kepada para responden diperoleh hasil bahwa jawaban responden tertinggi sebanyak 31,4% menyatakan selalu dilibatkan dalam rapat pembentukan panitia pilkades, sedangkan 28% menyatakan kadang-kadang dilibatkan, selebihnya 24% menjawab sering dilibatkan, dan sebanyak 16,6% menyatakan tidak pernah dilibatkan, selengkapanya data tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 4.6

Keterlibatan Warga Desa Dalam Pembentukan Panitia Pilkades

Skor	Alternative Jawaban	Frek	Persentase
1	Tidak pernah	29	16,6
2	Kadang-kadang	49	28,0
3	Sering	42	24,0
4	Selalu	55	31,4
	Total	175	100,0

Sumber : kuisisioner no 1

Tabel 4.7

Rapat Musyawarah Desa Sebelum Pembentukan Panitia Pilkades

Skor	Alternative Jawaban	Frek	Persentase
1	Tidak pernah	3	1,7
2	Kadang-kadang	24	13,7
3	Sering	60	34,3
4	Selalu	88	50,3
	Total	175	100,0

Sumber : Kuisisioner no. 2

Hasil penelitian dalam tabel 4.7 menunjukkan bahwa sebanyak 50,3% menyatakan bahwa responden selalu dilakukan rapat musyawarah desa sebelum membentuk panitia pilkades, sedangkan sebanyak 1,7% menyatakan tidak pernah dilibatkan. Dengan demikian keterlibatan masyarakat sebagian besar di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang dalam proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sangat baik.

b. Panitia Pemilihan Kepala Desa bekerja dengan baik dan jujur

Kelancaran proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang diantaranya sangat dipengaruhi oleh hasil kerja panitia, namun apakah panitia telah melaksanakan tugas dengan baik dapat dilihat pada tabel 2.3 dibawah.

Tabel 4.8

Tingkat Kejujuran Dan Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa

Skor	Alternative Jawaban	Frek	Presentase
1	Tidak pernah	2	1,1
2	Kadang-kadang	49	28,0
3	Sering	57	32,6
4	Selalu	67	38,3
	Total	175	100,0

Sumber : kuisioner no. 3

Hasil penelitian terhadap kerja panitia pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang pada tabel 4.8 diatas menunjukkan sebanyak 70,9% jawaban responden menyatakan bahwa panitia telah bekerja dengan baik dan jujur, sehingga asumsi yang menganggap bahwa panitia tidak dapat bekerja dengan baik dan tidak netral ditepis oleh kenyataan dilapangan. Karena hanya 1,1% yang menyatakan panitia tidak bekerja dengan baik dan jujur.

Tabel 4.9

Sikap Masyarakat Terhadap Ketidak Beresan Kerja Panitia

Skor	Alternative Jawaban	Frek	Persentase
1	Tidak berani	1	0,6
2	Kurang berani	63	36,0
3	Berani	83	47,4
4	Sangat berani	28	16,0
	Total	175	100,0

Sumber : Kuisioner no. 4

Dari asumsi semula menyatakan bahwa pencalonan Kepala Desa condong kurang demokratis, karena dalam pembentukan panitia tidak dibicarakan secara terbuka kepada warga desa, serta sering terjadi penekanan-penekanan pihak tertentu terhadap warga desa/ pemilih. Namun pada kenyataannya

dapat dilihat pada tabel 4.9 diatas yang menunjukkan sebanyak : 47,4 % responden menyatakan berani memprotes ketidak beresan panitia, ini artinya kenyataan lapangan menyatakan bahwa penjangkaran calon Kepala Desa berjalan dengan baik (demokratis) sebab responden yang memberi pernyataan negatif (tidak berani memprotes panitia) hanya 0,6%.

c. Calon Kades adalah penduduk desa atau putra desa

Dalam rangka untuk mengetahui pendapat warga desa tentang asal calon Kepala Desa, apakah didominasi orang yang dilahirkan di desa tersebut atau diperbolehkan orang yang lahir dari desa lain kemudian menjadi penduduk desa yang bersangkutan. Datanya dapat dilihat dari Hasil penelitian sebagaimana tersebut pada tabel 4.10 yang menunjukkan bahwa sebanyak 73,7% responden menjawab pemilihan Kepala Desa di wilayah Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang selalu di ikuti oleh calon dari desa setempat (penduduk desa), dan sebanyak 4,6% menyatakan calon kades Kadang-kadang diikuti oleh penduduk setempat.

Tabel 4.10

Calon Kepala Desa Berasal Dari Penduduk Setempat.

Skor	Alternative Jawaban	Frek	Persentase
1	Tidak pernah	0	0,0
2	Kadang-kadang	8	4,6
3	Sering	38	21,7
4	Selalu	129	73,7
	Total	175	100,0

Sumber : Kuisisioner no. 5

Tabel 4.11

Calon Kepala Desa Berasal Dari Putra Desa

Skor	Alternative Jawaban	Frek	Presentase
1	Sangat setuju	6	3,4
2	Setuju	33	18,9
3	Kurang setuju	69	39,4
4	Tidak setuju	67	38,3
	Total	175	100,0

Sumber : Kuisisioner no. 6

Calon Kepala Desa sebaiknya dari putra desa atau bukan berasal dari putra desa dapat dilihat dari hasil penelitian. Data tabel 4. 11 menunjukkan bahwa responden menjawab 39,4% kurang setuju apabila hanya diikuti oleh putra desa saja, sebanyak 38,3% responden menjawab tidak setuju apabila hanya diikuti oleh putra desa saja. Ini berarti masyarakat di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang sudah sangat demokratis, terbuka dan meninggalkan tradisi lama yang menganggap bahwa hanya orang yang dilahirkan di desa tersebut saja yang boleh memimpin desanya.

Tabel : 4. 12

Frekuensi Jawaban Responden Tentang Variabel Penjaringan Cakades

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	1	,6	,6	,6
	2	31	17,7	17,7	18,3
	3	89	50,9	50,9	69,1
	4	54	30,9	30,9	100,0
	Total	175	100,0	100,0	

Sumber : Tabel Tunggal Kesimpulan Variabel Penjaringan Calon Kades

Dari asumsi semula menyatakan bahwa penjangkaran calon Kepala Desa kurang demokratis, karena dalam pembentukan panitia sering tidak dibicarakan secara terbuka kepada warga desa, terjadinya penekanan-penekanan dari kelompok tertentu serta calon Kepala Desa cenderung hanya berasal dari putra desa. Namun kenyataannya dari hasil penelitian pada tabel 4.12 menunjukkan bahwa sebanyak 50,9% responden menjawab pernyataan dengan skor 3, artinya kenyataan lapangan menunjukkan bahwa penjangkaran calon Kepala Desa berjalan dengan baik (demokratis), karena responden yang memberi pernyataan negatif (dengan skor 1) hanya 0,6%.

2. Kampanye Calon Kepala Desa

Kampanye calon Kepala Desa adalah merupakan sarana untuk mendapatkan dukungan dari warga desa dengan menyampaikan rencana kerja ataupun pengharapan-pengharapan yang diberikan kepada warga desa oleh calon Kepala Desa. Indikator kampanye calon Kepala Desa adalah kampanye dilaksanakan sesuai aturan, kampanye berjalan dengan tertib, serta dilaksanakan dengan menyampaikan visi, misi dan program kerja.

a. Kampanye dilaksanakan sesuai dengan aturan

Untuk mendapatkan dukungan dapat dilakukan oleh seorang Kepala Desa dengan berbagai cara, baik melakukan kunjungan rumah warga desa ataupun melakukan orasi untuk mencari simpati masyarakat, namun apakah mencari dukungan warga desa diperlukan kampanye atau tidak dapat dilihat pada tabel 4.13 dibawah :

Tabel 4. 13

Kampanye Guna Mencari Dukungan Masyarakat (Pemilih)

Skor	Alternative Jawaban	Frek	Persentase
1	Tidak perlu	1	,6
2	Kadang-kadang	53	30,3
3	Perlu	115	65,7
4	Sangat perlu	6	3,4
	Total	175	100,0

Sumber : Kuisisioner no. 7

Dalam proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dari dulu hingga kini orang selalu melaksanakan kampanye untuk mendapatkan dukungan masyarakat, namun apakah kampanye berpengaruh langsung dengan proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan diperlukan ?. Data dalam tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak 65,7% menjawab calon Kepala Desa perlu kampanye, Oleh karena sebagian besar responden menyatakan bahwa kampanye diperlukan, maka agar berhasil menjadi Kepala Desa setiap calon Kepala Desa diharapkan dapat melaksanakan kampanye, walaupun tanpa kampanye pun proses pemilihan Kepala Desa dapat berjalan (sesuai dengan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Gilis).

Tabel 4. 14

Pelaksanaan Kampanye

Skor	Alternative Jawaban	Frek	Persentase
1	Tidak sesuai ketentuan	15	8,6
2	Kadang-kadang sesuai ketentuan	76	43,4
3	Sering sesuai ketentuan	77	44,0
4	Selalu sesuai ketentuan	7	4,0
	Total	175	100,0

Sumber : Kuisisioner no. 8

Karena sering terjadi keributan dalam pelaksanaan kampanye, maka dapat diasumsikan bahwa setiap melakukan kampanye terjadi pelanggaran ketentuan. Namun apakah asumsi itu selalu benar ?. Hasil penelitian menyatakan bahwa sebanyak 44% responden menyatakan pelaksanaan kampanye sering sesuai dengan ketentuan, dan hanya 8,6% responden yang menjawab tidak sesuai ketentuan. Dengan demikian agar pelaksanaan kampanye tetap dalam bingkai aturan yang berlaku diperlukan pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah setempat bersama masyarakat.

b. Kampanye calon Kepala Desa berjalan dengan tertib

Kemampuan seorang calon Kepala Desa untuk mendapatkan dukungan dari warga desa sangat bergantung dari bagaimana cara melakukan pendekatan untuk mencari simpati masyarakat. Apakah akan menggunakan cara-cara yang tidak etis (misalnya intimidasi dan politik uang) atau dengan menyusun program kerja.

Tabel 4. 15
Ketertiban Kampanye

Skor	Alternative Jawaban	Frek	Persentase
1	Tidak pernah tertib	0	0,0
2	Kadang-kadang saja tertib	72	41,1
3	Sering tertib	98	56,0
4	Selalu tertib	5	2,9
	Total	175	100,0

Sumber : Kuisisioner no. 9

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 56% responden menjawab sering tertib, sedangkan yang menyatakan Kadang-kadang saja tertib sebanyak 41,1%. Ini artinya di dalam pelaksanaan kampanye masih

diwarnai cara-cara yang kurang etis atau kurang terbuka, sehingga masih diperlukan kesadaran dari warga masyarakat di wilayah Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang untuk belajar berdemokrasi yang sehat.

Tabel 4. 16

Pengaruh Kampanye Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Skor	Alternative Jawaban	Frek	Persentase
1	Tidak berpengaruh	0	0,0
2	Kadang-kadang berpengaruh	69	39,4
3	Berpengaruh (sering)	97	55,4
4	Sangat berpengaruh (selalu)	9	5,1
	Total	175	100,0

Sumber : Kuisisioner no. 10

hasil penelitian dalam tabel 4.16 diatas menunjukkan pengaruh kampanye terhadap kelancaran pemilihan Kepala Desa yaitu sebesar 55,4% responden menjawab bahwa ketertiban kampanye berpengaruh pada kelancaran pilkades. Dengan demikian walaupun ada indikasi bahwa kampanye tidak banyak berpengaruh terhadap proses pelaksanaan pilkades, namun apabila pelaksanaannya mengganggu ketertiban, maka dengan sendirinya berakibat terhadap kelancaran pelaksanaan pilkades.

- c. Kampanye Kepala Desa dilaksanakan dengan menyampaikan misi dan program kerja.

Kampanye dengan menyampaikan misi dan program kerja adalah suatu cara mencari dukungan yang paling baik, disamping lebih demokratis juga menawarkan pilihan kepada warga desa. Warga desa yang mempunyai hak pilih cocok dengan program kerja calon Kepala Desa tertentu sesuai

dengan kehendak warga desa, maka akan lebih banyak mendapatkan dukungan. Dengan demikian sebaliknya apabila calon Kepala Desa mempunyai program tidak sesuai dengan kehendak masyarakat, maka calon Kepala Desa tersebut akan ditinggalkan oleh masyarakatnya.

Tabel 4. 17

Visi Dan Misi Calon Kepala Desa

Skor	Alternative Jawaban	Frek	Presentase
1	Tidak pernah	30	17,1
2	Kadang-kadang	74	42,3
3	Sering	71	40,6
4	Selalu	0	0,0
	Total	175	100,0

Sumber : Kuisioner no. 11

Sebagai calon Kepala Desa program kerja lima tahunan akan menjadi acuan pembangunan pada saat menduduki jabatan. Data hasil penelitian pada tabel 4.17 diatas menunjukkan bahwa 42,3% menjawab tidak selalu/kadang-kadang, yang menjawab sering sebesar 40,6%, dan 17,1% menyatakan tidak pernah membuat visi dan misi. Itu artinya bahwa para calon kepala desa di wilayah Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang banyak yang menyampaikan visi dan misinya apabila dia terpilih menjadi kepala desa.

Tabel 4. 18

Program Kerja Calon Kepala Desa Sesuai Aspirasi Warga Desa

Skor	Alternative Jawaban	Frek	Persentase
1	Tidak pernah	15	8,6
2	Kadang-kadang	91	52,0
3	Sering	61	34,9
4	Selalu	8	4,6
	Total	175	100,0

Sumber : Kuisioner no. 12

Untuk mengetahui kebenaran apakah program kerja yang dibuat oleh calon Kepala Desa telah memperhatikan aspirasi masyarakat atau berdasarkan ide pribadi calon, maka dapat dilihat pada tabel 4.16 yang merupakan hasil penelitian. Data tersebut menunjukkan bahwa 52% menjawab kadang-kadang sesuai aspirasi masyarakat, sedangkan yang menyatakan sesuai. Ini artinya dibanding dengan program kerja yang tidak memperhatikan aspirasi warga desa, masih lebih banyak bahwa program kerja calon Kepala Desa yang disampaikan sesuai dengan aspirasi warga desa, walaupun sebagian merupakan ide calon.

Tabel 4. 19

Frekuensi Jawaban Responden Tentang Kampanye Calon Kepala Desa

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	107	61,1	61,1	61,1
	3	68	38,9	38,9	100,0
	Total	175	100,0	100,0	

Sumber : Tabel Tunggal Kesimpulan Variabel Kampanye

Permasalahan semula menyatakan bahwa kampanye calon kepala desa sering melanggar peraturan dan kurang kesadaran dalam berdemokrasi karena diasumsikan bahwa pelaksanaan kampanye sering tidak tertib. Hal itu ternyata dapat dibuktikan dalam penelitian lapangan sebagaimana data pada tabel 4.19 adalah sebagai berikut : sebanyak 61,1% responden menyatakan kadang-kadang tertib (skor 2) atau dapat dimaknai bahwa kampanye kadang-kadang melanggar ketentuan, hanya sebanyak 38,9% responden menyatakan sering sesuai ketentuan. Dengan demikian permasalahan kampanye dalam penelitian lapangan terbukti.

3. Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pemungutan dan penghitungan suara merupakan peristiwa yang paling menentukan apakah calon terpilih sebagai kades ataupun gagal berdasarkan suara yang diberikan warga desa yang mempunyai hak pilih kepada calon Kepala Desa. Indikator-indikator dalam hal ini adalah kondisi TPS baik dan aman, pemungutan suara dilaksanakan dengan aman, tertib dan lancar, perhitungan suara dilaksanakan secara terbuka dan jujur.

a. Kondisi TPS baik dan aman

Tempat Pemungutan Suara (TPS) adalah merupakan sarana yang demokratis dimana warga desa dapat menggunakan suaranya dengan langsung umum bebas dan rahasia (LUBER). Sehingga diharapkan TPS memiliki kondisi yang layak aman sebagaimana harapan semua pihak.

Tabel 4. 20

Kondisi Tempat Pemungutan Suara

Skor	Alternative Jawaban	Frek	Presentase
1	Tidak sesuai	4	2,3
2	Kadang-kadang sesuai	16	9,1
3	Sesuai	140	80,0
4	Sangat sesuai	15	8,6
	Total	175	100,0

Sumber : Kuisisioner no. 13

Asumsi semula menganggap bahwa TPS dibuat tidak dapat menjaga keamanan dalam pemungutan suara. Namun hasil penelitian tentang kondisi tempat pemungutan suara pada tabel 4.20 menunjukkan bahwa sebanyak 80% menyatakan telah sesuai dengan ketentuan. Hal ini menunjukkan

bahwa secara umum kondisi TPS sebagai sarana pemungutan suara pada pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang telah sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal ini dapat diartikan bahwa masyarakat telah merasa aman, walaupun kelihatannya TPS dibuat sangat sederhana namun masyarakat cukup memaklumi.

Tabel 4. 21

Kondisi TPS Sebagai Sarana Penyampaian Aspirasi Dan Jaminan
Kerahasiaannya

Skor	Alternative Jawaban	Frek	Persentase
1	Tidak memenuhi syarat	0	0,0
2	Kurang memenuhi syarat	5	2,9
3	Cukup memenuhi syarat	58	33,1
4	Memenuhi syarat	112	64,0
	Total	175	100,0

Sumber : Kuisisioner no. 14

Kasus sandal jepit yang ditulis di depan dan benar-benar terjadi pada pelaksanaan pilkades, oleh masyarakat tidak dimaknai sebagai pelanggaran karena pada saat mencoblos di dalam bilik suara yang terlihat dari luar hanya kakinya saja, sedangkan pada bagian atasnya tertutup. Hal ini terbukti dari hasil penelitian pada tabel 4.21 menunjukkan bahwa jawaban responden sebanyak 64% menyatakan TPS memenuhi syarat dalam menjamin kerahasiaan. Hal ini berarti bahwa TPS sebagai sarana penyampaian aspirasi pemilih pada pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang secara umum telah memenuhi syarat dan dapat dijaga kerahasiaannya.

b. Pemungutan suara dilaksanakan aman, tertib dan lancar

Keberhasilan dari pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ditentukan oleh situasi yang kondusif, demikian juga ketertiban dalam menggunakan hal pilih masing-masing orang di tempat pengutan suara juga sangat diperlukan agar tetap menjaga kelancaran pemungutan suara. Tabel dibawah menunjukkan apakah pelaksanaan pemungutan suara lancar atau sebaliknya.

Tabel 4. 22

Pemungutan Suara Berjalan Aman Tertib Dan Lancar

Skor	Alternative Jawaban	Frek	Persentase
1	Tidak pernah	0	0,0
2	Kadang-kadang	15	8,6
3	Sering	63	36,0
4	Selalu	97	55,4
	Total	175	100,0

Sumber : Kuisisioner no. 15

Pada tahapan ini sangat memiliki kontribusi yang besar terhadap keberhasilan proses pelaksanaan pilkades , lancar dan tidaknya pelaksanaan pilkades sangat ditentukan oleh pemungutan suara. Namun bagaimana pelaksanaan pemungutan suara di Kecamatan Sarang. Hasil penelitian pada tabel 4.22 diatas menunjukkan bahwa sebanyak 55,4% responden menyatakan selalu berjalan tertib dan lancar. Hal ini berarti bahwa pada umumnya pelaksanaan pemungutan suara di Kecamatan Sarang berjalan dengan aman, tertib dan lancar.

Tabel 4. 23

Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilihnya Apakah
Mendapat Tekanan Dari Kelompok Tertentu

Skor	Alternative Jawaban	Frek	Persentase
1	Selalu mendapat tekanan	3	1,7
2	Sering mendapat tekanan	34	19,4
3	Kadang-kadang	85	48,6
4	Tidak pernah	53	30,3
	Total	175	100,0

Sumber : Kuisioner no. 16

Untuk mengetahui apakah proses demokrasi dalam memilih pemimpin desa diwarnai dengan kecurangan-kecurangan. Ini dapat dilihat dari hasil penelitian pada tabel 4. 23 yang menunjukkan bahwa sebanyak 48,6% responden menyatakan kadang-kadang mendapat tekanan, sedangkan 30% menyatakan tidak pernah mendapat tekanan, 19,4% menyatakan sering mendapat tekanan dari kelompok-kelompok tertentu. Kemudian yang menjawab selalu mendapat tekanan sebanyak 1,7% atau 3 orang dari 175 orang responden. Hal ini berarti dalam menggunakan hak pilihnya seorang pemilih di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang masih sebagian kelompok masyarakat melakukan penekanan kepada seseorang untuk mendukung calon Kepala Desa tertentu.

c. Pelaksanaan Perhitungan Suara Dilaksanakan Secara Terbuka dan Jujur

Guna tetap menjaga keterbukaan diantara para calon Kepala Desa dan panitia pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang dalam hal menghitung perolehan suara masing-masing calon, maka kejujuran panitia pemilihan Kepala Desa sangat diharapkan oleh

masyarakat agar pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dapat berjalan dengan lancar.

Tabel 4. 24

Pelaksanaan Penghitungan Suara Dilakukan Dihadapan Masyarakat Dan Pihak Berkepentingan.

Skor	Alternative Jawaban	Frek	Persentase
1	Tidak pernah	0	0,0
2	Kadang-kadang	2	1,1
3	Sering	28	16,0
4	Selalu	145	82,9
	Total	175	100,0

Sumber : Kuisisioner no. 17

Guna tetap menjaga demokrasi desa, maka keterbukaan proses perhitungan suara harus tetap dilakukan oleh panitia. Hal ini apakah telah dilakukan oleh panitia dalam proses perhitungan suara di Kecamatan Sarang. Data hasil penelitian sebagaimana tersebut dalam tabel 4.24 diatas menunjukkan bahwa sebanyak 82,9% responden menyatakan proses perhitungan suara selalu dihadapan masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan demikian ternyata kehidupan demokrasi di Kecamatan Sarang telah berjalan dengan baik, hal ini terbukti dari hasil penelitian tersebut diatas.

Tabel 4.25

Pelaksanaan Penghitungan Suara Perlu Pengawasan Dari Masyarakat
Dan Panitia Pengawas Dari Kabupaten

Skor	Alternative Jawaban	Frek	Persentase
1	Tidak perlu	3	1,7
2	Cukup perlu	10	5,7
3	Perlu	49	28,0
4	Sangat perlu	113	64,6
	Total	175	100,0

Sumber : Kuisioner no. 18

Untuk menjaga netralitas panitia dan kebenaran hasil perhitungan suara diperlukan pengawasan yang baik dari masyarakat dan atau dari tim pengawas Kabupaten. Bagaimana pendapat masyarakat tentang pengawasan pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Sarang. Data hasil penelitian yang terkumpul mengenai pengawasan tersebut adalah sebanyak 64,6% responden menjawab sangat perlu, dan hanya sebesar 1,7% yang menjawab tidak perlu. Hal ini berarti bahwa agar dalam melakukan penghitungan suara oleh panitia tetap terjaga kebenaran dan kejujurannya, maka masih diperlukan pengawasan baik dari masyarakat maupun dari panitia pengawas Kabupaten Rembang

Tabel 4. 26

Frekuensi Jawaban Responden Tentang Pemungutan Perhitungan Suara.

		frequency	percent	valid percent	cumulative percent
Valid	2	6	3,4	3,4	3,4
	3	76	43,4	43,4	46,9
	4	93	53,1	53,1	100,0
	Total	175	100,0	100,0	

Sumber : Tabel Tunggal Kesimpulan Variabel Pemungutan dan Perhitungan Suara

Asumsi semula sering terjadi kecurangan dalam variabel pemungutan dan perhitungan suara karena kurang pengawasan. Namun hasil penelitian pada tabel 4.26 menunjukkan bahwa sebanyak 53,1% responden menjawab dengan pernyataan yang positif/mendukung, artinya sebagian besar responden menjawab tidak ada penekanan dari kelompok tertentu dalam pemungutan suara dan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara juga berjalan tertib, dan hanya sebanyak 3,4% yang menjawab dengan pernyataan negatif/tidak mendukung. Dengan demikian dari hasil penelitian lapangan, asumsi terjadi kecurangan dalam pemungutan suara tidak terbukti.

4. Pengumuman dan Penetapan Calon Terpilih.

Pengumuman dan penetapan calon terpilih adalah merupakan hal penting dalam proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, karena agar calon yang telah mendapat suara terbanyak diketahui masyarakat dan juga mendapatkan pengakuan dari panitia pemilihan Kepala Desa. Indikator-indikatornya adalah pengumuman dilaksanakan sesaat setelah rapat penghitungan suara. Penetapan calon terpilih berdasarkan hasil rapat, serta penetapan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak.

a. Pengumuman Dilaksanakan Sesaat Setelah Rapat Penghitungan Suara.

Setelah perhitungan suara dilakukan oleh panitia yang disaksikan oleh saksi dari para calon maupun masyarakat setempat,

maka panitia melakukan rapat untuk membahas hasil perhitungan suara, dan segera diumumkan kepada masyarakat desa setempat.

Tabel 4. 27

Perolehan Suara Pemilihan Kepala Desa Diumumkan
Sesaat Setelah Perhitungan Suara Selesai

Skor	Alternative Jawaban	Frek	Presentase
1	Tidak pernah	0	0,0
2	Kadang-kadang	10	5,7
3	Sering	27	15,4
4	Selalu	138	78,9
	Total	175	100,0

Sumber : Kuisisioner no. 19

Data hasil penelitian menunjukkan bahwa 78,9% responden menjawab selalu diumumkan sesaat setelah perhitungan suara selesai, Ini artinya bahwa selama dilaksanakan pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Sarang belum pernah menunda pengumuman hasil perolehan suara. Dengan demikian secara umum setiap dilaksanakan pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang panitia mengumumkan hasil perolehan suara di depan para pemilih dan masyarakat desa setempat.

Tabel 4. 28

Anggapan Masyarakat Terhadap Panitia Yang Tidak Mengumumkan
Hasil Perolehan Suara

Skor	Alternative Jawaban	Frek	Persentase
1	Tidak melanggar	3	1,7
2	Cukup melanggar	4	2,3
3	Melanggar	71	40,6
4	Sangat melanggar	97	55,4
	Total	175	100,0

Sumber : Kuisisioner no. 20

Untuk mengetahui apakah panitia yang tidak mengumumkan hasil perolehan suara merupakan pelanggaran atau tidak dapat dilihat dari hasil penelitian, sebagaimana pada tabel 4. 28 diatas adalah sebagai berikut : sebanyak 55,4% responden menyatakan sangat melanggar peraturan ataupun tradisi yang berlaku di desa. 40,6% menjawab melanggar. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat desa telah mempunyai kesadaran yang cukup tinggi tentang arti pentingnya keterbukaan dan demokrasi.

b. Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Berdasarkan Rapat Panitia.

Rapat panitia dilakukan agar para anggota panitia dapat saling memberikan informasi tentang keabsahan suara yang diperoleh calon Kepala Desa. Demikian juga panitia akan mengatakan pendapatnya berdasarkan realita kemudian menyiapkan administrasi sebagai data pendukung perolehan suara, serta akan ditetapkan sebagai pemenang dalam pemilihan Kepala Desa.

Tabel 4. 29

Penetapan Calon Terpilih Berdasarkan Hasil Rapat Panitia

Skor	Alternative Jawaban	Frek	Persentase
1	Tidak pernah	7	4,0
2	Kadang-kadang	5	2,9
3	Sering	61	34,9
4	Selalu	102	58,3
	Total	175	100,0

Sumber : Kuisisioner no. 21

Anggapan semula dikatakan bahwa salah satu kekurangan kerja panitia adalah menetapkan calon terpilih tidak didahului dengan rapat,

namun hanya berdasarkan suara terbanyak saja. Ternyata hasil penelitian menyatakan lain, hal ini terbukti pada tabel 4.29 diatas menunjukkan sebanyak 58,3% responden menjawab dengan pernyataan menjawab bahwa penetapan calon terpilih selalu didahului dengan rapat panita, sedangkan 34,9% menyatakan sering. Kondisi ini menepis permasalahan yang ada, dan ini berarti bahwa penetapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang dilaksanakan setelah rapat panitia dilaksanakan.

Tabel 4. 30

Apakah Terjadi Pengumuman Calon Terpilih Dibatalkan Karena
Tekanan Tokoh Masyarakat

Skor	Alternative Jawaban	Frek	Presentase
1	Selalu terjadi	2	1,1
2	Sering terjadi	11	6,3
3	Kadang-kadang terjadi	36	20,6
4	Tidak pernah	126	72,0
	Total	175	100,0

Sumber : Kuisisioner no. 22

Untuk mengetahui apakah kerja panitia telah berjalan dengan baik dan proses demokrasi telah ternoda atau tidak dapat dilihat pada hasil penelitian yang tersebut dalam tabel 4. 30, yang menunjukkan sebanyak 72% responden menjawab dengan pernyataan tidak pernah di tekan oleh tokoh sehingga membetalkan pengumuman. Sedangkan yang menjawab sering terjadi hanya 6,3%. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum panitia tidak pernah di tekan oleh kelompok tertentu dalam mengumumkan calon Kepala Desa terpilih. Dengan demikian

pelaksanaan pemilihan Kepala Desa berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan masyarakat.

c. Penetapan Calon Terpilih Berdasarkan Suara Terbanyak

Berdasarkan adat dan kebiasaan / tradisi pemilihan Kepala Desa yang telah berlangsung sejak lama di pedesaan maupun berdasarkan peraturan yang berlaku menyatakan bahwa calon terpilih adalah calon Kepala Desa yang mendapatkan dukungan suara terbanyak. Sebagaimana tertuang dalam tabel penelitian di bawah ini.

Tabel 4. 31

Penetapan Calon Terpilih Berdasarkan Suara Terbanyak

Skor	Alternative Jawaban	Frek	Persentase
1	Tidak pernah	0	0,0
2	Kadang-kadang	0	0,0
3	Sering	11	6,3
4	Selalu	164	93,7
	Total	175	100,0

Sumber : Kuisioner no. 23

Hasil penelitian yang terdapat pada tabel 4.31 menunjukkan 93,7% responden menjawab dengan pernyataan bahwa penetapan calon terpilih selalu berdasarkan perolehan suara terbanyak. Ini berarti bahwa tradisi pemilihan Kepala Desa yang telah berjalan turun temurun tetap terpelihara dengan baik bahwa Kepala Desa terpilih adalah Kepala Desa yang mendapatkan dukungan terbanyak dari warga desa setempat.

Tabel 4. 32

BPD Menetapkan Calon Terpilih

Skor	Alternative Jawaban	Frek	Persentase
1	Tidak diperlukan	4	2,3
2	Cukup diperlukan	8	4,6
3	Diperlukan	67	38,3
4	Sangat diperlukan	96	54,9
	Total	175	100,0

Sumber : Kuisisioner no. 24

Dari hasil penelitian apakah kades terpilih perlu mendapatkan penetapan dari BPD atau tidak dapat dilihat pada tabel 4. 32 tersebut di atas, yaitu sebanyak 54,9% responden menjawab dengan pernyataan sangat diperlukan, 38,3% menjawab diperlukan penetapan dari BPD, dengan demikian masyarakat telah memberikan kepercayaannya kepada BPD, serta menganggap bahwa BPD telah berperan dalam proses demokrasi di desa. Hal ini berarti bahwa menurut warga desa calon Kepala Desayang terpilih masih diperlukan penetapan BPD, sebagai bukti keabsahan calon terpilih.

Tabel 4. 33

Frekuensi Jawaban Responden Tentang Pengumuman
Dan Penetapan Calon Terpilih.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	41	23,4	23,4	23,4
	4	134	76,6	76,6	100,0
	Total	175	100,0	100,0	

Sumber: Tabel Tunggal Kesimpulan Variabel Pengumuman dan Penetapan Calon Terpilih

Variabel pengumuman dan penetapan calon terpilih diasumsikan cenderung kurang demokratis, ternyata berdasarkan hasil penelitian lapangan pada tabel 4.12 menunjukkan bahwa frekuensi tertinggi sebanyak 76,6% dengan jawaban positif / mendukung, dan hanya sebanyak 23,4% jawaban responden negatif/kurang mendukung. Ini artinya bahwa pelaksanaan pengumuman dan penetapan calon terpilih telah berjalan dengan terbuka dan demokratis. Dengan demikian hasil penelitian menepis asumsi bahwa pengumuman dan penetapan calon terpilih cenderung kurang demokratis.

5. Pengesahan dan Pelantikan Calon Terpilih

Agar calon yang telah mendapat dukungan suara terbanyak ditetapkan oleh Badan Perwakilan Desa, maka untuk mendapatkan legitimasi di perlukan pengesahan dan pelantikan. Indikator-indikator hal tersebut adalah sebagai berikut: pengesahan dan pelantikan dilakukan oleh Bupati, Kepala Desa dipilih secara demokratis, Kepala Desa terpilih mengikuti pelatihan/pembekalan tugas-tugas kepala desa.

a. Pengesahan Dan Pelantikan Dilakukan Oleh Bupati

Untuk mengetahui apakah seorang calon terpilih dapat menduduki jabatan sebagai Kepala Desa atau tidak diperlukan pengesahan secara formal dari lembaga Pemerintah Kabupaten, penelitian menunjukkan hasil sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4. 34

Pengaruh Pengesahan Bupati Terhadap Calon Terpilih

Skor	Alternative Jawaban	Frek	Persentase
1	Tidak menentukan	2	1,1
2	Kurang menentukan	13	7,4
3	Menentukan	66	37,7
4	Sangat menentukan	94	53,7
	Total	175	100,0

Sumber : Kuisisioner no. 25

Pengesahan Bupati sangat mempengaruhi seorang calon terpilih dapat menduduki jabatan sebagai Kepala Desa atau tidak, Hal ini dapat dilihat dari jawaban responden dalam tabel 4. 34 yang menunjukkan bahwa 53,7% menyatakan sangat menentukan. dan hanya sebanyak 1,1% responden yang menjawab tidak menentukan. Hal ini menunjukkan bahwa di era otonomi desa seperti ini pengaruh Pemerintah Kabupaten masih dibutuhkan oleh masyarakat desa, demikian juga kesadaran hukum masyarakat cukup tinggi dalam mentaati segala peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten.

Tabel 4. 35

Kepala Desa Mengucapkan Sumpah Dan Janji Sebelum Menduduki Jabatan

Skor	Alternative Jawaban	Frek	Persentase
1	Tidak perlu	0	0,0
2	Cukup perlu	0	0,0
3	Perlu	46	26,3
4	Sangat perlu	129	73,7
	Total	175	100,0

Sumber : Kuisisioner no. 26

Karena jabatan Kepala Desa adalah merupakan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa dan sekaligus sebagai amanah dari masyarakat desa, maka untuk mempertanggung jawabkannya secara moral perlu mengangkat sumpah sebelum menjabat. Oleh karena mengemban amanah dari masyarakat, apakah masyarakat menganggap Kepala Desa sebelum menjabat perlu disumpah. Hasil penelitian pada tabel 4.35 menunjukkan bahwa sebanyak 73.7% responden menjawab dengan pernyataan sangat perlu dan sisanya sebanyak 26.3% menjawab perlu mengucapkan sumpah dan ianji terlebih dahulu sebelum Kepala Desa menduduki jabatannya.

b. Kepala Desa Terpilih Secara Demokratis

Ciri-ciri bahwa pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang berjalan secara demokratis adalah tidak terjadinya tekanan-tekanan dan pemaksaan kelompok-kelompok untuk mendukung calon tertentu. Warga desa yang telah mendapatkan hak pilih menggunakan haknya secara bebas dan rahasia serta dalam proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tidak diwarnai dengan kecurangan-kecurangan.

Tabel 4. 36

Kepala Desa Dipilih Secara Demokratis

Skor	Alternative Jawaban	Frek	Persentase
1	Tidak pernah	0	0,0
2	Kadang-kadang	18	10,3
3	Sering	65	37,1
4	Selalu	92	52,6
	Total	175	100,0

Sumber kuisisioner no 27

Asumsi semula mengatakan bahwa pemilihan Kepala Desa berjalan kurang demokratis, hal ini disinyalir terdapat tekanan kelompok tertentu terhadap para pemilih dan jual beli suara. Namun pada tabel 4. 36 menunjukkan bahwa jawaban dari responden sebanyak 52,6% menyatakan selalu demokratis, 37,1% sering demokratis. Hal ini dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang dilaksanakan secara umum demokratis, ini terbukti dari jawaban responden yang sebagian besar menjawab selalu demokratis.

Tabel 4. 37

Pemilihan Kepala Desa Di Desa Sering Di Warnai Tekanan Kelompok Tertentu

Skor	Alternative Jawaban	Frek	Presentase
1	Selalu	3	1,7
2	Sering	26	14,9
3	Kadang-kadang	78	44,6
4	Tidak pernah	68	38,9
	Total	175	100,0

Sumber kuisisioner no 28

Tingkat demokratis dapat diukur dari kebebasan pemilih untuk menentukan pilihannya tanpa paksaan dari siapapun, namun bagaimana hal itu dilakukan di Kecamatan Sarang. Data pada tabel 4. 37 diatas menunjukkan bahwa sebanyak 44,6% responden menjawab dengan pernyataan kadang-kadang, dan yang menjawab tidak pernah ditekan sebanyak 38,9%. Hal ini dapat di simpulkan bahwa pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang secara umum tidak di warnai

dengan tekanan-tekanan kelompok tertentu. Dengan demikian kehidupan demokrasi terpelihara dengan baik.

c. Kepala Desa terpilih mengikuti pelatihan/pembekalan tugas Kepala Desa

Agar dapat meningkatkan kualitas SDM bagi Kepala Desa terpilih di perlukan pembekalan pengetahuan teknis pemerintahan desa, sehingga di harapkan seorang Kepala Desa mampu memimpin masyarakatnya dengan lebih baik. Bimbingan teknis bidang pemerintahan desa sangat membantu bagi tugas-tugas diawal menjabat Kepala Desa. Namun apakah peningkatan pengetahuan teknis pemerintahan desa bagi Kepala Desa terpilih disetujui oleh masyarakat desa setempat, dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 4. 38

Pembekalan/Pelatihan Teknis Pemerintahan Desa bagi Kepala Desa yang baru dilantik demi kelancaran tugas

Skor	Alternative Jawaban	Frek	Persentase
1	Tidak perlu	0	0,0
2	Cukup perlu	8	4,6
3	Perlu	48	27,4
4	Sangat perlu	119	68,0
	Total	175	100,0

Sumber : kuisioner no 29

Seringkali calon Kepala Desa yang terpilih justru yang berpendidikan terbatas tetapi cukup berwibawa dan baik dimata masyarakat. Salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan Kepala Desa terpilih tersebut dengan memberikan bimbingan teknis. Namun apakah bimbingan

teknis tersebut efektif dan diperlukan oleh desa. Hasil penelitian di atas menunjukkan sebanyak 68% responden menjawab sangat perlu. Dengan demikian secara umum masyarakat desa sependapat apabila Kepala Desa yang baru dilantik mendapatkan bimbingan, pelatihan/pembekalan dari Pemerintah guna meningkatkan pengetahuan teknis di bidang pemerintahan desa.

Tabel 4. 39

Manfaat Pembekalan/ Pelatihan Terhadap Peningkatan Kemampuan Kades

Skor	Alternative Jawaban	Frek	Persentase
1	Tidak pernah	0	0,0
2	Kadang-kadang	61	34,9
3	Sering	79	45,1
4	Selalu	35	20,0
Total		175	100,0

Sumber : kuisisioner no 30

Asumsi Kepala Desa yang mengikuti pelatihan teknis pemerintahan akan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik mendapatkan dukungan dari responden. Hal ini dapat dilihat hasil penelitian pada tabel 4. 39 yang menunjukkan sebanyak 45,1% responden menyatakan sering mampu memimpin desanya dengan baik. Dengan demikian sebagian besar responden menganggap bahwa pelatihan teknis pemerintahan dapat meningkatkan kemampuan Kepala Desa dalam memimpin desa.

Tabel 4. 40

Frekuensi Jawaban Responden Tentang Pengesahan Dan Pelantikan Kades

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	89	50,9	50,9	50,9
	4	86	49,1	49,1	100,0
	Total	175	100,0	100,0	

Sumber : Tabel tunggal kesimpulan variabel pengesahan dan pelantikan

Variabel pengesahan dan pelantikan Kepala Desa diasumsikan sangat menentukan apakah calon Kepala Desa menduduki jabatan Kepala Desa atau tidak. Karena pengesahan dan pelantikan adalah merupakan bukti formal untuk mendapatkan legitimasi, maka prosedur ini sangat diperlukan. Sejalan dengan itu hasil penelitian pada tabel 4.40 menunjukkan bahwa sebanyak 49,1% responden menjawab dengan menyatakan sangat mendukung (skor 4) dan sisanya sebanyak 50,1% mendukung (skor 3). Dengan demikian pengesahan dan pelantikan Kepala Desa sangat diperlukan agar calon Kepala Desa dapat menduduki jabatan sebagai Kepala Desa.

6. Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa

Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang adalah merupakan implementasi kebijakan, khususnya kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No. 7 Tahun 2000. Apakah implementasi dapat berjalan dengan baik, sangat tergantung dari kebijakan serta kekuatan para pelaksana yaitu pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama

dalam melaksanakan amanat Perda tersebut. Guna mengetahui pendapat masyarakat dan peristiwa yang terjadi pada saat Perda No 7 Tahun 2000 dilaksanakan, maka menggunakan indikator sebagai berikut : pada umumnya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Sarang berjalan dengan aman, tertib dan lancar, pada umumnya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Sarang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada umumnya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Sarang diikuti oleh sebagian besar penduduk desa.

a. Pada Umumnya Pelaksanan Pemilihan Kepala Desa Di Kecamatan Sarang Berjalan Dengan Aman, Tertib Dan Lancar

Guna mengetahui apakah implementasi Perda No. 7 Tahun 2000 berjalan dengan aman, tertib dan lancar serta mendapat dukungan masyarakat pedesaan. Dalam pelaksanaannya kadang sebagian masyarakat merasa bahwa pilkades adalah merupakan peristiwa yang membuat warga desa merasa tidak aman, mencekam sehingga situasi ini dapat menghambat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa itu sendiri, Apakah anggapan itu benar, jawaban ada pada tabel dibawah.

Tabel 4. 41

Keamanan, Ketertiban dan Kelancaran Pemilihan Kepala Desa
di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang

Skor	Alternative Jawaban	Frek	Persentase
1	Tidak pernah	0	0,0
2	Kadang-kadang	23	13,1
3	Sering	59	33,7
4	Selalu	93	53,1
	Total	175	100,0

Sumber : Kuisisioner no. 31

Walaupun banyak permasalahan yang dihadapi pilkades di Kecamatan Sarang, namun secara umum ternyata kondisi aman dan lancar. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian pada tabel 4. 41 yang menunjukkan bahwa 53,1% responden menjawab dengan selalu aman, tertib dan lancar. Dengan demikian berarti dapat dikatakan bahwa secara umum pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Sarang berjalan seperti yang diharapkan masyarakat banyak yaitu aman, tertib dan lancar

Tabel 4. 42

Dukungan Warga Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Skor	Alternative Jawaban	Frek	Persentase
1	Rendah	3	1,7
2	Cukup tinggi	46	26,3
3	Tinggi	54	30,9
4	Sangat tinggi	72	41,1
	Total	175	100,0

Sumber : Kuisisioner no. 32

Benarkah masyarakat pedesaan telah mengenal kehidupan demokrasi dan apakah demokrasi di desa tumbuh subur sesuai dengan bergulirnya reformasi disegala bidang. Bagaimana respon masyarakat desa terhadap pergantian kepemimpinan desa yang dikemas dalam pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Sarang. Tabel 4.42 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 41,1% responden menyatakan dukungan masyarakat sangat tinggi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa besarnya dukungan masyarakat di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang pada setiap pelaksanaan pemilihan Kepala Desa menandakan bahwa proses demokrasi di desa telah berjalan dengan baik.

- b. Pada Umumnya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kecamatan Sarang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

Agar dapat mengetahui apakah pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang benar-benar sesuai dengan ketentuan perda atau ada penyimpangan-penyimpangan sebagai akibat pengaruh dari kehidupan sosial masyarakat serta situasi dan kondisi yang berkembang di pedesaan, tabel berikut memberikan jawaban.

Tabel 4. 43

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Sarang
Dan Tingkat Kesesuaian Terhadap Perda No 7 Tahun 2000

Skor	Alternative Jawaban	Frek	Persentase
1	Tidak sesuai	0	0,0
2	Kurang sesuai	26	14,9
3	Sesuai	129	73,7
4	Sangat sesuai	20	11,4
	Total	175	100,0

Sumber : Kuisisioner no. 33

Tahapan proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana variabel penelitian sesungguhnya adalah nilai-nilai masyarakat yang terkristalisasi sejak lama, yang kemudian sedikit demi sedikit diadopsi oleh Pemerintah dan dituangkan dalam aturan main pilkades. Apakah benar nilai-nilai tersebut diatas tetap ditaati oleh masyarakat desa pada saat diselenggarakan pilkades. Tabel diatas menunjukkan bahwa penelitian yang di dapat dari penyebaran kuisisioner memperoleh hasil sebanyak 73,7% responden menjawab dengan pernyataan bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Sarang telah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang secara umum telah sesuai dengan ketentuan Perda No 7 Tahun 2000 dan peraturan-peraturan pendukung lainnya.

Tabel 4. 44
Sosialisasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang

Skor	Alternative Jawaban	Frek	Persentase
1	Tidak pernah	0	0,0
2	Kadang-kadang	9	5,1
3	Sering	65	37,1
4	Selalu	101	57,7
Total		175	100,0

Sumber kuisisioner no 34

Agar masyarakat umum mengetahui rencana pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, maka biasanya Pemerintah memberikan penyuluhan tentang hal tersebut. Namun bagaimana sesungguhnya sosialisasi dilaksanakan di desa. Hal itu terjawab dari hasil penyebaran kuisisioner kepada responden dan hasilnya tertuang pada tabel 4. 44 yang menunjukkan sebanyak 57,7% responden menjawab dengan pernyataan selalu diadakan sosialisasi oleh pemerintah kepada masyarakat sebelum dilaksanakan pemilihan Kepala Desa, Dengan demikian berarti bahwa sebelum pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Pemerintah telah melakukan sosialisasi kepada warga desa tentang rencana pemilihan Kepala Desa.

- c. Pada umumnya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Sarang diikuti oleh sebagian besar penduduk desa.

Sebagaimana yang telah digariskan dalam ketentuan Perda No 7 Tahun 2000 bahwa untuk sahnya pemilihan Kepala Desa apabila dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ dari jumlah warga desa yang telah mempunyai hak pilih.

Tabel 4. 45

Masyarakat Desa menyambut Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Skor	Alternative Jawaban	Frek	Persentase
1	Tidak pernah	0	0,0
2	Kadang-kadang	11	6,3
3	Sering	50	28,6
4	Selalu	114	65,1
	Total	175	100,0

Sumber kuisioner no 35

Penelitian mengenai sikap warga desa terhadap pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang dapat dilihat dari hasil penelitian sebagai tersebut pada tabel 4.43 yaitu : 65,1% responden menjawab dengan pernyataan bahwa masyarakat desa selalu menyambut dengan baik setiap pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ,sedangkan masyarakat yang acuh terhadap pilkades hanya sebesar 6,3%.

Tabel 4. 46

Kesadaran Masyarakat Desa Dalam Menentukan Pemimpinnya

Skor	Alternative Jawaban	Frek	Persentase
1	Rendah	1	,6
2	Cukup tinggi	32	18,3
3	Tinggi	70	40,0
4	Sangat tinggi	72	41,1
	Total	175	100,0

Sumber kuisioner no 36

Tingkat kesadaran masyarakat desa di wilayah Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang dalam menentukan pimpinan desa dapat dilihat dari hasil penelitian pada tabel 4. 46 yang menunjukkan bahwa sebanyak 41,1% yang menyatakan kesadaran masyarakat sangat tinggi, 40% responden menjawab dengan pernyataan tinggi, Dengan demikian masyarakat desa telah menyadari bahwa setiap periode tertentu dilakukan pergantian kepemimpinan, dan sesuai dengan aturan masyarakat diajak secara bersama-sama menentukan pemimpinnya sendiri yang difasilitasi oleh Pemerintah. Masyarakat telah mempunyai kesadaran yang tinggi atas pelaksanaan pergantian kepemimpinan di desa.

Tabel 4. 47

Proses Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Skor	Alternative Jawaban	Frek	Presentase
1	Tidak lancar	0	0,0
2	Cukup lancar	4	2,3
3	Lancar	102	58,3
4	Sangat lancar	69	39,4
	Total	175	100,0

Sumber : Tabel tunggal kesimpulan variabel pelaksanaan pemilihan kepala desa

Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Sarang yang semula diasumsikan kurang demokratis, tidak tertib dan sering melanggar aturan ternyata hasil penelitian pada tabel 4.47 menunjukkan sebanyak 58,3% menyatakan bahwa pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang berjalan lancar. Sedangkan yang menyatakan tidak lancar/tidak tertib adalah 0%. Dengan demikian dapat disimpulkan

bahwa pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Sarang berjalan dengan aman, tertib dan lancar serta dengan kesadaran yang tinggi masyarakat mendukung kelancaran pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di masing-masing desa di wilayah Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang.

1. Korelasi Penjaringan Calon Kepala Desa dengan Proses Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Guna menguji hipotesis minor yang telah dinyatakan bahwa "ada hubungan antara penjaringan calon Kepala Desa dengan proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa", maka dilakukan uji korelasi antara variabel penjaringan calon Kepala Desa dengan variabel proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dengan metode *Rank Kendall* sebagaimana terdapat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.48

Korelasi antara Penjaringan Calon Kades dengan Proses Pelaksanaan Pilkades

		Value	Asymp. Std. Error(a)	Approx. T(b)	Approx. Sig.
Ordinal by Ordinal	Kendall's tau-b	,213	,073	2,888	,004
N of Valid Cases		175			

Sumber : Data Variabel X1 dengan Y diolah

Korelasi yang diperoleh antara penjaringan calon Kepala Desa dengan proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebesar 0,213, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa korelasi penjaringan Calon Kepala Desa dengan

proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terdapat korelasi yang positif dan signifikan tetapi dalam taraf lemah. Keberhasilan penjangkaran calon Kepala Desa diukur melalui : Panitia dibentuk secara demokratis, panitia bekerja dengan baik dan jujur, calon Kepala Desa penduduk desa atau putra desa.

2. Korelasi Kampanye Calon dengan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Variabel Kampanye memberikan gambaran apakah untuk mencari dukungan dari warga desa yang mempunyai hak pilih di perlukan melakukan kampanye, dan apakah variabel kampanye mempunyai hubungan atau pengaruh terhadap proses pemilihan Kepala Desa. Guna mengetahui, maka dilakukan uji korelasi sebagaimana tersebut dalam tabel berikut ;

Tabel 4.49

Korelasi Antara Kampanye Terhadap Proses Pelaksanaan Pilkadaes

		Value	Asymp. Std. Error(a)	Approx. T(b)	Approx. Sig.
Ordinal by Ordinal	Kendall's tau-b	,044	,076	,578	,563
N of Valid Cases		175			

Sumber data lapangan di olah (X_2 dengan Y)

Koefisien korelasi yang diproses antara variabel kampanye dengan proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebesar 0,044. dengan demikian tingkat korelasinya positif namun tarafnya rendah, karena skornya kurang dari 0,05. Demikian pula apabila di tes dengan signifikan dengan 5% maka skornya (0,563) masih lebih besar dari (0,05) kurang signifikan. Hal ini berarti

tingkat korelasi antara kampanye dengan proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dapat dikatakan ada hubungan positif dan signifikan dalam taraf yang lemah.

3. Korelasi antara pemungutan dan perhitungan suara dengan proses pelaksanaan pemilihan kepala desa

Variabel pemungutan dan perhitungan suara adalah merupakan variabel yang dominan dalam proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. Namun apakah mempunyai korelasi yang kuat, hal itu dapat dilihat dari hasil korelasi Kendall sebagaimana tabel di bawah ;

Tabel 4.50

Korelasi Antara Pemungutan Dan Perhitungan Suara
Dengan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

		Value	Asymp. Std. Error(a)	Approx. T(b)	Approx. Sig.
Ordinal by Ordinal	Kendall's tau-b	,289	,071	3,912	,000
N of Valid Cases		175			

Sumber data lapangan di olah (X_3 dengan Y)

Koefisien korelasi yang didapat antara pemungutan dan perhitungan suara dengan proses pelaksanaan pemilihan kepala desa adalah sebesar 0,289. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kedua variabel tersebut terdapat hubungan yang positif tetapi dalam taraf yang lemah. Sedangkan apabila diuji dengan signifikansi 1 % , maka hasilnya 0,000 atau sangat signifikan.

Kesimpulannya terdapat korelasi yang positif dan signifikan antara pemungutan dan perhitungan suara dengan proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang.

4. Korelasi pengumuman dan penetapan calon terpilih dengan proses pelaksanaan pilkades

Variabel pengumuman dan penetapan calon terpilih adalah salah satu variabel penelitian yang di prediksi berpengaruh terhadap proses pelaksanaan pemilihan kepala desa. Namun apakah benar, hal itu dapat dilihat dalam tabel hasil korelasi *Kendall* sebagai berikut

Tabel 4.51

Korelasi Antara Pengumuman Dan Penetapan Calon Terpilih
Dengan Proses Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

		Value	Asymp. Std. Error(a)	Approx. T(b)	Approx. Sig.
Ordinal by Ordinal	Kendall's tau-b	,195	,071	2,665	,008
N of Valid Cases		175			

Sumber data lapangan di olah (X_4 dengan Y)

Koefisien korelasi yang diperoleh antara pengumuman dan penetapan dengan proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa adalah sebesar 0,195, dengan demikian antara ke dua variabel tersebut ada hubungan yang positif. Dan bila di test dengan signifikansi 1%, maka ada hubungan yang signifikan. Dapat disimpulkan bahwa pemungutan dan penetapan calon terpilih dengan

proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terdapat hubungan yang positif dan signifikan.

5. Korelasi pengesahan dan pelantikan kepala desa

Variabel pengesahan dan pelantikan Kepala Desa terpilih di prediksi mempunyai pengaruh yang besar terhadap proses pelaksanaan pemilihan kepala Desa di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang. Kenyataan itu dapat di lihat pada tabel hasil korelasi *Kendall* berikut :

Tabel 4.52

Korelasi Antara Pengesahan Dan Pelantikan Kepala Desa Dengan Proses Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

		Value	Asymp. Std. Error(a)	Approx. T(b)	Approx. Sig.
Ordinal by Ordinal	Kendall's tau-b	,474	,063	7,360	,000
N of Valid Cases		175			

Sumber data lapangan di olah (X_5 dengan Y)

Koefisien korelasi yang di dapat antara pengesahan dan pelantikan dengan proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa adalah sebesar 0,474. Maka dapat disimpulkan bahwa antara kedua variabel tersbut ada hubungan yang positif tetapi dalam taraf yang lemah, namun apabila di test dengan signifikansi 1% dengan nilai (0,000) lebih kecil dari 0.001, maka tingkat signifikansinya Sangat tinggi. Dengan demikian korelasi antara pengesahan

dan pelantikan Kepala Desa dengan proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa adalah ada hubungan yang positif dan sangat signifikan.

6. Korelasi antara penjaringan (X_1), kampanye (X_2), pemungutan dan perhitungan suara (X_3), pengumuman dan penetapan calon terpilih (X_4), pengesahan dan pelantikan Kepala Desa (X_5) dengan proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa (Y)

Uji korelasi antara X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 , secara bersama-sama dengan Y (uji hipotesis asosiatif), menggunakan koefisien *Konkordinasi Kendall* (Kendall's W).

Tabel 4.53

Uji Korelasi Penjaringan, Kampanye, Pemungutan Dan Penghitungan Suara,
Pengumuman Dan Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Dan Pelantikan
Kepala Desa Dengan Proses Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Test Statistics	
N	175
Kendall's W(a)	,468
Chi-Square	409,543
Df	5
Asymp. Sig.	,000
a Kendall's Coefficient of Concordance	

Sumber data lapangan di olah

Dari hasil uji Kendall W sebagaimana tabel diatas adalah sebesar 0.468 menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang positif antara variabel bebas (penjaringan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, pengumuman dan penetapan calon terpilih, pengesahan dan pelantikan Kepala Desa) dengan

variabel tergantung (proses pelaksanaan pemilihan kepala desa) dengan taraf signifikansi 1%, hasilnya adalah (0,000) atau lebih kecil dari (0,001).

Dari uji hipotesis tersebut diatas menunjukkan H_0 ditolak. Dengan demikian terdapat pengaruh yang sangat signifikan dalam taraf yang kuat dari penjangkaran, kampanye, pemungutan dan perhitungan suara, pengumuman dan penetapan calon terpilih, pengesahan dan pelantikan terhadap pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang.

D. DISKUSI

Uji hipotesis minor dan hipotesis mayor dengan bantuan komputer program SPSS for Windows dapat dilihat dalam lampiran tabel silang dan hasil koreksi Kendall, yang menunjukkan adanya korelasi positif dan Signifikan antara penjangkaran calon Kepala Desa, kampanye calon Kepala Desa, pemungutan dan perhitungan suara, pengumuman dan penetapan calon terpilih, pengesahan dan pelantikan Kepala Desa dengan proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. Hal itu dapat dibuktikan dari hasil yang diperoleh masing-masing variabel tersebut yaitu sebesar 0,004 (X_1) 0,563 (X_2) 0,000 (X_3) 0,0008 (X_4), 0,000 (X_5). Kecuali X_2 semua variabel mempunyai nilai jauh dibawah 0,05 yang merupakan nilai signifikasi terendah yaitu signifikasi pada 95%. Sedangkan untuk X_2 dengan Y terdapat hubungan yang positif dalam taraf yang lemah serta tidak signifikan.

Sedangkan berdasarkan nilai koefisien korelasi untuk semua variabel memiliki nilai korelasi yang positif walaupun dalam taraf yang lemah. Itu berarti semakin tinggi nilai dari masing-masing variabel tersebut, maka akan semakin

tinggi pula nilai proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, demikian sebaliknya semakin rendah nilai masing-masing variabel akan semakin rendah pula nilai dari proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang. Dengan demikian dapat diasumsikan semakin baik implementasi kebijakan, khususnya implementasi kebijakan Perda Kabupaten Rembang No. 7 Tahun 2000, maka akan semakin baik pula sikap dan tanggapan masyarakat terhadap sistem pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang.

Hal itu sejalan dengan pendapat Mazmanian dan Paul A. Sebatier yang menjelaskan tentang makna implementasi yakni : kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha akibat/dampak pada masyarakat, atau kejadian-kejadian. Kemudian Van Meter dan Van Horn membatasi implementasi kebijakan sehingga tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) Pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

Teori tersebut menjadi pijakan dalam membahas implementasi Perda Kabupaten Rembang no. 7 Tahun 2000 yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) Pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

Berdasarkan asumsi kejadian-kejadian maupun tindakan-tindakan yang menurut tanggapan masyarakat kurang memberikan nilai positif, adalah kurangnya keterbukaan Pemerintahan Desa dalam membicarakan persiapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, khususnya dalam pembentukan kepanitiaan. Hal itu telah mendapatkan dukungan dari masyarakat desa dari hasil wawancara dengan Pak Jarno, umur 40 tahun, warga desa Temperak, pekerjaan wiraswasta, sebagai berikut:

Apakah Pak Jarno tahu bagaimana dulu pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa dilaksanakan di desa bapak ?

Jelaskan !

Jawaban responden (masyarakat):

“Secara umum saya sebenarnya kurang mengetahui, karena sejak awal dalam rapat pembentukan kepanitiaan kurang melibatkan masyarakat banyak. Saya orang kecil seperti ini jarang diundang rapat desa, biasanya yang diundang hanya beberapa orang tertentu, kemudian orang-orang itu langsung dijadikan panitia. Mestinya kalau Pemerintah Desa terbuka ya mengundang sebagian besar masyarakat, kalau undangan rapat dan yang hadir sedikit ya harus diulang lagi, sehingga benar-benar mengajak musyawarah masyarakatnya untuk memilih anggota panitia, yang diharapkan dapat mewakili semua unsur masyarakat. Walaupun dalam pembentukan panitia kurang terbuka , tetapi pada akhirnya orang kecil seperti saya ini mau menerima keputusan desa, karena sesungguhnya masyarakat desa telah menyerahkan kepercayaan kepada Badan Perwakilan Desa yang mewakili orang seperti saya ini, dan para perangkat desa lainnya. Mudah-mudahan kepercayaan masyarakat tidak disalahgunakan oleh wakil saya dan dapat menjalankan amanat dengan baik”.

Disamping jawaban responden diatas, disajikan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat desa temperak bernama Tasrikin , umur 45 tahun , pekerjaan sebagai guru madrasah, sebagai berikut:

Apakah Pak Tasrikin mengetahui bagaimana dulu pembentukan kepanitiaan pemilihan

Kepala Desa dilaksanakan di desa bapak ?, Jelaskan.

“Saya tahu persis bagaimana panitia dibentuk , sebab saya mendapatkan undangan dari desa dan ikut membicarakannya. Saya bersama-sama dengan masyarakat lainnya membahas rencana pencalonan Kepala Desa. Oleh karena sesuai dengan peraturan yang mempunyai kewenangan membentuk kepanitiaan adalah Badan Perwakilan Desa (BPD), maka setelah rapat musyawarah desa selesai dilaksanakan selanjutnya menyerahkan pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa kepada BPD. Kemudian BPD menentukan komposisi kepanitiaan antara masyarakat, perangkat desa dan anggota BPD berjumlah sembilan orang. Hasil pembentukan dilaporkan kepada pihak Pemerintah Desa untuk mendapatkan pengesahan dari Camat. Kalau menurut saya pembentukan panitia di desa saya cukup demokratis dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.

Gambar 4 – I

Rapat Pembentukan Kepanitiaan Pencalonan
Kepala Desa di Desa Temperak



Dari hasil wawancara tersebut diatas secara umum dapat disimpulkan bahwa walaupun dari kedua responden ada perbedaan jawaban, namun secara umum pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa cukup demokratis dan sesuai dengan ketentuan. Hal itu telah mendukung jawaban kuisioner pada variabel penjangkaran calon Kepala Desa sebagaimana terdapat pada tabel tunggal kesimpulan variabel penjangkaran calon Kepala Desa, yang menunjukkan 50,9 % menyatakan bahwa penjangkaran calon kepala Desa berjalan dengan baik (demokratis).

Kejadian-kejadian yang kurang mendapatkan respon dari masyarakat adalah dapat dilihat pada hasil penelitian yang menunjukkan angka koefisien korelasi variabel yang paling lemah dan tak signifikan adalah variabel kampanye yaitu 0,044 dan tingkat signifikansi adalah 0,563, hal ini berarti variabel kampanye memiliki hubungan yang positif tetapi dalam taraf lemah dan tidak signifikan. Guna membuktikan kesesuaian nilai koefisien korelasi dengan keadaan lapangan, maka didukung hasil wawancara dengan Pak Nawawi, tokoh masyarakat desa Gilis berusia 50 tahun, pekerjaan sebagai petani pada tanggal 15 Juni 2004, sebagai berikut :

Bagaimana kampanye calon Kepala Desa di desa Saudara dilakukan ? Jelaskan.

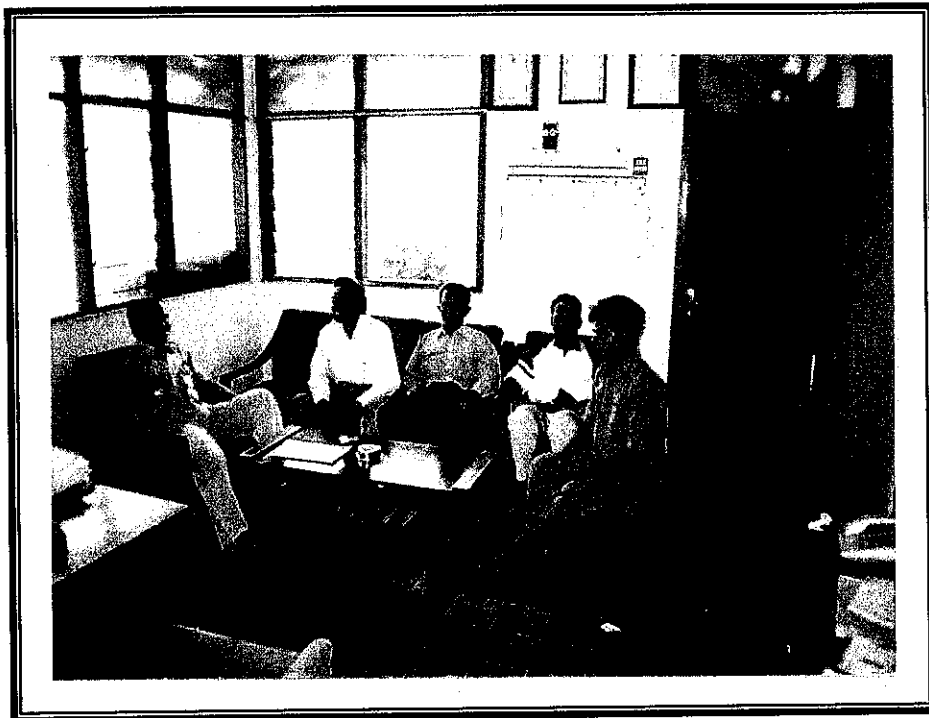
Jawaban Pak Nawawi adalah sebagai berikut :

“ Kampanye pemilihan Kepala Desa di desa biasanya melalui beberapa cara antara lain dengan mengundang warga desa untuk datang kerumah calon (istilahnya buka meja) sambil makan dan minum calon Kepala Desa meminta dukungan warga desa yang datang. Hal ini dilakukan kurang lebih

selama satu minggu menjelang pemungutan suara, lalu cara yang lain biasanya calon bersama suami/istri minta dukungan masyarakat dengan mendatangi dari rumah ke rumah (istilah jawa mlawang). Kemudian cara lain lagi seperti yang dianjurkan oleh Pemerintah dengan membuat program kerja, Visi, Misi yang disampaikan kepada warga desa sehari sebelum pemungutan suara. Namun menurut pendapat saya secara umum kampanye dalam pemilihan Kepala Desa tidak banyak mempengaruhi dukungan warga desa terhadap calon Kepala Desa. Karena sesungguhnya warga desa sudah memiliki pilihan sendiri sejak awal yang menurut pendapatnya baik dan cocok menjadi Kepala Desa. Jadi sebenarnya masyarakat desa sulit dipengaruhi dalam waktu yang singkat. Sehingga menurut saya kampanye tidak banyak berpengaruh terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, karena tanpa kampanye Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dapat berjalan.”

Gambar 4 - II

Wawancara Dengan Pak Nawawi Tokoh Masyarakat
Dan Panitia Pilkades Desa Gilis
Pada tanggal 15-06 - 2004



Jawaban Pak Nawawi tersebut diatas telah mendukung jawaban dari kuisioner pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa sebagaimana pada tabel tunggal kesimpulan variabel kampanye yang sebagian besar (61,1%) responden menjawab dengan pernyataan “ kadang-kadang tertib”.

Van Meter dan Van Horn membatasi implementasi kebijakan sehingga tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) Pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Pendapat tersebut dijadikan acuan implementasi Perda No. 7 Tahun 2000, bagaimana tujuan kebijakan itu tercapai dengan dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Sarang ? Hasil penelitian dengan memberikan pertanyaan kepada responden menunjukkan hasil yang positif yaitu sebanyak 53,1 % menjawab dengan pernyataan bahwa pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara berjalan dengan baik, lancar dan Luber.

Hal itu didukung hasil wawancara dengan Pak Rustamaji sebagai tokoh agama desa Tawangrejo, umur : 40 tahun, sebagai berikut.

Menurut saudara pemungutan dan penghitungan suara Pilkades di desa saudara berlangsung secara terbuka dan LUBER dan bagaimana TPS yang terkesan sederhana , apakah dapat menjaga kerahasiaan ? Jelaskan.

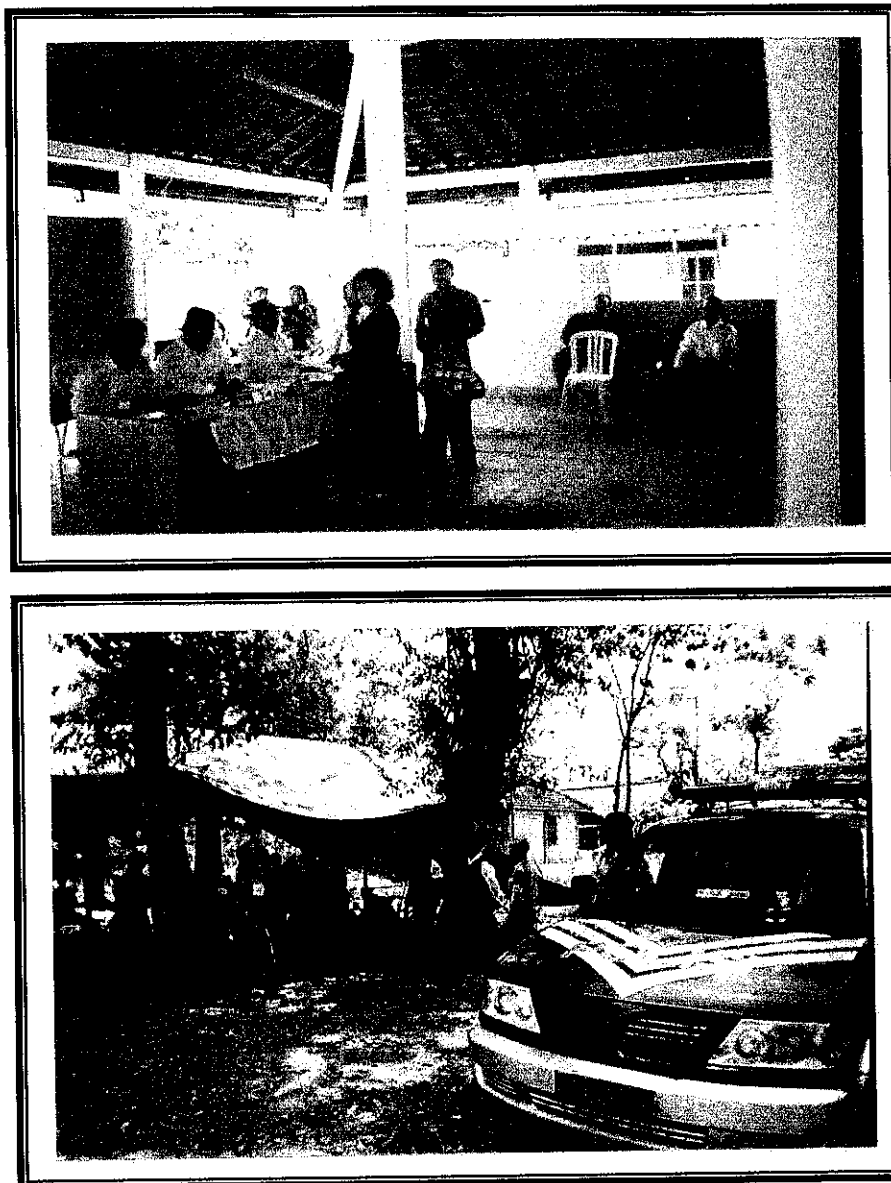
Jawaban responden :

“Pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara berjalan dengan baik dan terbuka , karena sesungguhnya inti dari pemilihan Kepala Desa adalah pada pemungutan suara, maka keberhasilannya sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pilkades. Selama ini saya belum pernah menemukan kegagalan dalam pelaksanaan pemungutan suara, karena semua masyarakat mendukung, mengawasi dan menyaksikan jalannya pemungutan suara secara langsung sehingga panitia tidak berani main-main”. Lagi pula bila

panitia tidak jujur langsung dapat diprotes oleh masyarakat. Sedangkan kondisi TPS memang sederhana tetapi menurut saya sudah dapat menjaga kerahasiaan pemungutan suara”.

Gambar 4 – III

Pelaksanaan Pemungutan Suara
Di Desa Tawangrejo dan Desa Gilis
Pada tanggal 31- 07- 2003 dan tanggal 15-09-2001



UPT-PUSTAK-UNDIP

Disamping variabel Kampanye (X_2) mempunyai hubungan positif tetapi lemah terhadap proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang, variabel pemungutan dan perhitungan suara (X_3) dan variabel pengesahan dan pelantikan kades (X_5) mempunyai hubungan positif pada taraf signifikansi yang sangat kuat karena kedua variabel tersebut memiliki nilai 0,000 atau dibawah 0,001, dengan demikian kedua variabel itu memiliki signifikansi jauh diatas 95 % bahkan dikatakan kedua variabel tersebut memiliki nilai signifikansi diatas 99 %. Dari kelima variabel sebenarnya dapat dikatakan memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang, kecuali variabel kampanye yang memiliki nilai koefisien korelasi sebesar 0,044 yang berarti bahwa variabel ini memiliki tingkat hubungan dengan proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di kecamatan Sarang sebesar 4,4 % (kategori sangat lemah). Hipotesis mayor menduga ada hubungan yang positif antara penjangkaran calon Kepala Desa, kampanye calon Kepala Desa, pemungutan dan perhitungan suara, pengumuman dalam penetapan calon terpilih, pengesahan dan pelantikan Kepala Desa, secara bersama-sama dengan proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang. Hal itu terbukti melalui test statistik yang diperoleh nilai koefisien Konkordansi Kendall sebesar 0,468 yang berarti bahwa kelima variabel tersebut memiliki hubungan yang positif karena mendekati angka 0,05. Sedangkan bila di test dengan signifikansi 1 %, maka secara bersama-sama variabel X_1 sampai dengan X_5 memiliki nilai sebesar 0,000 (lebih kecil dari 0,001). Hasil uji tersebut menunjukkan H_a diterima. Hal ini berarti bahwa terdapat

pengaruh yang sangat signifikan dalam taraf yang kuat dari penjangkaran calon Kepala Desa, kampanye calon Kepala Desa, pemungutan dan perhitungan suara, pengumuman dan penetapan calon terpilih, pengesahan dan pelantikan Kepala Desa terhadap proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang. Dari penjelasan uji hipotesis diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar tanggapan responden terhadap pertanyaan-pertanyaan dari masing-masing variabel mengarah kepada pilihan yang positif (dengan skor 4) atau menyetujui kelima variabel tersebut untuk digunakan sebagai unsur dalam proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No. 7 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang berhasil, tetapi juga masih terdapat beberapa responden yang kurang memberikan tanggapan yang positif. Hal itu dapat dilihat dari jawaban terhadap variabel tertentu yang persentasenya rendah.

Untuk mendukung bahwa implementasi Perda No. 7 Tahun 2000 di Kecamatan Sarang berjalan dengan tertib, aman dan lancar, berikut disajikan hasil wawancara dengan Aparatur Kecamatan dan Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Rembang sebagai berikut ;

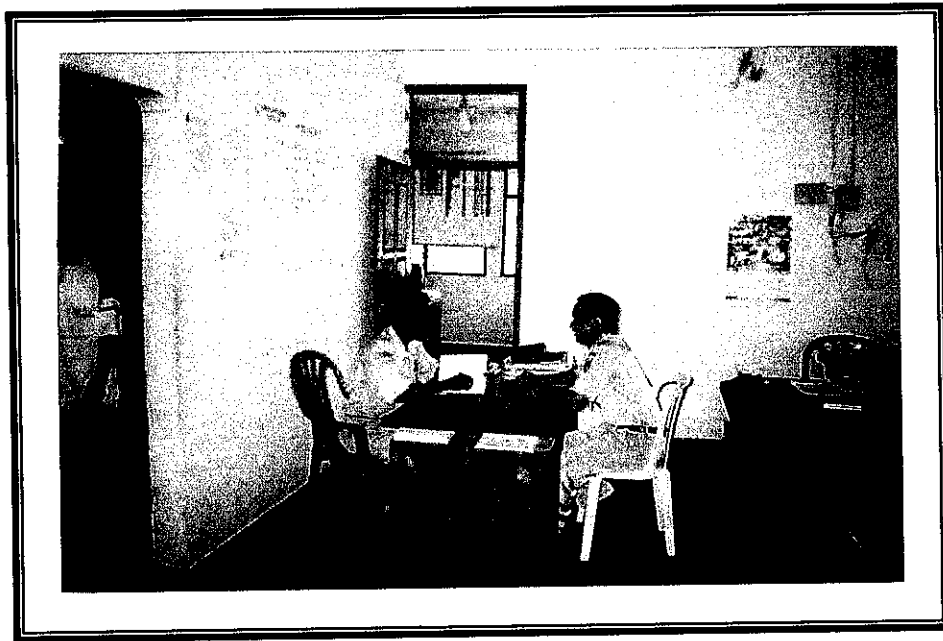
Menurut saudara apakah penyelenggaraan Pilkades di Kecamatan sarang berjalan dengan aman, tertib dan lancar ? Jelaskan.

Jawaban responden :

“Saya melihat selama ini pelaksanaan pilkades di Kecamatan Sarang berjalan cukup baik , aman . Walaupun tidak menutup kemungkinan ada juga gesekan-gesekan kecil yang menimbulkan keributan, namun dapat diatasi seketika. Pihak Kecamatan bersama pihak keamanan tingkat Kecamatan Sarang selalu mengantisipasi bila ada permasalahan,. Serta mengawal keamanan menjelang dan sesudah pelaksanaan pemungutan suara”

Gambar 4 – IV

Wawancara dengan Kasi. Pemerintahan
Kecamatan Sarang, tanggal 9 Juli 2004



Apakah Bapak sebagai Kepala Bagian Pemerintahan mengawasi jalannya pelaksanaan Pilkades di Kecamatan Sarang, dan apakah peran Bapak dalam proses pemilihan Kepala Desa ? Jelaskan

Jawaban responden :

“Ya, karena kami adalah anggota tim pengawas pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Rembang, oleh karena itu kami bersama anggota tim lainnya selalu mendatangi pelaksanaan Pilkades di desa-desa. Secara umum memang pilkades di Kecamatan Sarang lancar, hal itu berkat kerja sama yang baik diantara para pihak, masyarakat dan Pemerintah setempat serta para tokoh desa. Sedangkan tugas kami mengadakan pengawasan langsung , mengevaluasi dan memproses hasil Pemilihan Kepala Desa (memproses calon terpilih untuk mendapatkan pengesahan Bupati)”.

Gambar 4 – 5

Wawancara Dengan Ka.Bagian Pemd
Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang
Pada Tanggal 12 Juli 2004



BAB. V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab terdahulu dan uji hipotesis yang telah dilakukan, maka dalam bab ini merupakan ringkasan hasil penelitian yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penjaringan calon Kepala Desa dalam proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa mempunyai korelasi yang positif dan signifikan. Hal ini berarti semakin baik cara melakukan penjaringan calon Kepala Desa akan semakin mempengaruhi keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang.
2. Kampaye calon Kepala Desa memiliki pengaruh yang positif dalam taraf yang lemah serta tidak signifikan terhadap proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang. Dengan demikian semakin baik metode penjaringan calon Kepala Desa tidak banyak berpengaruh terhadap proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang.
3. Pemungutan dan perhitungan suara mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan. Hal ini berarti bahwa proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang erat kaitannya dengan keberhasilan pemungutan dan perhitungan suara. Gagal dalam pemungutan dan perhitungan suara berakibat gagalnya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

4. Pengumuman dan penetapan calon terpilih memiliki pengaruh yang positif dan signifikan. Hal ini berarti proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang sangat erat kaitannya dengan pengumuman dan penetapan calon terpilih. Apabila pengumuman dan penetapan tidak dilakukan dengan baik oleh panitia, maka proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang menjadi terganggu yang berakibat gagalnya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
5. Pengesahan dan pelantikan Kepala Desa memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. Hal ini berarti apabila pengesahan dan pelantikan tidak dapat dilakukan dengan baik oleh pihak yang berwenang (Bupati), maka proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang menjadi terganggu dan berakibat gagalnya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Dengan demikian apabila metode penjangkaran, kampanye, pemungutan dan perhitungan suara serta pengumuman dan penentuan calon terpilih dilaksanakan dengan baik, pengesahan dan pelantikan tepat waktu/sesuai jadwal, maka dapat dipastikan proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa akan berjalan tertib, aman dan lancar.

B. SARAN

Mengingat penelitian ini membatasi pada tataran implementasi kebijakan khususnya kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No. 7

Tahun 2000, maka perlu diselaraskan perbedaan persepsi antara pengambilan kebijakan dengan kehendak masyarakat. Perbedaan yang dimaksud adalah variabel yang diteliti dengan pandangan masyarakat desa tentang unsur-unsur yang terlibat dalam proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. Variabel X_1 , X_2 , X_3 , X_4 , X_5 , yang berkembang dan diterima sebagai bagian dari proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dengan segala akibat positif dan negatif, hendaknya dapat dijadikan pengalaman dan akan memperbaiki kinerja para pelaksana (Pemerintah/swasta dan masyarakat), agar pelaksanaan pemilihan Kepala Desa semakin berkualitas sehingga dapat menghindari kecurangan-kecurangan. Para pengambil kebijakan dapat memfasilitasi berkembangnya kehidupan demokrasi di desa khususnya yang diwujudkan dalam bentuk proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

1. Penjaringan Calon Kepala Desa

- a. Hasil penelitian sebagaimana pada tabel kuisisioner No. 1 sampai 6, jawabannya sangat bervariasi, ini berarti bahwa penjaringan calon Kepala Desa yang sekarang terjadi masih diwarnai dengan ketidakberesan yang tersembunyi (tidak terbuka, ada kecurangan yang dilakukan panitia), sehingga perlu sistem pengawasan yang lebih baik.
- b. Hasil wawancara dari beberapa responden ada yang mengeluhkan masa kerja Kepala Desa yang hanya lima tahun, hal ini mengakibatkan masyarakat enggan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, sehingga para pengambil kebijakan dapat mempertimbangkan untuk merubah

Perda No 7 Tahun 2000, khususnya yang menyangkut masa kerja jabatan Kepala Desa.

2. Kampanye

- a. Walaupun variabel ini kurang memberikan kontribusi yang positif pada proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, namun hemat penulis masih diperlukan dalam proses pemilihan Kepala Desa, sebagai pembelajaran kepada masyarakat tentang proses demokratisasi di desa.
- b. Hasil penelitian menunjukkan angka yang seimbang antara kampanye sesuai dengan ketentuan dan yang menjawab kadang-kadang sesuai ketentuan (43,4% dan 44%). Hal itu berarti dalam pelaksanaan kampanye terdapat penyimpangan (penekanan-penekanan dari kelompok tertentu terhadap pemilih dan politik uang). Guna menghindarinya, para pengambil kebijakan agar mengatur secara ketat dalam Peraturan Daerah dan memberi sanksi yang nyata bagi pelanggarnya, misalnya pembatalan status sebagai calon Kepala Desa.

3. Pemungutan dan Perhitungan Suara

Walaupun variabel ini memberikan kontribusi yang positif dan signifikan dengan proses pemilihan Kepala Desa, namun fenomena yang terjadi di dalam proses pemungutan suara yang pernah ditemui penulis pada saat pemilih menggunakan hak pilihnya dalam TPS. Peristiwa itu terjadi karena TPS yang kurang memenuhi syarat untuk menjaga kerahasiaan saat warga

desa menggunakan hak pilihnya, sehingga para botoh maupun calon dapat mengetahui siapa warga desa yang memilih dirinya. Dengan demikian diperlukan pengaturan yang baik dan pengawasan pihak independen yang di muat dalam peraturan daerah.

4. Pengumuman dan Penetapan Calon Terpilih.

1. Pengumuman dilakukan setelah semua panitia dan saksi setuju hasil perolehan suara calon Kepala Desa dan harus didahului dengan rapat panitia.
2. Agar calon terpilih mendapatkan legitimasi dari masyarakat, maka BPD wajib membuat penetapan tentang calon yang mendapat suara terbanyak.

5. Pengesahan dan Pelantikan Kepala Desa.

1. Proses pengesahan dan pelantikan selesai dilakukan oleh pemerintah setelah ada permintaan dari pemerintah desa, dalam jangka waktu paling lama tujuh hari setelah pengumuman dan penetapan calon terpilih, maka calon terpilih sudah harus dilantik menjadi Kepala Desa yang dituangkan ke dalam Perda.
2. Guna mengatasi hal tersebut diatas, maka pengesahan dan pelantikan Kepala Desa yang saat ini menjadi kewenangan Bupati agar di limpahkan kepada Camat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Black, James A, 1999, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial* (Terjemahan), E.Koeswara et.al., Refika Aditama, Bandung.
- Dunn, William N, 1998, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Terjemahan), Samodra Wibawa et. al ,Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Dye, Thomas R, 1978, *Understanding Publik Policy*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ.
- Easton, David, 1953, *The Political System*, Alfred A. Knopf, New York.
- Edward II, George C, 1980, *Implementation Public Policy*, Congressional Quarterly Press, Washington DC.
- Islamy, Irfan, 2002, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Publik*, cet ke XI, Bumi Aksara, Jakarta.
- Ismawan, Indra, 2002, *Ranjau-Ranjau Otonomi Daerah*, Pondok Edukasi, Solo.
- Juliantara, Dadang et.al, 2003 , *Politik Pemberdayaan (jalan menuju otonomi desa)*, Pondok Pustaka Jogja, Yogyakarta.
- Kana, Nico L 2001, *Dinamika Politik Lokal di Indonesia*, Pustaka Percik, Salatiga.
- Purbayu Budi Santoso, Ashari, 2003, *Statistik, Teori dan Aplikasi dengan program MS. Excel & SPSS Versi 11*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- Subana, M, 2001, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*, Pustaka Setia, Bandung.
- Sudjarwo, 2001, *Metodologi Penelitian Sosial*, Penerbit Mandar Maju , Bandung.
- Sugijono , 1999, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Jakarta.
- _____, 2001, *Statistik Nonparametris*, Cet. Kedua Alfabeta, Bandung.
- Suhartono, et. al , 2001, *Politik Lokal*, Laper Pustaka Utama, Yogyakarta.
- Singarimbun,Masri, 1995, *Metode Penelitian Survei*, cet. kedua LP3ES, Jakarta.
- Suryabrata, Sumadi, 2003, *Metodologi Penelitian*, PT Raja Grafinda, Jakarta.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S., 2003, *Implementasi Kebijakan Publik*, Cet. Pertama YPAPI, Yogyakarta.

UPT-PUSTAK-UNDIP

Wibawa, Samodra, et.al.,1994 , *Evaluasi Kebijakan Publik*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wahab, Solichin Abdul, 1990, *Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara*, Bineka Cipta, Jakarta.

Wahab, Solichin Abdul, 2002, *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta,

Winarno, Budi, 2002, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Cet.Pertama MedPrint Offset, Yogyakarta.

Yuwono, Teguh, 2003, *Kebijakan Publik*, Universitas Diponegoro, Semarang.

Dokumentasi

Undang Undang Dasar 1945.

Undang Undang No 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No. 7 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan , Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.